

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan entitas anaknya

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dan untuk periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 MARET 2022
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(TIDAK DIAUDIT)**

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3-4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6-120

**Surat Pernyataan Direksi
mengenai Tanggung Jawab Direksi untuk**

**Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Maret 2022
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit)
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya**

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ririek Adriansyah
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili : Jl. Karang Tengah Raya Pertanian I/99 RT 05 RW 04
Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (022) 452 7101
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Heri Supriadi
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili : Jl. Rancamayar No. 18 RT 001 RW 008
Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal, Bandung
Nomor Telepon : (022) 452 7201/ 021 520 9824
Jabatan : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan entitas anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah dipersiapkan dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. Seluruh informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak ini telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 9 Mei 2022



Ririek Adriansyah
Direktur Utama

Heri Supriadi
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2021 (diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Maret 2022	31 Desember 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	3,33,38	41.629	38.311
Aset keuangan lancar lainnya	4,33,38	985	493
Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan kerugian kredit ekspektasian			
Pihak berelasi	5,33,38	1.543	961
Pihak ketiga	5,38	7.952	7.549
Aset kontrak - bersih	6,33,38	2.157	2.330
Piutang lain-lain - bersih	38	216	195
Persediaan - bersih	7	932	779
Aset tersedia untuk dijual	12	91	818
Biaya kontrak	9	638	656
Pajak dibayar di muka	28a	2.003	2.144
Tagihan restitusi pajak	28b	683	690
Aset lancar lainnya	8,33	6.024	6.351
Jumlah Aset Lancar		<u>64.853</u>	<u>61.277</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset kontrak - bersih	6,33,38	279	143
Penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	10,38	13.447	13.661
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi	11	136	139
Biaya kontrak	9	1.639	1.608
Aset tetap	12,33,36a	164.085	165.026
Aset hak guna	13	17.741	18.469
Aset takberwujud	15	7.589	7.506
Aset pajak tangguhan - bersih	28f	4.095	3.824
Aset tidak lancar lainnya	14,28,33,38	5.586	5.531
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>214.597</u>	<u>215.907</u>
JUMLAH ASET		<u>279.450</u>	<u>277.184</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	16,33,38	617	497
Pihak ketiga	16,38	15.278	16.673
Liabilitas kontrak	18a,33	6.804	6.795
Utang lain-lain	38	643	609
Utang pajak	28c	5.318	3.923
Beban yang masih harus dibayar	17,33,38	16.244	15.885
Deposito pada pelanggan	33	2.436	2.416
Utang bank jangka pendek	19a,33,38	6.909	6.682
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	19b,33,38	9.505	9.690
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun	13,38	6.282	5.961
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>70.036</u>	<u>69.131</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	28f	568	1.158
Liabilitas kontrak	18b,33	1.378	1.283
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	32	1.204	1.206
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	31	11.755	11.563
Pinjaman jangka panjang dan pinjaman lainnya	20,33,38	32.052	36.319
Liabilitas sewa	13,38	8.379	10.426
Liabilitas lainnya		748	699
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>56.084</u>	<u>62.654</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>126.120</u>	<u>131.785</u>
EKUITAS			
Modal saham	22	4.953	4.953
Tambahan modal disetor		2.711	2.711
Komponen ekuitas lainnya	23	9.422	9.395
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	30	15.337	15.337
Belum ditentukan penggunaannya		95.371	89.250
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk - bersih		127.794	121.646
Kepentingan nonpengendali	21	25.536	23.753
JUMLAH EKUITAS		<u>153.330</u>	<u>145.399</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>279.450</u>	<u>277.184</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PENDAPATAN	24,33	35.208	33.945
BIAYA DAN BEBAN			
Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	26,33	(8.936)	(8.452)
Beban penyusutan dan amortisasi	12,13,15	(7.976)	(7.286)
Beban karyawan	25	(3.516)	(3.500)
Beban interkoneksi	33	(1.356)	(1.136)
Beban umum dan administrasi	27,33	(1.200)	(1.293)
Beban pemasaran	33	(812)	(755)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi	10	(893)	14
Penghasilan lain-lain - bersih		47	84
Laba selisih kurs - bersih		45	78
LABA USAHA		10.611	11.699
Penghasilan pendanaan	33	200	153
Biaya pendanaan	33	(945)	(982)
Rugi bersih entitas asosiasi - bersih	11	(4)	(54)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		9.862	10.816
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	28d		
Pajak kini		(2.832)	(2.243)
Pajak tangguhan		826	(186)
		(2.006)	(2.429)
LABA PERIODE BERJALAN		7.856	8.387
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
<i>Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	23	27	93
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi	11	1	-
<i>Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Laba (rugi) aktuarial - bersih	31	2	(1)
Penghasilan komprehensif lain - bersih		30	92
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		7.886	8.479
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		6.118	6.014
Kepentingan nonpengendali	21	1.738	2.373
		7.856	8.387
Jumlah laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		6.148	6.106
Kepentingan nonpengendali		1.738	2.373
		7.886	8.479
LABA PER SAHAM DASAR (dalam jumlah penuh)	29		
Laba bersih per saham		61,76	60,71
Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS)		6.175,92	6.070,93

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Distribusikan kepada pemilik entitas induk							Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
		Modal saham	Tambahkan modal disetor	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba		Jumlah bersih			
					Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya				
Saldo, 1 Januari 2022		4.953	2.711	9.395	15.337	89.250	121.646	23.753	145.399	
Penambahan setoran modal dari nonpengendali entitas anak		-	-	-	-	-	-	45	45	
Laba periode berjalan	21	-	-	-	-	6.118	6.118	1.738	7.856	
Penghasilan komprehensif lain - bersih		-	-	27	-	3	30	-	30	
Saldo, 31 Maret 2022		4.953	2.711	9.422	15.337	95.371	127.794	25.536	153.330	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
 untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Distribusikan kepada pemilik entitas induk							
		Modal saham	Tambahannya modal disetor	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba		Jumlah bersih	Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
					Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo, 1 Januari 2021		4.953	2.711	374	15.337	79.152	102.527	18.362	120.889
Penyesuaian kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	(70)	(70)
Dividen kas		-	-	-	-	-	-	(1.400)	(1.400)
Laba periode berjalan	21	-	-	-	-	6.014	6.014	2.373	8.387
Penghasilan komprehensif lain - bersih		-	-	93	-	(1)	92	-	92
Saldo, 31 Maret 2021		4.953	2.711	467	15.337	85.165	108.633	19.265	127.898

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan dan operator lain		34.008	32.141
Penerimaan restitusi pajak		1.301	650
Penerimaan dari pendapatan bunga		190	153
Pembayaran kas untuk beban		(10.022)	(9.070)
Pembayaran kas kepada karyawan		(2.639)	(2.534)
Pembayaran pajak penghasilan badan dan final		(1.602)	(735)
Pembayaran beban bunga		(976)	(1.080)
Pembayaran sewa jangka pendek dan bernilai rendah	13	(750)	(1.007)
Pembayaran pajak pertambahan nilai - bersih		(246)	(477)
Pembayaran kas lainnya - bersih		(647)	(608)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi		18.617	17.433
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
(Kenaikan) penurunan uang muka dan aset lainnya	14	472	(174)
Hasil dari klaim asuransi	12	124	85
Hasil dari penjualan aset tetap	12	109	147
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	11	7	-
Pembelian aset tetap	12,40	(7.660)	(5.974)
Pembelian aset takberwujud	15,40	(809)	(606)
Penambahan penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	10	(712)	(301)
Hasil dari (penempatan pada) aset keuangan lancar lainnya - bersih		(490)	102
Penambahan penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi	11	-	(42)
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi		(8.959)	(6.763)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Pencairan utang bank dan pinjaman lainnya	19,20	5.162	10.112
Penerimaan setoran modal entitas anak pada pemegang saham nonpengendali		45	-
Pembayaran utang bank dan pinjaman lainnya	19,20	(9.390)	(5.979)
Pembayaran kewajiban sewa		(2.183)	(2.366)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham nonpengendali entitas anak	21	-	(1.400)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) kegiatan pendanaan		(6.366)	367
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		3.292	11.037
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		26	103
PENYISIHAN KERUGIAN KREDIT EKSPEKTASIAN		(0)	(0)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	3	38.311	20.589
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	3	41.629	31.729

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") pada mulanya merupakan bagian dari "*Post en Telegraafdienst*", yang didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara ("Persero"). Entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") (Catatan 1c dan 22).

Perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dilakukan sehubungan dengan:

- i. Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- ii. Kebutuhan Perusahaan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik dan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- iii. Kebutuhan Perusahaan untuk melakukan penyesuaian kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan di atas sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. No. 35 tanggal 18 Juni 2021. Perubahan telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0426883 tanggal 09 Juli 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Keputusan Menkumham No. AHU-0038942.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha yang secara umum meliputi:

- i. Usaha utama:
 - (a) Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan/menjual/menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
 - (c) Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

ii. Usaha penunjang:

- (a) Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
- (b) Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, antara lain pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.
- (c) Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat.

Perusahaan memiliki beberapa izin penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa dari Pemerintah yang berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas selama Perusahaan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin-izin tersebut. Untuk setiap izin, yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika ("Menkominfo"), evaluasi dilakukan setiap tahun dan evaluasi menyeluruh dilakukan setiap lima tahun. Perusahaan wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa berdasarkan izin-izin tersebut di atas setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika ("DJPP") sebelumnya Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("DJPT").

Laporan tersebut meliputi beberapa informasi seperti kemajuan pengembangan jaringan, pencapaian standar kualitas jasa, jumlah pelanggan, pembayaran biaya atas hak penyelenggaraan, dan kontribusi pelayanan universal, sementara untuk Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik, Jasa Interkoneksi Internet, dan Jasa Akses Internet terdapat tambahan informasi yang dipersyaratkan seperti kinerja operasi, segmen pelanggan, lalu lintas, dan pendapatan kotor.

Rincian izin-izin tersebut adalah sebagai berikut:

Izin	No. Izin	Jenis jasa	Tanggal penetapan/ perpanjangan
Izin penerbit uang elektronik	Izin Bank Indonesia 11/432/DSAP	Penerbit uang elektronik	3 Juli 2009
Izin penyelenggaraan pengiriman uang	Izin Bank Indonesia 11/23/bd/8	Penyelenggaraan pengiriman uang	5 Agustus 2009
Izin penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik	127/KEP/DJPP/ KOMINFO/3/2016	Jasa internet teleponi untuk keperluan publik	30 Maret 2016
Izin penyelenggaraan jasa akses internet	2176/KEP/M.KOMINFO/ 12/2016	Jasa akses internet	30 Desember 2016
Izin penyelenggaraan jasa penyediaan konten	1040/KEP/M.KOMINFO/ 16/2017	Jasa penyediaan konten	16 Mei 2017
Izin penyelenggaraan jasa interkoneksi internet	1004/KEP/M.KOMINFO/ 2018	Jasa interkoneksi internet	26 Desember 2018
Izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data	046/KEP/M.KOMINFO/ 02/2020	Jaringan sistem komunikasi data	3 Agustus 2020

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Izin	No. Izin	Jenis jasa	Tanggal penetapan/ perpanjangan
Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i>	449/KEP/M.KOMINFO/02/2020	Jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i> dan <i>packet switched</i>	22 September 2020
Izin penyelenggaraan jasa untuk kategori layanan IPTV	022/KEP/M.KOMINFO/02/2021	Jasa multimedia layanan IPTV	25 Februari 2021
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	073/KEP/M.KOMINFO/02/2021	Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	23 Agustus 2021
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional	082/KEP/M.KOMINFO/02/2021	Jaringan tetap sambungan internasional	8 Oktober 2021
Izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup	094/KEP/M.KOMINFO/02/2021	Jaringan tetap tertutup	9 Desember 2021

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Corporate Secretary, Internal Audit, dan Karyawan

i. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan yang dibuat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. No. 34 tanggal 18 Juni 2021 dan No. 12 tanggal 10 Juli 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2022	31 Desember 2021
Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro	Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro
Komisaris	Arya Mahendra Sinulingga	Arya Mahendra Sinulingga
Komisaris	Rizal Mallarangeng	Rizal Mallarangeng
Komisaris	Isa Rachmatarwata	Isa Rachmatarwata
Komisaris	Ismail	Ismail
Komisaris	Marcelino Rumambo Pandin	Marcelino Rumambo Pandin
Komisaris Independen	Bono Daru Adji	Bono Daru Adji
Komisaris Independen	Wawan Iriawan	Wawan Iriawan
Komisaris Independen	Abdi Negara Nurdin	Abdi Negara Nurdin
Direktur Utama	Ririek Adriansyah	Ririek Adriansyah
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Heri Supriadi	Heri Supriadi
Direktur <i>Digital Business</i>	Muhamad Fajrin Rasyid	Muhamad Fajrin Rasyid
Direktur <i>Strategic Portfolio</i>	Budi Setyawan Wijaya	Budi Setyawan Wijaya
Direktur <i>Enterprise and Business Service</i>	Edi Witjara	Edi Witjara
Direktur <i>Wholesale and International Services</i>	Bogi Witjaksono	Bogi Witjaksono
Direktur <i>Human Capital Management</i>	Afriwandi	Afriwandi
Direktur <i>Network, Information Technology and Solution</i>	Herlan Wijanarko	Herlan Wijanarko
Direktur <i>Consumer Service</i>	FM Venusiana R	FM Venusiana R

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Corporate Secretary, Internal Audit, dan Karyawan (lanjutan)

ii. Komite Audit, Corporate Secretary, dan Internal Audit

Susunan Komite Audit, Corporate Secretary, dan Internal Audit Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Ketua	Bono Daru Adji	Bono Daru Adji
Anggota	Bambang Permadi	Bambang Permadi
	Soemantri Brojonegoro	Soemantri Brojonegoro
Anggota	Wawan Iriawan	Wawan Iriawan
Anggota	Abdi Negara Nurdin	Abdi Negara Nurdin
Anggota	Emmanuel Bambang Suyitno	Emmanuel Bambang Suyitno
Anggota	Edy Sihotang	Edy Sihotang
Corporate Secretary	Andi Setiawan	Andi Setiawan
Internal Audit	Harry Suseno Hadisoebroto	Harry Suseno Hadisoebroto

iii. Karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak ("Grup") pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah 21.099 orang dan 20.884 orang.

c. Penawaran umum efek Perusahaan

Jumlah saham Perusahaan sesaat sebelum penawaran umum perdana (*Initial Public Offering* atau "IPO") adalah 8.400.000.000, yang terdiri dari 8.399.999.999 saham Seri B dan 1 saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah. Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah menjual saham Perusahaan yang terdiri dari 933.333.000 saham baru Seri B dan 233.334.000 saham Seri B milik Pemerintah kepada masyarakat melalui IPO di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan penawaran dan pencatatan di Bursa Efek New York ("NYSE") dan Bursa Efek London ("LSE") atas 700.000.000 saham Seri B milik Pemerintah dalam bentuk *American Depositary Shares* ("ADS"). Terdapat 35.000.000 ADS dan masing-masing ADS mewakili 20 saham Seri B pada saat itu.

Pada bulan Desember 1996, Pemerintah menjual saham Perusahaan sebanyak 388.000.000 saham Seri B dan selanjutnya pada tahun 1997, Pemerintah membagikan 2.670.300 saham Seri B sebagai insentif bagi para pemegang saham Perusahaan yang tidak menjual sahamnya selama satu tahun terhitung sejak tanggal IPO. Pada bulan Mei 1999, Pemerintah kembali menjual 898.000.000 saham Seri B.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada RUPST Perusahaan tanggal 16 April 1999, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan yang berasal dari kapitalisasi sebagian tambahan modal disetor melalui pembagian saham bonus sejumlah 746.666.640 lembar saham. Pembagian saham bonus kepada para pemegang saham Perusahaan dilakukan pada bulan Agustus 1999. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diamandemen dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif pada tanggal yang sama. Pemberlakuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tidak berdampak terhadap penawaran umum efek Perusahaan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut.

Pada bulan Desember 2001, Pemerintah menjual 1.200.000.000 saham atau 11,9% dari jumlah saham Seri B yang beredar. Pada bulan Juli 2002, Pemerintah kembali menjual 312.000.000 saham atau 3,1% dari jumlah saham Seri B yang beredar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M. No. 26 tanggal 30 Juli 2004, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 2. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp500 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dan 1 saham Seri B dengan nilai nominal Rp250. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B, dan jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 10.079.999.639 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 40 saham Seri B.

Pada Rapat Umum Luar Biasa ("RUPSLB") yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2005 dan RUPST pada tanggal 29 Juni 2007, 20 Juni 2008, dan 19 Mei 2011, para pemegang saham Perusahaan menyetujui masing-masing rencana tahap I, II, III, dan IV program Perusahaan untuk membeli kembali saham Seri B yang telah diterbitkan.

Selama periode 21 Desember 2005 sampai dengan 20 Juni 2007, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali 211.290.500 saham dari publik (program pembelian kembali saham tahap I). Pada tanggal 30 Juli 2013, Perusahaan telah menjual seluruh saham tersebut.

Pada RUPST tanggal 19 April 2013, sebagaimana diaktakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, SH, M.Kn., No. 38 tanggal 19 April 2013, para pemegang saham menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas saham treasury yang diakuisisi dalam tahap III. Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013 yang dinyatakan dalam akta notaris No. 38 tanggal 19 April 2013 oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 5. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp50 dan 4 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 saham Seri B. Jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 100.799.996.399 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 200 saham Seri B. Efektif tanggal 26 Oktober 2016, Perusahaan melakukan perubahan rasio Depositary Receipt dari 1 ADS mewakili 200 saham Seri B menjadi 1 ADS mewakili 100 saham Seri B (Catatan 22). Informasi laba bersih per ADS pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian telah disesuaikan dengan perubahan rasio ini.

Pada tanggal 16 Mei dan 5 Juni 2014, Perusahaan telah melakukan pembatalan pencatatan pada Bursa Efek Tokyo ("TSE") dan delisting pada LSE.

Pada tanggal 31 Maret 2022, seluruh saham Seri B Perusahaan telah dicatatkan pada BEI dan 45.183.232 ADS telah dicatatkan pada NYSE (Catatan 22).

Pada tanggal 16 Juni 2015, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp2.200 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, Rp2.100 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun, Rp1.200 miliar untuk Seri C yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun dan Rp1.500 miliar untuk Seri D yang berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dicatatkan di BEI (Catatan 20b.i).

Pada tanggal 21 Desember 2015, Perusahaan menjual sisa saham treasury tahap III.

Pada tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan menjual saham treasury tahap IV.

Pada RUPST tanggal 27 April 2018 yang diaktakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. No. 54, para pemegang saham menyetujui pembatalan 1.737.779.800 saham treasury dengan mengurangi modal saham Perseroan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak

Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, Perusahaan telah mengkonsolidasikan laporan keuangan semua entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut (Catatan 2b dan 2d):

i. Entitas anak dengan kepemilikan langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Maret 2022	31 Desember 2021
PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"), Jakarta, Indonesia	Jasa jaringan dan layanan telekomunikasi seluler, web portal, web hosting, mobile digital advertising, jasa konsultan telekomunikasi, data processing activities, financial technology/ fintech/ 26 Mei 1995	1995	65	65	101.240	101.302
PT Dayamitra Telekomunikasi ("Mitratel"), Jakarta, Indonesia	Penyewaan menara telekomunikasi dan jasa telekomunikasi lainnya/ 17 Mei 2001	1995	72	72	57.481	57.728
PT Multimedia Nusantara ("Metra"), Jakarta, Indonesia	Jasa jaringan telekomunikasi dan multimedia/ 9 Mei 2003	1998	100	100	18.968	18.758
PT Telekomunikasi Indonesia International ("Telin"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi/ 31 Juli 2003	1995	100	100	13.456	12.705
PT Graha Sarana Duta ("GSD"), Jakarta, Indonesia	Penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil, dan pengembang/ 25 April 2001	1982	100	100	5.985	5.884
PT Telkom Satelit Indonesia ("Telkomsat"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - menyediakan sistem komunikasi satelit, jasa dan sarana terkait/ 28 September 1995	1996	100	100	5.961	5.515
PT Telkom Akses ("Telkom Akses"), Jakarta, Indonesia	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi/ 26 November 2012	2013	100	100	4.750	4.973
PT Sigma Tata Sadaya ("STS"), Tangerang Selatan, Indonesia	Jasa konsultasi piranti keras dan piranti lunak komputer dan perdagangan/ 27 November 1996	1996	100	100	2.116	2.107
PT Metra-Net ("Metra-Net"), Jakarta, Indonesia	Jasa portal multimedia/ 17 April 2009	2009	100	100	1.668	1.640
PT PINS Indonesia ("PINS"), Jakarta, Indonesia	Jasa dan pembangunan telekomunikasi/ 15 Agustus 2002	1995	100	100	1.336	1.589
PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia ("Telkom Infra"), Jakarta, Indonesia	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi/ 16 Januari 2014	2014	100	100	1.322	1.259

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

i. Entitas anak dengan kepemilikan langsung (lanjutan):

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Maret 2022	31 Desember 2021
PT Napsindo Primatel Internasional ("Napsindo"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - menyediakan <i>Network</i> , Access Point ("NAP"), <i>Voice Over Data</i> ("VOD"), dan jasa terkait lainnya/ 29 Desember 1998	1999; berhenti beroperasi pada tanggal 13 Januari 2006	60	60	5	5

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Maret 2022	31 Desember 2021
PT Metra Digital Investama ("MDI"), Jakarta, Indonesia	Jasa perdagangan informasi dan teknologi multimedia, hiburan dan investasi/ 8 Januari 2013	2013	100	100	5.770	5.784
PT Sigma Cipta Caraka ("Sigma"), Tangerang, Indonesia	Jasa teknologi informatika - implementasi dan integrasi sistem, <i>outsourcing</i> , dan pemeliharaan lisensi piranti lunak/ 1 Mei 1987	1988	100	100	5.060	5.093
Telekomunikasi Indonesia International Ltd. ("Telin Hong Kong"), Hong Kong	Telekomunikasi/ 8 Desember 2010	2010	100	100	3.711	2.998
Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., ("Telin Singapore"), Singapore	Telekomunikasi/ 6 Desember 2007	2008	100	100	3.348	3.272
PT Infomedia Nusantara ("Infomedia"), Jakarta, Indonesia	Jasa data dan informasi - menyediakan jasa informasi telekomunikasi dan jasa informasi lainnya dalam bentuk media cetak dan elektronik, dan jasa <i>call center</i> / 22 September 1999	1984	100	100	2.501	2.359
PT Telkom Landmark Tower ("TLT"), Jakarta, Indonesia	Jasa pengembangan dan manajemen properti/ 1 Februari 2012	2012	55	55	2.200	2.204
PT Finnet Indonesia ("Finnet"), Jakarta, Indonesia	Jasa teknologi informatika/ 31 Oktober 2005	2006	60	60	1.277	1.294

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan):

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Maret 2022	31 Desember 2021
PT Metra Digital Media ("MD Media"), Jakarta, Indonesia	Jasa layanan informasi dalam bentuk direktori khusus/ 22 Januari 2013	2013	100	100	1.260	1.201
PT Melon Indonesia ("Melon"), Jakarta, Indonesia	Jasa penjualan konten digital/ 14 November 2016	2010	100	100	1.258	1.187
PT Persada Sokka Tama ("PST"), Jakarta, Indonesia	Penyediaan sarana prasarana jaringan telekomunikasi/ 19 Februari 2019	2008	100	100	1.133	1.097
PT Telkomsel Ekosistem Digital ("TED"), Jakarta, Indonesia	Jasa informasi dan teknologi multimedia, hiburan, dan investasi/ 14 Desember 2021	2021	100	100	743	197
Telekomunikasi Indonesia International (TL) S.A. ("Telkomcel"), Dili, Timor Leste	Telekomunikasi/ 11 September 2012	2012	100	100	728	708
PT Telkomsel Mitra Inovasi ("TMI"), Jakarta, Indonesia	Jasa konsultan manajemen bisnis dan investasi modal/ 18 Januari 2019	2019	100	100	691	692
TS Global Network Sdn. Bhd. ("TSGN"), Petaling Jaya, Malaysia	Jasa satelit/ 14 Desember 2017	1996	70	70	611	596
PT Administrasi Medika ("Ad Medika"), Jakarta, Indonesia	Jasa administrasi asuransi kesehatan/ 25 Februari 2010	2002	100	100	599	543
PT Swadharma Sarana Informatika ("SSI"), Jakarta, Indonesia	Jasa pengisian kas dan pemeliharaan ATM/ 2 April 2018	2001	51	51	478	489
PT Digital Aplikasi Solusi ("Digiserve"), sebelumnya PT Teltranet Aplikasi Solusi Jakarta, Indonesia	Jasa sistem komunikasi/ 29 Agustus 2014	2014	100	100	373	389
PT Nusantara Sukses Investasi ("NSI"), Jakarta, Indonesia	Jasa dan perdagangan/ 1 September 2014	2014	100	100	310	309
PT Graha Yasa Selaras ("GYS"), Jakarta, Indonesia	Jasa pariwisata/ 27 April 2012	2012	51	51	282	288

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan):

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase Kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Maret 2022	31 Desember 2021
Telekomunikasi Indonesia International (USA) Inc., ("Telin USA"), Los Angeles, USA	Telekomunikasi/ 11 Desember 2013	2014	100	100	211	191
PT Nutech Integrasi ("Nutech"), Jakarta, Indonesia	Jasa penyedia sistem integrator/ 13 Desember 2017	2001	60	60	181	198
PT Metraplaza ("Metraplaza"), Jakarta, Indonesia	Jasa jaringan dan e-commerce/ 9 April 2012	2012	60	60	57	61
Telekomunikasi Indonesia International (Australia) Pty. Ltd. ("Telin Australia"), Sydney, Australia	Telekomunikasi/ 9 Januari 2013	2013	100	100	30	34
Telekomunikasi Indonesia Intl (Malaysia) Sdn. Bhd. ("Telin Malaysia"), Malaysia	Telekomunikasi/ 2 Juli 2013	2013	70	70	24	27
PT Satelit Multimedia Indonesia ("SMI"), Jakarta, Indonesia	Jasa satelit/ 25 Maret 2013	2013	100	100	8	8

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

e. Transaksi Penawaran Umum Efek dan Akuisisi pada Entitas Anak

i. Mitratel

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) No. 31 tanggal 21 Agustus 2021 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. para pemegang saham Mitratel memutuskan dan menyetujui perubahan mengenai status Mitratel dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dengan nama PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk.

Pada tanggal 12 November 2021, Mitratel mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan suratnya No. S-201/D.04/2021 untuk melakukan penawaran umum perdana ("IPO") sebanyak 23.493.524.800 saham biasa dengan nilai nominal Rp228 per saham dan harga penawaran Rp800 per saham. Pada tanggal 22 November 2021, saham Mitratel telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Surat No. S-08617/BEI.PP3/11-2021 perihal Persetujuan Pencatatan Efek tertanggal 15 November 2021.

Mitratel memperoleh dana IPO sebesar Rp18.463 miliar (setelah dikurangi biaya penerbitan saham), sehingga kepemilikan saham Perusahaan pada Mitratel berubah dari 99,99% menjadi 71,87%. Sehingga, Grup masih mempunyai kendali atas Mitratel.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Transaksi Penawaran Umum Efek dan Akuisisi pada Entitas Anak (lanjutan)

i. Mitratel (lanjutan)

Atas transaksi ini Perusahaan mencatat selisih transaksi kepemilikan nonpengendali sebesar:

Hasil dari IPO 28,13% kepemilikan saham	18.463
Aset bersih yang diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	<u>(9.397)</u>
Kenaikan ekuitas dari selisih transaksi kepemilikan nonpengendali	<u>9.066</u>

ii. Metra

Pada tanggal 29 Agustus 2014, Metra dan Telstra Holding Singapore Pte. Ltd. mendirikan PT Teltranet Aplikasi Solusi ("Teltranet"). Kepemilikan saham Metra pada Teltranet adalah sebesar 51%, Metra tidak memiliki pengendalian dalam menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari Teltranet, dicatat sebagai kepemilikan pada entitas asosiasi.

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Saham tanggal 31 Agustus 2021, Metra membeli saham Teltranet yang dimiliki oleh Telstra Holdings Singapore Pte. Ltd. sebanyak 13.115.477 lembar atau setara dengan 49% kepemilikan saham dengan nilai perolehan sebesar AU\$1, sehingga menjadi entitas anak Metra.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Metra telah mencatat selisih nilai akuisisi dengan nilai wajar, sehingga *goodwill* yang diakui sebesar Rp64 miliar (Catatan 15).

iii. STS

STS sebelumnya adalah entitas anak Sigma. Berdasarkan Akta Notaris Jimmy Tanal, S.H.,M.Kn. No. 388 tanggal 27 Desember 2021, Perusahaan melakukan transaksi pengambilalihan saham STS, sehingga kepemilikan Perusahaan pada STS menjadi 99,89% dan porsi Sigma terdilusi menjadi setara 0,11% porsi kepemilikan. Perusahaan membeli sebanyak 2.106.465.158.910 lembar saham seri B STS atau setara dengan Rp2.106 miliar. Perusahaan telah melakukan pembayaran tunai sebesar Rp1.250 miliar dan penyeteroran modal dalam bentuk lain (inbreng) sebesar Rp856 miliar untuk pengambilalihan saham STS tersebut.

iv. Telkomsel

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Telkomsel pada tanggal 14 Desember 2021, Telkomsel mendirikan anak perusahaan, PT Telkomsel Ekosistem Digital ("TED"), yang diresmikan dengan akta Notaris Bonardo Nasution, S.H. No. 19 tanggal 16 Desember 2021. Total modal disetor TED adalah 197.000 saham (nilai nominal Rp1.000.000 per saham). Telkomsel memiliki 196.989 saham dan menyeter kas sebesar Rp197 miliar pada tanggal 29 Desember 2021.

f. Penyelesaian dan kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah disetujui dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 9 Mei 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") di Indonesia dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", yang terlampir dalam surat KEP-347/BL/2012.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

Angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam dan dibulatkan menjadi miliaran Rupiah ("Rp") dan jutaan US\$, kecuali dinyatakan lain. Untuk angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini yang masih mengandung nilai tetapi di bawah Rp1 miliar dan US\$ 1 juta disajikan dengan angka nol.

Standar akuntansi baru

Pada tanggal 1 Januari 2022, Grup menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi. Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya:

- i. Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis
- ii. Amandemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi
- iii. Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan
- iv. Amandemen PSAK 73: Sewa

Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Berlaku efektif 1 Januari 2023:

- i. Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
Amandemen ini mengklarifikasi klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan amandemen ini juga mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material.
- ii. Amandemen PSAK 16: Aset Tetap
Amandemen ini mengatur tentang perlakuan atas hasil sebelum penggunaan yang diintensikan.
- iii. Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
Amandemen ini memberi definisi baru dari "estimasi akuntansi" dan penjelasannya.
- iv. Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal
Amandemen ini mengatur pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awal dari transaksi yang memunculkan aset dan liabilitas dengan jumlah yang sama.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak di mana Perusahaan memiliki kendali. Pengendalian timbul ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur, atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi imbal hasil.

Umumnya, ada dugaan bahwa mayoritas hak suara menghasilkan kontrol. Untuk mendukung anggapan ini bila Grup memiliki mayoritas atau kurang dari mayoritas hak suara atau hak serupa dari *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah Grup memiliki kuasa atas *investee*, termasuk:

- i. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii. Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- iii. Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

Grup menilai kembali apakah Grup mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian. Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas anak yang diperoleh atau dilepaskan selama periode berjalan dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian hingga tanggal sejak Grup kehilangan pengendalian.

Laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik Perusahaan dan pada kepentingan nonpengendali, meskipun hal ini akan mengakibatkan timbulnya saldo defisit pada kepentingan nonpengendali.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban, dan arus kas atas transaksi antar-Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian; dan
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi konsolidasian yang dapat diatribusikan pada pemilik Perusahaan.

c. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No.KEP-347/BL/2012. Pihak-pihak yang dipertimbangkan sebagai pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tersebut, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Grup. Status pihak berelasi diperluas sampai dengan manajemen kunci dari entitas anak sampai dengan tingkatan mereka mengarahkan operasi entitas anak dengan tingkat keterlibatan minimal dari manajemen Perusahaan.

d. Kombinasi bisnis dan *goodwill*

Kombinasi bisnis dicatat dengan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan diukur sebesar nilai wajarnya, yang merupakan agregat dari nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diambil alih, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai pertukaran atas pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, kepentingan nonpengendali diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dibuat berdasarkan basis tiap transaksi. Biaya terkait akuisisi dicatat sebagai beban pada saat timbulnya. Aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Goodwill awalnya diukur pada harga perolehan, yang merupakan selisih lebih dari nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai yang diakui oleh kepentingan nonpengendali dan nilai kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai wajar dari jumlah neto aset yang diakuisisi melebihi nilai agregat imbalan yang dialihkan, Grup menilai kembali apakah semua aset yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih sudah diidentifikasi dengan benar dan memeriksa prosedur yang digunakan untuk mengukur nilai yang harus diakui pada tanggal akuisisi. Jika hasil penilaian kembali tersebut masih menghasilkan selisih lebih atas nilai wajar dari aset neto diakuisisi atas nilai agregat imbalan yang dialihkan, maka keuntungan diakui pada laba atau rugi.

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar di mana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau ketika penyesuaian dicatat di luar periode pengukuran. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengukuran, yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi, tentang fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi bisnis terjadi, maka Grup akan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasian. Selama periode pengukuran, Grup menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, telah berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal tersebut. Periode pengukuran berakhir segera setelah Perusahaan menerima informasi yang dicari tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi atau mempelajari bahwa informasi tambahan tidak dapat diperoleh. Namun demikian, periode pengukuran tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar saat tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis dan goodwill (lanjutan)

Berdasarkan PSAK 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", pengalihan aset, liabilitas, saham, dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual yang berada dalam Grup yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham, atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling-of-interests*).

Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan selama restrukturisasi terjadi disajikan seolah-olah restrukturisasi tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal. Selisih imbalan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait dengan nilai tercatat dari kepentingan yang diperoleh, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai "Tambahkan Modal Disetor" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada saat penerapan awal PSAK 38 (Revisi 2012), seluruh saldo Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali direklasifikasikan ke akun "Tambahkan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas di laporan posisi keuangan terdiri dari kas di tangan, kas dan bank, dan deposito jangka pendek yang sangat likuid dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang, yang siap dikonversi menjadi uang tunai dalam jumlah yang diketahui dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri dari kas dan deposito jangka pendek, sesuai definisi di atas, setelah dikurangi dengan saldo cerukan bank karena dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas Grup.

Deposito yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun disajikan sebagai "Aset Keuangan Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 2u).

f. Investasi pada entitas asosiasi

Asosiasi adalah entitas di mana Grup (sebagai investor) memiliki pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan terkait kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak termasuk kendali atau kendali bersama atas kebijakan operasional tersebut. Pertimbangan dalam menentukan pengaruh signifikan sama dengan pertimbangan saat menentukan pengendalian atas entitas anak. Kepemilikan 20% atau lebih hak suara *investee* (dimiliki secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan) dianggap menimbulkan pengaruh signifikan, kecuali dapat dijelaskan secara jelas bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan. Sebaliknya, kepemilikan kurang dari 20% hak suara dianggap tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa sebenarnya terdapat pengaruh signifikan.

Adanya pengaruh signifikan biasanya akan dibuktikan dengan satu atau beberapa cara sebagai berikut:

- i. Keterwakilan dalam dewan direksi dan komisaris atau organ setara dari *investee*;
- ii. Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen dan distribusi lainnya;
- iii. Transaksi material di antara investor dan *investee*;
- iv. Pertukaran personil manajerial; atau
- v. Penyediaan informasi teknis penting.

Grup menghitung investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

Berdasarkan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Jumlah tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan dalam bagian investor atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal akuisisi. Pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi dicatat dengan cara sebagai berikut:

- i. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama termasuk dalam nilai tercatat investasi dan tidak diperkenankan diamortisasi ataupun pengujian penurunan nilai secara individu, dan
- ii. Setiap selisih lebih bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian investor atas laba rugi entitas asosiasi pada periode investasi diperoleh.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Grup atas hasil operasi entitas asosiasi. Setiap perubahan dalam penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi akan disajikan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Selanjutnya, jika ada perubahan yang langsung diakui dalam ekuitas entitas asosiasi, maka Grup mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba dan rugi belum direalisasi yang berasal dari transaksi antara Grup dan entitas asosiasi dieliminasi sejumlah porsi kepemilikan atas entitas asosiasi.

Grup pada setiap akhir periode pelaporan menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa investasi pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Apabila hal ini terjadi, Grup menghitung dan mengakui nilai penurunan sebagai selisih antara nilai investasi di entitas asosiasi yang dapat terpulihkan dan nilai tercatatnya.

Aset-aset ini termasuk dalam "Investasi Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Untuk tujuan pelaporan investasi dengan menggunakan metode ekuitas tersebut, aset dan liabilitas kedua perusahaan ini pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs rata-rata selama periode tersebut. Selisih kurs akibat penjabaran diakui dan dilaporkan sebagai "Selisih kurs" karena penjabaran laporan keuangan pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

g. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dikurangi penyisihan kerugian kredit ekspektasian yang dihitung berdasarkan estimasi kerugian kredit ekspektasian seumur hidup pada setiap tanggal pelaporan. Grup telah menetapkan metodologi perhitungan estimasi penyisihan tersebut berdasarkan pengalaman historis kredit tak tertagih yang kemudian disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi. Piutang dihapuskan pada tahun ditetapkan tidak tertagih (Catatan 2u).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Persediaan

Persediaan terdiri dari komponen mewakili terminal telepon, kabel, dan suku cadang lainnya. Persediaan juga termasuk kartu *Subscriber Identification Module* ("SIM"), pesawat telepon, modem *wireless broadband*, dan voucher Prabayar yang dibebankan pada saat dijual.

Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih ditentukan dengan mengestimasi harga jual, dikurangi estimasi biaya penjualan atau menentukan biaya penggantian yang berlaku.

Biaya persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehannya.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Jumlah penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban umum dan administrasi pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Provisi persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa depan.

i. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset tersedia untuk dijual

Aset (atau kelompok lepasan) diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut dan penjualannya sangat mungkin terjadi. Aset ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Aset yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual direklasifikasi dari aset tetap dan penyusutan atas aset tersebut dihentikan.

k. Aset takberwujud

Aset takberwujud terutama terdiri dari piranti lunak. Aset takberwujud diakui jika kemungkinan besar Grup akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Aset takberwujud dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, apabila ada. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi jumlah terpulihkan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud, kecuali *goodwill* diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Piranti lunak	3-6
Lisensi	3-20
Aset takberwujud lainnya	1-30

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

l. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: (a) harga perolehan, (b) setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Setiap bagian aset tetap yang memiliki harga perolehan cukup signifikan terhadap biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	15-50
Renovasi bangunan sewa	2-15
Peralatan sentral telepon	3-15
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	5-15
Peralatan dan instalasi transmisi	3-30
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	3-20
Jaringan kabel	5-25
Catu daya	3-20
Peralatan pengolahan data	3-20
Kendaraan	4-8
Peralatan telekomunikasi lainnya	5
Peralatan kantor	2-5
Peralatan lainnya	2-5

Biaya signifikan sehubungan dengan renovasi bangunan sewa dikapitalisasi dan disusutkan selama masa sewa.

Metode penyusutan, umur manfaat dan nilai residu dari suatu aset direviu paling tidak setiap akhir tahun buku dan disesuaikan jika diperlukan. Berdasarkan reviu umur manfaat aset tetap khususnya beberapa peralatan produksi mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Grup dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, ketika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar kecuali, (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau (ii) nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Suku cadang utama dan suku cadang siap pakai yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari 12 bulan dicatat sebagai bagian aset tetap.

Ketika aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian dan laba atau rugi yang timbul dari pelepasan atau penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Piranti keras komputer tertentu tidak dapat dioperasikan tanpa ketersediaan piranti lunak komputer tertentu. Dalam kondisi tersebut, piranti lunak komputer dicatat sebagai bagian dari piranti keras komputer. Jika piranti lunak komputer berdiri sendiri dari piranti keras komputernya, piranti lunak komputer tersebut dicatat sebagai bagian dari aset takberwujud.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan yang signifikan dikapitalisasi.

Aset dalam pembangunan diakui sebesar biaya perolehan, dikurang dengan penurunan nilai jika ada, hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait. Selama masa pembangunan hingga aset tetap siap untuk digunakan/dijual, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan selisih kurs yang timbul atas pinjaman yang diperoleh untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut sepanjang aset tetap tersebut memenuhi definisi aset kualifikasian. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan aset tetap siap untuk digunakan atau dijual.

m. Sewa

PSAK 73 menetapkan model komprehensif untuk mengidentifikasi perjanjian sewa dan perlakuannya dalam laporan keuangan Penyewa dan Pesewa. PSAK 73 memperkenalkan model pengendalian untuk identifikasi sewa, membedakan antara sewa dan kontrak layanan berdasarkan apakah ada aset identifikasi yang dikendalikan oleh pelanggan.

Grup menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa, yaitu jika kontrak memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pertimbangan. Jangka waktu sewa tidak dapat dibatalkan untuk masing-masing kontrak, kecuali dalam kasus di mana Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi perpanjangan kontrak.

Grup memilih tindakan praktis yang tersedia berdasarkan pedoman dalam PSAK 73, yang antara lain:

- penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang serupa;
- akuntansi untuk sewa operasi dengan sisa masa sewa kurang dari 12 bulan;
- pengecualian biaya langsung awal untuk pengukuran aset hak guna sebagai sewa jangka pendek;
- penggunaan tinjauan ke belakang dalam menentukan masa sewa di mana kontrak berisi opsi untuk perpanjangan atau pemutusan masa sewa;
- tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa, dan sebagai konsekuensinya Grup menganggap seluruh kontrak sebagai sewa; dan
- untuk tidak mengakui liabilitas sewa dan aset hak guna untuk sewa di mana aset dasar adalah aset bernilai rendah (yaitu aset dasar dengan nilai maksimum US\$5.000 atau Rp50 juta dalam kondisi baru).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Grup menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang ditetapkan dalam PSAK 73 untuk semua kontrak sewa.

i. Grup sebagai *lessee*

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset yang mendasarinya.

Grup mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya aset hak guna termasuk jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dikeluarkan, biaya restorasi dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima.

Aset hak guna diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	15-40
Instalasi dan peralatan transmisi	3-25
Catu daya	3-20
Kendaraan	4-8
Lain-lain	2-25

Jika kepemilikan aset sewaan dialihkan ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan taksiran masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna mengalami penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 Penurunan Nilai Aset.

Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jumlah yang diharapkan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan opsi pembelian yang cukup pasti akan dilakukan oleh Grup dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup yang melaksanakan opsi untuk mengakhiri. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau kurs diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

Dalam menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental karena tingkat suku bunga implisit sewa tidak dapat ditentukan dengan mudah. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan penambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset yang mendasarinya.

Sewa jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 12 bulan dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengakuan yang ditetapkan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi. Grup akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

ii. Grup sebagai *lessor*

Berdasarkan PSAK 73, *lessor* terus mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan memperhitungkan kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Sewa di mana Grup mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika tidak maka akan diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Klasifikasi sewa dibuat pada tanggal insepisi dan dinilai kembali hanya jika ada modifikasi sewa.

Pada tanggal dimulainya, Grup mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dengan jumlah yang sama dengan investasi bersih dalam sewa dan menyajikannya sebagai piutang sewa pembiayaan. Investasi bersih dalam sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap dalam substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jaminan nilai residu yang diberikan kepada *lessor* oleh *lessee*. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan opsi pembelian yang cukup pasti akan dilakukan oleh *lessee* dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup yang menggunakan opsi untuk mengakhiri.

Sebagaimana disyaratkan oleh PSAK 71, penyisihan kerugian kredit ekspektasian telah diakui sebagai "Piutang Lain-lain".

Pendapatan sewa yang timbul dari sewa operasi dicatat secara garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan dalam laporan laba rugi karena sifat operasinya. Biaya langsung awal yang dikeluarkan untuk menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset tetap dan diakui selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya.

Jika suatu perjanjian mengandung komponen sewa dan non-sewa, Grup menerapkan pendapatan PSAK 72 dari kontrak dengan pelanggan untuk mengalokasikan pertimbangan dalam kontrak. Pendapatan yang timbul dari sewa operasi dicatat sebagai Pendapatan dari Transaksi *Lessor* (Catatan 2r).

n. Beban tanggungan - hak atas tanah

Hak atas tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi. Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode legal hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

o. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang dan/atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

p. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Pinjaman (lanjutan)

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

q. Penjabaran valuta asing

Mata uang fungsional dan mata uang pembukuan Grup adalah Rupiah, kecuali Telekomunikasi Indonesia International Ltd., Hong Kong, Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Singapura, Telekomunikasi Indonesia International Inc., USA, dan Telekomunikasi Indonesia International S.A., Timor Leste yang menggunakan mata uang Dolar A.S., Telekomunikasi Indonesia International Pty. Ltd., Australia yang menggunakan mata uang Dolar Australia, TS Global Network Sdn. Bhd., dan Telekomunikasi Indonesia International Sdn. Bhd. yang menggunakan Ringgit Malaysia.

Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh *Reuters* pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	31 Maret 2022		31 Desember 2021	
	Beli	Jual	Beli	Jual
Dolar A.S. ("US\$") 1	14.370	14.372	14.250	14.255
Dolar Australia ("AU\$") 1	10.739	10.742	10.353	10.359
Dolar Singapura ("SGD") 1	10.608	10.617	10.555	10.561
Dolar Taiwan Baru ("TWD") 1	501,19	501,78	515,04	515,4
Euro ("EUR") 1	15.986	15.994	16.125	16.137
Yen Jepang ("JPY") 1	117,64	117,66	123,81	123,86
Ringgit Malaysia ("MYR") 1	3.414	3.418	3.420	3.424
Pataca Makau ("MOP") 1	1.780	1.782	1.772	1.777
Dolar Hong Kong ("HKD") 1	1.835	1.835	1.828	1.828

Laba atau rugi selisih kurs yang timbul, baik yang telah maupun yang belum direalisasi, dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman selama pembangunan suatu aset tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi, di mana pinjaman dapat diatribusikan terhadap pembangunan aset tersebut (Catatan 2l).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

PSAK 72 menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Standar ini menyediakan model lima langkah tunggal untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan. Standar ini juga memberikan panduan spesifik yang mensyaratkan jenis biaya tertentu untuk memperoleh dan/atau memenuhi kontrak yang akan dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang terkait dengan biaya yang dikapitalisasi.

Di bawah ini adalah ringkasan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan Grup untuk setiap jenis pendapatan:

i. *Mobile*

Pendapatan dari *mobile* terutama terdiri dari pendapatan dari layanan seluler yang antara lain: layanan telepon, layanan interkoneksi, layanan internet dan data, dan layanan *Short Messaging Service* ("SMS"). Layanan tersebut ditawarkan secara pascabayar atau prabayar. Untuk layanan prabayar, penjualan paket perdana (juga dikenal sebagai kartu SIM dan voucher perdana) dan voucher isi ulang pada awalnya diakui sebagai liabilitas kontrak.

Seluruh pendapatan layanan *mobile* diakui berdasarkan metode *output*, baik per penggunaan aktual atau estimasi unit yang digunakan (jika layanan dijual berdasarkan paket), karena pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh Grup.

Untuk layanan yang dijual dalam paket bundel, total penerimaan dari pelanggan dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual yang berdiri sendiri untuk setiap produk dan/atau layanan. Grup mengestimasi harga jual yang berdiri sendiri menggunakan harga yang berlaku jika layanan tersebut dijual dengan basis yang berdiri sendiri. Sebagian besar paket bundel yang dijual oleh Grup hanya mencakup layanan yang pada umumnya terselesaikan selama periode waktu yang sama. Karena itu, pola pengakuan pendapatan umumnya tidak dipengaruhi oleh alokasi.

Pembayaran yang diterima dialokasikan antara layanan telekomunikasi dan poin yang dikeluarkan, di mana pembayaran dialokasikan ke poin yang setara dengan nilai wajarnya. Nilai wajar poin ditentukan berdasarkan informasi historis terkait dengan tingkat penebusan poin penghargaan. Nilai wajar poin yang dikeluarkan ditanggung dan diakui sebagai pendapatan pada saat poin tersebut ditebus atau telah kedaluwarsa.

ii. *Consumer*

Pendapatan dari *consumer* terutama terdiri dari pendapatan telepon tidak bergerak dan layanan Indihome. Pendapatan dari layanan telepon tidak bergerak berasal dari pelanggan yang hanya berlangganan layanan telepon tidak bergerak. Sedangkan pendapatan dari layanan Indihome berasal dari pelanggan yang berlangganan layanan internet atau paket layanan bundel kombinasi layanan *consumer* (misal telepon, internet dan data, serta TV berbayar). Layanan tersebut ditawarkan berdasarkan pascabayar yang ditagih pada bulan berikutnya. Pada tahun 2021, Grup telah menerapkan syarat dan ketentuan baru bahwa kontrak dengan pelanggan adalah kontrak terbuka dengan minimal 12 bulan dan penalti terminasi dini yang substantif. Periode kontrak berdasarkan PSAK 72 selama 12 bulan dan selanjutnya dapat diperbaharui bulanan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

ii. *Consumer* (lanjutan)

Seluruh layanan *consumer* diakui menggunakan metode *output* berdasarkan penggunaan aktual pelanggan atau waktu yang telah berlalu ketika pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang diberikan oleh Grup.

Pelanggan mungkin diharuskan membayar biaya di muka pada saat dimulainya kontrak. Biaya di muka dianggap sebagai hak material karena pelanggan tidak diharuskan membayar biaya di muka ketika pelanggan memperbarui layanan di luar periode kontrak asli. Grup menilai opsi pembaruan sebesar pembayaran yang diterima dari biaya di muka untuk layanan instalasi. Grup menangguk nilai tersebut sebagai liabilitas kontrak dan mengakuinya sebagai pendapatan berdasarkan metode garis lurus sepanjang taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan. Grup memperkirakan jangka waktu hubungan dengan pelanggan berdasarkan informasi historis dan tren pelanggan serta memperbarui evaluasi tersebut setiap tahun.

iii. *Enterprise*

Pendapatan dari *enterprise* terutama terdiri atas pendapatan dari penyediaan jasa telepon, data dan internet, teknologi informasi, dan jasa lainnya (misal penjualan periferal, *manage service*, *call center*, *e-health*, *e-payment*, dan lain-lain). Beberapa kontrak dengan pelanggan perusahaan dengan spesifikasi sesuai pesanan pelanggan.

Pendapatan dari *enterprise* diakui sepanjang waktu menggunakan metode *output* berdasarkan penggunaan aktual atau waktu yang telah berlalu jika penyediaan layanan tidak tergantung pada penggunaan (yaitu menit suara, *kilobyte data*, dan lain-lain), kecuali untuk penjualan barang yang diakui pada waktu tertentu, karena pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang diberikan oleh Grup. Pendapatan untuk kewajiban kinerja yang dipenuhi pada waktu tertentu diakui ketika pengendalian barang dipindahkan ke pelanggan, biasanya ketika pelanggan memiliki fisik barang.

Beberapa perjanjian *enterprise* ditawarkan sebagai produk bundel. Untuk pengaturan yang dibundel, produk dan/atau jasa dalam kontrak dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan tersendiri ketika secara terpisah dapat diidentifikasi dari janji-janji lain dalam kontrak dan pelanggan dapat mengambil manfaat dari produk/jasa itu sendiri. Total pembayaran dialokasikan untuk masing-masing kewajiban pelaksanaan yang berbeda yang telah dimasukkan dalam kontrak, berdasarkan harga jualnya yang berdiri sendiri. Harga jual yang berdiri sendiri ditentukan berdasarkan harga yang dapat diobservasi di mana produk dan/atau jasa individual dijual secara terpisah, disesuaikan dengan kondisi pasar dan diskon normal yang sesuai. Ketika harga yang dapat diobservasi tidak tersedia, biaya yang diharapkan ditambah pendekatan margin digunakan untuk menentukan harga jual yang berdiri sendiri.

Kontrak tertentu dengan pelanggan *enterprise* dapat menimbulkan imbalan variabel karena harga kontrak tergantung pada peristiwa di masa mendatang (misal kontrak berbasis penggunaan atau kontrak berbasis bagi hasil). Dalam memperkirakan imbalan variabel ini, Grup diharuskan untuk menggunakan metode nilai yang diharapkan atau metode jumlah yang paling mungkin berdasarkan metode yang lebih baik memprediksi jumlah pembayaran yang menjadi haknya. Grup menentukan bahwa metode nilai yang paling diharapkan adalah metode yang tepat untuk digunakan dalam memperkirakan imbalan variabel untuk satu kontrak dengan sejumlah besar kemungkinan hasil.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

iii. *Enterprise* (lanjutan)

Sebelum memasukkan jumlah imbalan variabel dalam harga transaksi, Grup mempertimbangkan apakah jumlah imbalan variabel dibatasi. Grup menentukan bahwa taksiran imbalan variabel tidak dibatasi berdasarkan pengalaman historisnya, estimasi bisnis, dan kondisi ekonomi saat ini dan hanya mencakup imbalan variabel sepanjang kemungkinan besar pembalikan signifikan dalam jumlah pendapatan kumulatif yang diakui tidak akan terjadi ketika ketidakpastian terkait dengan imbalan variabel selanjutnya diselesaikan.

Ketika pihak lain terlibat dalam menyediakan produk dan/atau jasa kepada pelanggan, Grup bertindak sebagai prinsipal jika Grup mengendalikan produk dan/atau jasa yang ditentukan sebelum produk dan/atau jasa tersebut ditransfer ke pelanggan. Pendapatan dicatat pada jumlah bersih yang diterima (jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pemasok), ketika, pada dasarnya, Grup telah bertindak sebagai agen dan mendapat komisi dari pemasok produk dan/atau jasa yang dijual.

iv. *Wholesale and International Business* (“WIB”)

Pendapatan dari WIB terutama terdiri dari jasa interkoneksi untuk interkoneksi panggilan pelanggan operator telekomunikasi lainnya ke pelanggan Grup (panggilan masuk) dan panggilan antara pelanggan operator telekomunikasi lainnya melalui jaringan Grup (transit) dan jasa jaringan dengan operator telekomunikasi lainnya. Semua jasa ini diakui berdasarkan metode *output* menggunakan basis *traffic* aktual yang tercatat untuk bulan tersebut.

Aset Kontrak

Aset kontrak awalnya diakui dari pendapatan atas pengalihan barang atau jasa karena penerimaan imbalan masih bersyarat tahapan tertentu atau setelah penyelesaian proyek. Setelah penyelesaian syarat tahapan tertentu atau proyek, jumlah yang diakui sebagai aset kontrak direklasifikasi ke piutang usaha.

Aset kontrak dilakukan penilaian penurunan nilai.

Liabilitas Kontrak

Liabilitas kontrak diakui jika pembayaran diterima atau pembayaran telah jatuh tempo (mana yang lebih awal) dari pelanggan sebelum Grup mengalihkan barang atau jasa. Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan ketika Grup melaksanakan kewajiban dalam kontrak (misal mengalihkan kendali atas barang atau jasa kepada pelanggan).

Biaya inkremental untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan

Biaya inkremental untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan, yang pada dasarnya terdiri dari komisi penjualan dan biaya pemenuhan kontrak, pada awalnya diakui pada laporan posisi keuangan. Biaya-biaya ini kemudian diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan periode dan pola pengiriman produk atau jasa terkait ke pelanggan. Biaya yang tidak memenuhi syarat sebagai biaya untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan dibebankan pada saat terjadinya atau sesuai dengan standar terkait lainnya.

Pendapatan dari transaksi *lessor*

Pendapatan dari transaksi *lessor* terdiri dari pendapatan dari sewa operasi atas menara telekomunikasi dan sewa lainnya. Pendapatan sewa diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa dan termasuk dalam pendapatan dalam laporan laba rugi karena sifat operasinya.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

s. Imbalan kerja

i. Imbalan kerja jangka pendek

Seluruh imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari gaji dan imbalan terkait, tunjangan cuti, insentif, dan imbalan kerja jangka pendek lain diakui sebagai biaya yang tidak didiskonto saat karyawan telah memberikan jasa kepada Grup.

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain

Imbalan pasca kerja terdiri dari program pensiun imbalan pasti yang *funded* dan *unfunded*, program pensiun iuran pasti, imbalan pasca kerja lainnya, program imbalan kesehatan pasca kerja imbalan pasti, program imbalan kesehatan pasca kerja iuran pasti, dan kewajiban berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.

Imbalan kerja jangka panjang lain terdiri dari penghargaan masa kerja, cuti masa kerja, dan masa persiapan pensiun.

Perhitungan biaya terkait dengan program imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Kewajiban bersih Perusahaan berkaitan dengan imbalan pasti pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, yang didenominasi dalam mata uang di mana manfaat akan dibayarkan dan yang mempunyai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja terkait. Obligasi pemerintah digunakan karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi.

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun imbalan pasti dan imbalan kesehatan pasca kerja serta polis asuransi yang memenuhi syarat. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Nilai wajar polis asuransi adalah jumlah yang sama dengan kewajiban yang terkait (dan dapat dikurangi jika jumlah yang dapat diterima dari polis asuransi tidak dapat diperoleh secara penuh).

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak batas atas aset (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) dan imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) diakui pada ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain di periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak diklasifikasikan ke laba rugi di periode selanjutnya.

Biaya jasa lalu diakui di laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- (a) ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi; dan
- (b) ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto.

Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program imbalan pasti, di mana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain (lanjutan)

Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program manfaat pasti (selain pembayaran imbalan sesuai dengan ketentuan program dan termasuk dalam asumsi aktuarial).

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran secara rutin yang merupakan biaya berkala bersih untuk periode iuran tersebut dan dicatat sebagai bagian dari beban karyawan ketika terutang.

iii. Kompensasi berbasis saham

Perusahaan menjalankan program kompensasi berbasis saham dengan penyelesaian menggunakan ekuitas. Nilai wajar dari jasa karyawan yang dikompensasikan dengan saham Perusahaan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan mengkredit akun tambahan modal disetor pada tanggal pemberian kompensasi.

iv. Pensiun dini ("Pendi")

Beban Pendi diakui pada saat Grup berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan Grup agar karyawan mengundurkan diri secara sukarela. Grup dianggap berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi jika, dan hanya jika, Grup telah memiliki rencana formal terinci yang tidak dapat dibatalkan.

t. Pajak

Pajak Penghasilan ("PPh")

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali pajak penghasilan tersebut sehubungan dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas di mana pajak penghasilannya diakui secara langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diperkirakan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan atau secara substantif ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi perlakuan pajak yang diterapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT Tahunan") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada Otoritas Pajak.

Pemeriksaan pajak

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya Surat Ketetapan Pajak ("SKP") atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

Pajak tangguhan

Grup mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup juga mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak pada masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa depan cukup besar (*probable*). Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak dan undang-undang pajak pada setiap tanggal pelaporan yang diharapkan berlaku terhadap penghasilan kena pajak ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pajak (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan direviu pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangi apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya. Pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan.

Pajak tangguhan suatu transaksi diakui di luar laba rugi, oleh karena itu pajak tangguhan atas transaksi tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau diakui langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset dan liabilitas pajak kini dan aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh Otoritas Pajak yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk dipulihkan atau diselesaikan.

Pajak pertambahan nilai ("PPN")

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- i. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- ii. Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan

Sesuai dengan ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas pajak yang mengandung ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan ditentukan dengan mempertimbangkan apakah diperlakukan secara terpisah atau bersamaan, penggunaan asumsi tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak tidak pasti oleh otoritas perpajakan, pertimbangan apakah besar kemungkinan Otoritas Pajak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti dan penilaian kembali pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan jika terjadi perubahan fakta dan keadaan.

Jika penerimaan perlakuan pajak dimungkinkan oleh Otoritas Pajak, pengukuran tersebut sejalan dengan pengisian pajak penghasilan. Jika penerimaan perlakuan pajak oleh Otoritas Pajak tidak memungkinkan, Grup menggunakan jumlah pajak dengan menggunakan metode yang memberikan prediksi resolusi yang lebih baik (yaitu jumlah yang paling mungkin atau nilai yang diharapkan).

Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa interpretasi tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Pajak final

Peraturan perpajakan Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final atas jasa konstruksi dan sewa disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan (Beban) Lain-Lain - bersih".

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

i. Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), dan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Grup menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Grup menerapkan panduan praktis, diukur pada harga transaksi yang telah ditentukan berdasarkan PSAK 72.

Agar aset keuangan dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai *Solely Payment of Principal and Interest (SPPI) testing* dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Grup mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari perolehan arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Untuk tujuan pengukuran setelah pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan ke dalam empat kategori:

(a) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai. Aset keuangan Grup pada kategori ini meliputi kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, piutang lain-lain, aset kontrak, dan aset tidak lancar lainnya.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

- (b) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang)

Grup mengukur instrumen utang pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama dengan aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar lainnya diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya direklasifikasi ke laba rugi.

Grup tidak memiliki instrumen utang yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif per 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021.

- (c) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tanpa fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif saat penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan dalam penghasilan komprehensif lain perubahan nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 71 dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan. Pilihan ini dilakukan pada level instrumen per instrumen. Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak direklasifikasikan ke laba rugi. Dividen diakui pada laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan, kecuali dividen secara jelas mewakili bagian terpulihkan dari biaya investasi. Instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak terpengaruh pada persyaratan penurunan nilai. Aset keuangan Grup pada kategori ini meliputi investasi jangka panjang pada instrumen keuangan.

- (d) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan yang dikelola untuk diperdagangkan, aset keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang disyaratkan untuk diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Aset keuangan yang tidak memenuhi *SPPI testing* diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, terlepas apapun model bisnisnya. Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal jika penerapan itu dapat menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, inkonsistensi pengukuran atau pengakuan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

(d) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Aset keuangan kategori ini pada laporan posisi keuangan diukur pada nilai wajarnya di mana keuntungan dan kerugian yang timbul sebagai hasil dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi. Aset keuangan Grup diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari investasi jangka panjang pada instrumen keuangan dan aset keuangan lancar lainnya.

Kerugian kredit ekspektasian

Grup mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kerugian kredit ekspektasian didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan menggunakan perkiraan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

Kerugian kredit ekspektasian diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah kerugian kredit ekspektasian dalam 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan untuk kerugian kredit ekspektasian selama sisa umurnya, terlepas dari waktu gagal bayar (sepanjang umurnya).

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. Grup telah membentuk model provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) yaitu kondisi pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Grup mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi gagal bayar ketika telah menunggak lebih dari 90 hari. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Grup juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Penghapusan piutang usaha dilakukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman, dan hutang atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar, dan untuk pinjaman sebesar pinjaman yang diterima setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (a) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau (b) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, deposit pada pelanggan, pinjaman, liabilitas sewa dan liabilitas lainnya. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar, utang bank jangka panjang.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

(a) Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini mencakup juga derivatif yang tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi.

Penentuan liabilitas keuangan untuk dapat ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditentukan pada saat pengakuan awal, dan hanya jika kriteria-kriteria yang terdapat dalam PSAK 71 terpenuhi. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

(b) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Grup. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode suku bunga efektif. Amortisasi metode suku bunga efektif diakui sebagai biaya pendanaan pada laporan laba rugi. Kategori ini secara umum berlaku untuk pinjaman. Informasi lebih lanjut dapat mengacu ke Catatan 20 Pinjaman Jangka Panjang dan Pinjaman Lainnya.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan sebagai berikut:

- (i) situasi bisnis yang normal;
- (ii) peristiwa *default*; dan
- (iii) peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari Grup dan seluruh pihak lawan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

iv. Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau berakhir.

v. Akuntansi lindung nilai

Grup tidak menerapkan akuntansi lindung nilai.

v. Modal saham yang diperoleh kembali

Saham diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan nilai perolehannya sebagai "Modal Saham yang Diperoleh Kembali" dan disajikan sebagai pengurang modal saham. Harga pokok dari penjualan/pengalihan saham yang diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Modal saham diperoleh kembali yang dialihkan dalam bentuk kepemilikan saham karyawan dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara harga perolehan kembali dan harga jual kembali/nilai pengalihan saham dicatat sebagai "Tambah Modal Disetor".

w. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Untuk dividen interim, Perusahaan mengakui sebagai liabilitas berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

x. Laba per saham dan laba per ADS

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode tersebut. Laba per ADS dihitung dengan mengalikan laba per saham dasar dengan 100, yaitu jumlah lembar saham per ADS.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif.

y. Informasi segmen

Informasi segmen Grup disajikan menurut segmen operasi yang telah diidentifikasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- i. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- ii. hasil operasinya direviu secara reguler oleh Pengambil Keputusan Operasional (PKO) Grup, misalnya Dewan Direksi untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- iii. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

z. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

z. Provisi (lanjutan)

Provisi untuk kontrak yang memberatkan diakui ketika kontrak tersebut menjadi memberatkan sebesar mana yang lebih rendah antara biaya neto memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika tidak memenuhi kontrak.

aa. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka Grup menentukan jumlah terpulihkan dari Unit Penghasil Kas ("UPK") yang mana aset tercakup ("aset UPK").

Jumlah terpulihkan dari suatu aset (baik aset individual maupun UPK) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan dibebankan pada operasi berjalan dan disajikan sebagai bagian dari "Penyusutan dan Amortisasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka jumlah terpulihkan aset tersebut diestimasi. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah ditentukan, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi konsolidasian.

Penurunan nilai *goodwill* diuji setiap tahun dan ketika terdapat keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai. Penurunan nilai untuk *goodwill* ditentukan dengan menilai jumlah terpulihkan dari UPK (atau kelompok UPK) yang mana *goodwill* tercakup. Jika nilai terpulihkan dari UPK lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan pada periode mendatang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ab. Klasifikasi lancar dan tidak lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan sebagai lancar bila:

- i. akan direalisasi, dijual, atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan, atau
- iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv. kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset yang tidak memenuhi kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan sebagai lancar bila:

- i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv. tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut.

Liabilitas yang tidak memenuhi kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

ac. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat keputusan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan yang menyertainya, dan pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian tentang asumsi dan perkiraan ini dapat menghasilkan hasil yang memerlukan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode mendatang.

i. Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Pajak penghasilan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat. Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Grup mengakui liabilitas untuk area pemeriksaan pajak yang diantisipasi berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan terutang. Jika hasil akhir pajak berbeda dengan jumlah yang sudah dicatat, selisihnya akan mempengaruhi aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode ditentukannya hasil pajak tersebut. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 28.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)

ii. Estimasi dan asumsi

Estimasi dan asumsi terus dievaluasi dan didasarkan kepada pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, jarang yang sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi pada saat tanggal pelaporan yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama satu tahun laporan keuangan ke depan dipaparkan di bawah ini.

(a) Imbalan pasca kerja

Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan tingkat pengembalian investasi. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto tersebut adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Jika terdapat peningkatan peringkat seperti pada obligasi pemerintah atau penurunan tingkat bunga sebagai hasil dari peningkatan kondisi ekonomi, maka akan terdapat dampak material terhadap tingkat diskonto yang digunakan dalam menentukan kewajiban pasca kerja.

Asumsi kunci kewajiban imbalan pasca kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 31 dan 32.

(b) Umur manfaat aset tetap

Grup mengestimasi umur manfaat aset tetap berdasarkan ekspektasi penggunaan aset oleh Grup dengan mempertimbangkan rencana strategi usaha, perkembangan teknologi di masa depan, dan perilaku pasar. Estimasi umur manfaat aset tetap adalah berdasarkan pada penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal, dan pengalaman untuk aset yang sejenis.

Grup melakukan revaluasi atas estimasi umur manfaat sekurang-kurangnya setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dengan estimasi sebelumnya, yang dikarenakan adanya perubahan ekspektasi daya pakai aset akibat pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan aset. Jumlah beban tercatat setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Perubahan estimasi umur manfaat aset tetap merupakan perubahan estimasi akuntansi dan diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan dan periode mendatang. Pada tahun 2020, Grup mengubah estimasi umur manfaat menara di Indonesia (Catatan 12). Pada tahun 2021, Perusahaan melakukan percepatan penyusutan aset *Multi-Service Access Node* ("MSAN") sampai tahun 2022 (Catatan 12).

Rincian atas sifat dan jumlah tercatat atas aset tetap diungkapkan pada Catatan 12.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

- (c) Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian - Grup sebagai *lessee*

Grup menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika cukup pasti akan dilaksanakan, atau periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan masa sewa, jika cukup pasti untuk tidak dilakukan.

Grup memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian. Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau menghentikan sewa, mempertimbangkan semua faktor relevan yang menciptakan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian. Setelah tanggal dimulainya sewa, Grup menilai kembali masa sewa jika ada peristiwa atau perubahan signifikan dalam kendali yang mempengaruhi kemampuan untuk melakukan atau tidak opsi perpanjangan atau penghentian.

- (d) Penyisihan kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang kepemilikan aset pada tanggal pelaporan. Grup telah membentuk metodologi terkait penyisihan kerugian kredit ekspektasian yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Untuk deposito berjangka dan instrumen utang, risiko kredit nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, Grup menerapkan metode yang disederhanakan. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Grup menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang. Selain itu, Grup mempertimbangkan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika pembayaran kontrak lebih dari 30 hari tunggakan.

Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang lain-lain dan aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas nilai piutang dihitung berdasarkan kondisi terkini dan tingkat ketertagihan historis piutang usaha. Penyisihan ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan taksiran. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat terkait penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan pada Catatan 5.

Terkait efek pandemi Covid-19, Grup tidak merubah definisi dari kenaikan risiko kredit yang signifikan maupun definisi gagal bayar. Grup juga mengamati perubahan dari keserupaan karakteristik risiko dari piutang usaha tertentu dengan mengevaluasi segmentasi portofolio pelanggan, di mana pelanggan tersebut mungkin terlibat dalam industri bisnis, atau berlokasi di area, yang telah terpengaruh, atau lebih rentan terhadap pandemi. Grup telah mengkaji ulang model yang digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian berdasarkan informasi terkini yang wajar dan didukung untuk lebih mencerminkan perubahan kondisi saat ini. Metode dan pendekatan akan terus dimonitor dan diperbaharui jika terdapat tambahan informasi yang wajar, didukung, dan tersedia; termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*) dan masukan lainnya.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

(e) Pendapatan

- (i) Pertimbangan penting dalam menentukan kewajiban pelaksanaan, waktu pengakuan pendapatan dan klasifikasi pendapatan

Grup menyediakan jasa teknologi informatika dengan spesifikasi sesuai pesanan pelanggan. Produk sesuai pesanan pelanggan terdiri dari berbagai barang dan/atau jasa yang dijual dalam satu rangkaian tidak terpisah untuk memberikan layanan solusi terintegrasi kepada pelanggan. Selain produk sesuai pesanan pelanggan, Grup juga menyediakan beberapa produk standar sebagai bagian dari solusi terintegrasi dalam kontrak dengan pelanggan. Diperlukan pertimbangan yang signifikan dalam menentukan jumlah dan sifat kewajiban pelaksanaan yang dijanjikan kepada pelanggan dalam kontrak tersebut. Jumlah dan sifat kewajiban pelaksanaan akan menentukan waktu pengakuan pendapatan untuk kontrak tersebut.

Grup menelaah penentuan kewajiban pelaksanaan berdasarkan kontrak per kontrak. Ketika suatu kontrak yang terdiri dari beberapa barang dan/atau jasa dinilai memiliki satu kewajiban pelaksanaan, Grup menerapkan metode tunggal untuk mengukur tingkat penyelesaian kewajiban pelaksanaan berdasarkan metode pengukuran yang paling menggambarkan ekonomi kontrak, yang dalam banyak kasus adalah berdasarkan waktu.

Grup juga menyajikan klasifikasi pendapatan dengan menggunakan pendekatan yang konsisten. Ketika suatu kontrak yang terdiri dari beberapa barang dan/atau jasa dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan tersendiri, Grup menyajikan kewajiban pelaksanaan dalam komponen laporan keuangan yang paling mewakili layanan utama Grup, yaitu internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika.

- (ii) Pertimbangan penting dalam menentukan harga jual yang berdiri sendiri

Grup menyediakan beragam produk yang berkaitan dengan telekomunikasi dan teknologi. Untuk menentukan harga jual yang berdiri sendiri untuk barang dan/atau jasa yang tidak dapat diamati, Grup menggunakan pendekatan margin biaya ditambah biaya yang diharapkan. Grup menentukan margin yang sesuai berdasarkan data historis.

- (f) Uji penurunan nilai aset tidak lancar dan *goodwill*

Penerapan metode akuisisi dalam suatu kombinasi bisnis mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli kepada nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Grup menimbulkan *goodwill*, yang tidak diamortisasi namun diuji bagi penurunan nilai setiap tahunnya dan setiap terdapat indikasi penurunan nilai.

Walaupun manajemen berkeyakinan bahwa asumsi yang digunakan adalah tepat dan memiliki dasar yang kuat, perubahan signifikan pada asumsi tersebut dapat mempengaruhi secara material evaluasi atas nilai terpulihkan dan dapat menimbulkan penurunan nilai sesuai PSAK 48: Penurunan Nilai Aset.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

(g) Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

Ketika nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak dapat diukur pada harga kuotasian di pasar aktif, nilai wajar diukur menggunakan teknik penilaian termasuk model arus kas diskonto. Input atas model ini diambil dari pasar yang dapat diobservasi apabila memungkinkan, namun apabila tidak tersedia, sejumlah pertimbangan diperlukan dalam menetapkan nilai wajar. Pertimbangan mencakup input seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan asumsi yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar instrumen keuangan yang dilaporkan.

(h) Akuisisi

Grup mengevaluasi setiap transaksi akuisisi untuk menentukan akan diperlakukan sebagai akuisisi aset atau kombinasi bisnis. Untuk transaksi yang diperlakukan sebagai akuisisi aset, harga pembelian dialokasikan untuk aset yang diperoleh, tanpa pengakuan *goodwill*. Untuk akuisisi yang memenuhi definisi kombinasi bisnis, Grup menerapkan metode akuisisi akuntansi atas aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dicatat pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan hasil operasi disertakan dengan hasil Grup dari tanggal akuisisi masing-masing.

Setiap kelebihan dari harga pembelian dibayar atas jumlah yang diakui untuk aset yang diperoleh dan liabilitas diambil alih dicatat sebagai *goodwill*. Grup terus mengevaluasi akuisisi yang diperhitungkan sebagai kombinasi bisnis untuk jangka waktu tidak melebihi satu tahun setelah tanggal akuisisi yang berlaku dari setiap transaksi untuk menentukan apakah penyesuaian tambahan diperlukan untuk alokasi harga pembelian yang dibayarkan untuk aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih biasanya ditentukan dengan menggunakan salah satu perkiraan biaya penggantian atau metode penilaian arus kas diskonto. Ketika menentukan nilai wajar dari aset berwujud yang diperoleh, Grup memperkirakan biaya untuk mengganti aset dengan aset baru dengan mempertimbangkan faktor seperti umur, kondisi, dan masa manfaat ekonomi dari aset. Ketika menentukan nilai wajar dari aset tidak berwujud yang diperoleh, Grup memperkirakan tingkat diskonto yang berlaku dan waktu dan jumlah arus kas masa depan, termasuk tingkat dan persyaratan atas perpanjangan dan pengurangan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS

	31 Maret 2022		31 Desember 2021		
	Saldo		Saldo		
	Mata uang	Mata uang asing (dalam jutaan)	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	
Kas	Rp	-	31	-	12
Bank					
Pihak berelasi					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri")	Rp	-	7.695	-	8.660
	US\$	44	639	32	459
	EUR	2	30	2	30
	JPY	1	0	1	0
	HKD	3	0	3	5
	AU\$	0	0	0	0
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI")	Rp	-	8.591	-	6.035
	US\$	1	8	0	6
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI")	Rp	-	3.047	-	2.859
	US\$	2	24	2	34
	SGD	0	-	0	0
	EUR	0	-	0	0
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("BTN")	Rp	-	2.730	-	1.368
	US\$	0	0	0	0
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	Rp	-	17	-	37
	US\$	0	0	0	0
Sub-jumlah			22.781		19.493
Pihak ketiga					
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("HSBC Hongkong")	US\$	93	1.331	44	628
	HKD	23	42	23	42
PT Bank Permata Tbk. ("Bank Permata")	Rp	-	1.240	-	2.326
PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("Bank CIMB Niaga")	Rp	-	218	-	570
	US\$	3	50	5	74
Standard Chartered Bank ("SCB")	US\$	23	327	21	300
	SGD	-	-	8	83
PT Bank UOB Indonesia Tbk. ("UOB")	Rp	-	90	-	84
	US\$	1	11	3	37
	SGD	2	26	2	19
	MYR	4	14	4	13
PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA")	Rp	-	89	-	100
	US\$	0	3	0	3
Bank Pembangunan Daerah Tbk. ("BPD")	Rp	-	91	-	99
J.P. Morgan Indonesia ("Chase Bank")	US\$	6	90	7	96
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ ("MUFG Bank")	Rp	-	-	-	89
	US\$	0	0	0	0
PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")	Rp	-	214	-	20
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	Rp	-	145	-	149
	US\$	2	36	3	50
	TWD	47	24	46	24
	MYR	1	5	2	6
	AU\$	1	5	0	5
	SGD	4	44	-	-
	EUR	0	0	0	0
Sub-jumlah			4.095		4.817
Jumlah bank			26.876		24.310
Deposito berjangka					
Pihak berelasi					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI")	Rp	-	6.413	-	6.739
	US\$	25	359	43	610
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI")	Rp	-	1.181	-	544
	US\$	52	747	47	675
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri")	Rp	-	1.418	-	604
	US\$	-	-	31	441
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("BTN")	Rp	-	980	-	580
Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI")	Rp	-	470	-	210
Sub-jumlah			11.568		10.403

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	Mata uang	31 Maret 2022		31 Desember 2021	
		Saldo		Saldo	
		Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Deposito berjangka (lanjutan)					
Pihak ketiga					
PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")	Rp	-	1.050	-	1.689
	US\$	16	237	17	235
PT Bank Permata Tbk. ("Bank Permata")	Rp	-	100	-	30
PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon")	Rp	-	153	-	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("Bank CIMB Niaga")	Rp	-	370	-	0
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("BJB")	Rp	-	646	-	910
	US\$	11	154	11	153
PT Bank Maybank Indonesia Tbk. ("Maybank")	Rp	-	207	-	197
	US\$	7	108	8	107
	MYR	1	5	2	7
PT Bank DBS Indonesia ("DBS")	Rp	-	-	-	200
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	Rp	-	124	-	59
Sub-jumlah			<u>3.154</u>		<u>3.587</u>
Jumlah deposito berjangka			14.722		13.990
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian			(0)		(1)
Jumlah			<u>41.629</u>		<u>38.311</u>

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2022	31 Desember 2021
Rupiah	1,95% - 6,25%	1,25% - 7,75%
Mata uang asing	0,20% - 0,55%	0,20% - 1,75%

Pihak berelasi di mana Grup melakukan penempatan dananya merupakan bank milik negara. Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank-bank tersebut karena mereka memiliki jaringan cabang yang luas di Indonesia dan dipertimbangkan sebagai bank yang sehat secara finansial karena dimiliki oleh negara.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

4. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

	<u>31 Maret 2022</u>		<u>31 Desember 2021</u>	
	<u>Saldo</u>		<u>Saldo</u>	
	<u>Mata uang</u>	<u>Mata uang asing (dalam jutaan)</u>	<u>Mata uang asing (dalam jutaan)</u>	<u>Setara Rupiah</u>
Deposito berjangka				
Pihak berelasi				
Bank Mandiri	Rp	-	280	-
	US\$	5	72	5
BNI	Rp	-	170	-
BRI	Rp	-	150	-
Sub jumlah			<u>672</u>	<u>251</u>
Pihak ketiga				
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	Rp	-	18	-
	US\$	5	73	5
Jumlah deposito berjangka			<u>763</u>	<u>342</u>
Rekening penampungan				
Rp	Rp	-	25	-
US\$	US\$	1	18	1
Jumlah rekening penampungan			<u>43</u>	<u>64</u>
Reksa dana				
Pihak berelasi				
PT Bahana TCW Investment Management ("Bahana TCW")	Rp	-	79	-
Jumlah reksa dana			<u>79</u>	<u>78</u>
Lainnya	Rp	-	100	-
Jumlah lainnya			<u>100</u>	<u>9</u>
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian			(0)	(0)
Jumlah			<u>985</u>	<u>493</u>

Seluruh deposito berjangka di atas memiliki tanggal jatuh tempo lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun, dengan tingkat bunga per tahun sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rupiah	2,20% - 2,75%	2,50% - 3,75%
Mata uang asing	0,06% - 1,10%	0,06% - 0,50%

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA

Piutang usaha berhubungan dengan jasa yang diberikan kepada pelanggan *retail* dan non-*retail*, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

(i) Pihak berelasi

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
BUMN	1.591	1.336
Indonusa	420	439
Indosat	536	148
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	132	176
Jumlah	2.679	2.099
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(1.136)	(1.138)
Jumlah bersih	1.543	961

(ii) Pihak ketiga

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Pelanggan individual dan bisnis	13.709	13.323
Penyelenggara jasa telekomunikasi luar negeri	1.312	890
Jumlah	15.021	14.213
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(7.069)	(6.664)
Jumlah bersih	7.952	7.549

b. Berdasarkan umur

(i) Pihak berelasi

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Sampai dengan 3 bulan	1.687	952
3 sampai dengan 6 bulan	128	164
Lebih dari 6 bulan	864	983
Jumlah	2.679	2.099
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(1.136)	(1.138)
Jumlah bersih	1.543	961

(ii) Pihak ketiga

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Sampai dengan 3 bulan	7.730	7.120
3 sampai dengan 6 bulan	704	760
Lebih dari 6 bulan	6.587	6.333
Jumlah	15.021	14.213
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(7.069)	(6.664)
Jumlah bersih	7.952	7.549

(iii) Umur total piutang usaha

	<u>31 Maret 2022</u>			<u>31 Desember 2021</u>		
	Sebelum penyisihan	Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	Tingkat kerugian kredit ekspektasian	Sebelum penyisihan	Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	Tingkat kerugian kredit ekspektasian
Belum jatuh tempo	6.577	474	7,2%	5.625	532	9,5%
Jatuh tempo sampai dengan 3 bulan	2.839	530	18,7%	2.447	328	13,4%
Jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan	832	277	33,3%	924	253	27,4%
Jatuh tempo lebih dari 6 bulan	7.452	6.924	92,9%	7.316	6.689	91,4%
Jumlah	17.700	8.205		16.312	7.802	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan umur (lanjutan)

(iii) Umur total piutang usaha (lanjutan)

Grup telah membentuk penyisihan kerugian kredit ekspektasian berdasarkan tingkat penurunan nilai historis secara kolektif dan historis kredit para pelanggan secara individual, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi. Grup tidak membedakan piutang usaha pihak berelasi dan piutang usaha pihak ketiga dalam menilai jumlah yang jatuh tempo. Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, nilai tercatat piutang usaha Grup yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya masing-masing sebesar Rp3.392 miliar dan Rp3.417 miliar. Manajemen berpendapat bahwa piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya, termasuk piutang usaha yang belum jatuh tempo dan juga tidak diturunkan nilainya, adalah terutang dari para pelanggan dengan historis tingkat ketertagihan yang baik dan diharapkan dapat terpulihkan.

c. Berdasarkan mata uang

(i) Pihak berelasi

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rupiah	2.677	2.098
Dolar A.S.	2	1
Jumlah	2.679	2.099
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(1.136)	(1.138)
Jumlah bersih	1.543	961

(ii) Pihak ketiga

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rupiah	12.919	12.517
Dolar A.S.	1.990	1.606
Dolar Singapura	56	56
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	56	34
Jumlah	15.021	14.213
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(7.069)	(6.664)
Jumlah bersih	7.952	7.549

d. Mutasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Saldo awal	7.802	8.360
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	403	474
Penghapusbukuan piutang	-	(1.032)
Saldo akhir	8.205	7.802

Penghapusbukuan piutang merupakan penghapusbukuan piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga.

Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha sudah cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, piutang usaha tertentu atas entitas anak masing-masing sebesar Rp1.990 miliar dan Rp2.330 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 19a dan 20c).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. ASET KONTRAK

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Aset kontrak	2.517	2.588
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(81)	(115)
Jumlah bersih	2.436	2.473
Jangka pendek	(2.157)	(2.330)
Jangka panjang	279	143

Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas aset kontrak sudah cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya aset kontrak.

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

7. PERSEDIAAN

Persediaan diakui sebesar nilai realisasi bersih, terdiri atas:

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Komponen	668	578
Kartu SIM dan voucher Prabayar	152	148
Lain-lain	164	122
Jumlah	984	848
Provisi atas persediaan usang		
Komponen	(21)	(38)
Kartu SIM dan voucher Prabayar	(28)	(28)
Lain-lain	(3)	(3)
Jumlah	(52)	(69)
Jumlah bersih	932	779

Mutasi provisi atas persediaan usang adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Saldo awal	69	68
Provisi yang diakui selama periode berjalan	0	2
Penghapusbukuan persediaan	(17)	(1)
Saldo akhir	52	69

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas persediaan usang cukup untuk menutup kerugian akibat dari penurunan nilai persediaan karena usang.

Persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban usaha operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp185 miliar dan Rp134 miliar (Catatan 26).

Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, persediaan tertentu entitas anak masing-masing sebesar Rp343 miliar dan Rp557 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 20c).

Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, modul (bagian dari aset tetap) dan komponen dengan nilai buku masing-masing sebesar Rp121 miliar dan Rp122 miliar, yang dimiliki oleh Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lain. Total nilai pertanggungan pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp111 miliar dan Rp133 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang muncul dari risiko yang ditanggung.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. ASET LANCAR LAINNYA

Rincian dari aset lancar lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Izin penggunaan frekuensi dibayar di muka - bagian jangka pendek (Catatan 36c.i)	4.486	4.923
Uang muka	783	683
Gaji dibayar di muka	270	185
Sewa dibayar di muka	105	170
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	380	390
Jumlah	<u>6.024</u>	<u>6.351</u>

9. BIAYA KONTRAK

Rincian dari biaya kontrak adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2022</u>		
	<u>Biaya perolehan kontrak</u>	<u>Biaya pemenuhan kontrak</u>	<u>Jumlah</u>
Saldo, 1 Januari 2022	1.532	732	2.264
Amortisasi selama periode berjalan	(80)	(148)	(228)
Penambahan selama periode berjalan	87	154	241
Saldo, 31 Maret 2022	1.539	738	2.277
Jangka pendek	<u>(322)</u>	<u>(316)</u>	<u>(638)</u>
Jangka panjang	<u>1.217</u>	<u>422</u>	<u>1.639</u>

	<u>31 Desember 2021</u>		
	<u>Biaya perolehan kontrak</u>	<u>Biaya pemenuhan kontrak</u>	<u>Jumlah</u>
Saldo, 1 Januari 2021	1.245	463	1.708
Amortisasi selama tahun berjalan	(281)	(488)	(769)
Penambahan selama tahun berjalan	568	757	1.325
Saldo, 31 Desember 2021	1.532	732	2.264
Jangka pendek	<u>(312)</u>	<u>(344)</u>	<u>(656)</u>
Jangka panjang	<u>1.220</u>	<u>388</u>	<u>1.608</u>

Tidak ada penyisihan atas penurunan nilai biaya kontrak pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021.

10. PENYERTAAN JANGKA PANJANG PADA INSTRUMEN KEUANGAN

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Investasi pada ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	12.772	12.962
Obligasi konversi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	657	681
Investasi pada ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	18	18
Jumlah investasi jangka panjang pada instrumen keuangan	<u>13.447</u>	<u>13.661</u>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

10. PENYERTAAN JANGKA PANJANG PADA INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Investasi pada obligasi konversi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi merupakan investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Telkomsel dan MDI dalam bentuk obligasi konversi pada berbagai perusahaan *start-up* yang bergerak di bidang informasi dan teknologi, yang akan langsung dikonversi menjadi saham ketika jatuh tempo. Obligasi konversi tersebut akan jatuh tempo hingga 31 Desember 2023.

Investasi pada ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi merupakan investasi jangka panjang dalam bentuk saham pada berbagai perusahaan *start-up* yang bergerak di bidang informasi dan teknologi. Grup tidak memiliki pengaruh signifikan dalam perusahaan *start-up* tersebut.

Investasi pada ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk investasi Telkomsel pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa ("AKAB").

Pada tanggal 16 November 2020, Telkomsel mengadakan perjanjian dengan AKAB untuk investasi dalam bentuk Obligasi Konversi ("CB") tanpa bunga sebesar US\$150 juta (setara dengan Rp2.116 miliar per 31 Desember 2020). CB tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2023. Investasi pada CB oleh Telkomsel tersebut dengan model bisnis yang tujuannya bukan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan bukan semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang terhutang, sehingga CB diklasifikasikan sebagai FVTPL. Opsi beli saham preferen memberikan hak kepada Telkomsel untuk membeli saham preferen tambahan dari AKAB. Opsi beli saham preferen memberikan hak kepada Telkomsel untuk membeli tambahan saham preferen dari AKAB sebesar US\$300 juta dan dapat dieksekusi dalam waktu 12 bulan setelah tanggal efektif pada harga US\$5.049 per saham. Opsi beli saham preferen adalah derivatif dan dicatat pada FVTPL.

Pada 17 Mei 2021, AKAB dan PT Tokopedia merger menjadi PT GoTo Gojek Tokopedia ("GoTo"). Merger ini membuat Telkomsel mengeksekusi CB sesuai dengan perjanjian CB, di mana CB akan dikonversi menjadi saham. Berdasarkan perjanjian CB, GoTo akan membayar total jumlah konversi kepada Telkomsel, dan setelah menerima jumlah konversi tersebut, Telkomsel harus segera membayar jumlah konversi kepada GoTo sesuai dengan Perjanjian Pemesanan Saham.

Pada tanggal 18 Mei 2021, Telkomsel telah menandatangani Perjanjian Pembelian Saham untuk memesan 29.708 lembar saham konversi atau sebesar US\$150 juta (setara dengan Rp2.110 miliar) dan 59.417 lembar saham tambahan dari opsi pembelian saham atau senilai US\$300 juta (setara dengan Rp4.290 miliar).

Berdasarkan perubahan akta pada tanggal 19 Oktober 2021, GoTo melakukan *stock split* dan mengubah jumlah kepemilikan saham Telkomsel dari 89.125 lembar saham menjadi 23.722.133.875 lembar saham.

Per tanggal 31 Maret 2022, Telkomsel menilai nilai wajar investasi di GoTo dengan menggunakan nilai penawaran saham GoTo pada saat IPO sebesar Rp338 per saham.

Jumlah kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar investasi Telkomsel pada GoTo pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp881 miliar disajikan sebagai kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Investasi pada ekuitas juga termasuk investasi MDI, pada berbagai perusahaan *start-up* yang bergerak di bidang informasi dan teknologi. Penambahan investasi pada periode berjalan oleh MDI berjumlah sebesar Rp698 miliar. Investasi pada ekuitas ini diklasifikasikan sebagai FVTPL.

Jumlah kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar investasi MDI pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp5 miliar dan disajikan sebagai kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi dalam laporan laba rugi konsolidasian.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG PADA ENTITAS ASOSIASI

Rincian penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas untuk tanggal 31 Maret 2022:

	31 Maret 2022							
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan (pengurangan)	Bagian laba (rugi) bersih	Dividen	Bagian penghasilan komprehensif lain	Penurunan nilai	Saldo akhir
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:								
Jalin ^a	33,00	107	-	3	-	(0)	-	110
Finarya ^b	24,27	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar) ^c		32	-	(7)	-	1	-	26
Jumlah penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi		139	-	(4)	-	1	-	136

Ringkasan informasi keuangan investasi Grup yang diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022:

	Jalin	Finarya	Lain-lain
<i>Laporan posisi keuangan</i>			
Aset lancar	279	1.525	1.211
Aset tidak lancar	232	210	4.697
Liabilitas jangka pendek	(171)	(1.576)	(620)
Liabilitas jangka panjang	(8)	(30)	(4.618)
Ekuitas	332	129	670
<i>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya</i>			
Pendapatan	100	34	456
Beban operasional	(88)	(216)	(351)
Penghasilan (beban) lain-lain termasuk biaya pendanaan - bersih	(1)	4	(27)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	11	(178)	78
Beban pajak penghasilan	(3)	(1)	(3)
Laba (rugi) periode berjalan	8	(179)	75
Laba (rugi) komprehensif lain	-	-	0
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan	8	(179)	75

Rincian penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021:

	31 Desember 2021							
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan (pengurangan)	Bagian laba (rugi) bersih	Dividen	Bagian penghasilan komprehensif lain	Penurunan nilai	Saldo akhir
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:								
Jalin ^a	33,00	89	-	25	(7)	0	-	107
Finarya ^b	24,27	87	-	(87)	-	-	-	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar) ^c		16	33	(16)	-	(1)	-	32
Jumlah penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi		192	33	(78)	(7)	(1)	-	139

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan investasi Grup yang diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021:

	Jalin	Finarya	Lain-lain
<i>Laporan posisi keuangan</i>			
Aset lancar	239	1.779	1.248
Aset tidak lancar	237	222	4.720
Liabilitas jangka pendek	(144)	(1.654)	(646)
Liabilitas jangka panjang	(8)	(35)	(4.618)
Ekuitas	324	312	704
<i>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya</i>			
Pendapatan	401	137	1.869
Beban operasional	(311)	(1.160)	(1.436)
Penghasilan (beban) lain-lain termasuk biaya pendanaan - bersih	6	31	(106)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	96	(992)	327
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(19)	11	(13)
Laba (rugi) periode berjalan	77	(981)	314
Laba (rugi) komprehensif lain	1	4	(1)
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan	78	(977)	313

^a Jalin sebelumnya adalah entitas anak. Pada tanggal 19 Juni 2019 Grup menjual 67% kepemilikan sahamnya kepada PT Danareksa (Persero) ("Danareksa") senilai Rp395 miliar.

^b Pada tanggal 21 Januari 2019, Telkomsel mendirikan anak perusahaan PT Fintek Karya Nusantara ("Finarya") dengan modal awal Rp25 miliar dan pada tanggal 22 Februari 2019 Telkomsel mengalihkan asetnya sebesar Rp 150 miliar. Atas akuisisi ini Telkomsel memperoleh masing-masing 2.499 dan 14.974 lembar saham (kepemilikan saham 100%). Telkomsel dengan PT Mandiri Capital Indonesia, PT BRI Ventura Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT Jasamarga Tollroad Operator, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), PT Pertamina Retail, PT Kereta Commuter Indonesia ("KCI"), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Danareksa Capital, menandatangani perjanjian pemegang saham pada tanggal 31 Juli 2019, 31 Oktober 2019, dan 31 Desember 2019 sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor oleh masing-masing pemegang saham. Pada tanggal 31 Desember 2019, Telkomsel memiliki 48.530 lembar saham atau setara dengan 26,58% kepemilikan saham.

Pada tanggal 23 Oktober 2020, Finarya menerbitkan 13.632 saham seri B yang dimiliki oleh Grab LA Pte Ltd ("Grab") sebesar 11.237 lembar saham, PT BRI Ventura Indonesia sebesar 943 lembar saham, PT Mandiri Capital Indonesia sebesar 924 lembar saham dan Telkomsel sebesar 528 lembar saham. Investasi ini menurunkan kepemilikan Telkomsel di Finarya dari sebelumnya 26,58% menjadi 25,00%.

Pada tanggal 8 Maret 2021, PT Dompot Karya Anak Bangsa ("DKAB") berinvestasi di Finarya yang menyebabkan kepemilikan Telkomsel turun dari 25,00% menjadi 24,33%. Sejak Juni 2021, nilai investasi atas investasi Telkomsel di Finarya telah terserap sepenuhnya.

Pada tanggal 23 Desember 2021, Grab menambah investasinya di Finarya, sehingga kepemilikan Telkomsel terdilusi menjadi 24,27%. Pada tanggal 31 Maret 2022, kerugian yang tidak diakui sebesar Rp193,9 miliar.

^c Bagian kumulatif rugi atas investasi lain-lain yang tidak diakui hingga periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp190 miliar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

12. ASET TETAP

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Maret 2022
Harga perolehan:					
Aset tetap pemilikan langsung					
Tanah	1.821	-	-	2	1.823
Bangunan	17.296	-	-	140	17.436
Renovasi bangunan sewa	1.477	7	(60)	3	1.427
Peralatan sentral telepon	18.324	97	-	156	18.577
Peralatan telegraf, telex dan komunikasi data	1.583	-	-	-	1.583
Peralatan dan instalasi transmisi	165.621	538	(22)	2.041	168.178
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	10.528	3	-	19	10.550
Jaringan kabel	67.559	1.394	-	(398)	68.555
Catu daya	22.035	28	(15)	263	22.311
Peralatan pengolahan data	19.258	43	(15)	218	19.504
Peralatan telekomunikasi lainnya	9.121	62	-	20	9.203
Peralatan kantor	2.352	32	(61)	(1)	2.322
Kendaraan	537	4	-	-	541
Peralatan lainnya	47	-	-	4	51
Aset dalam pembangunan	2.950	3.527	-	(3.284)	3.193
Jumlah	<u>340.509</u>	<u>5.735</u>	<u>(173)</u>	<u>(817)</u>	<u>345.254</u>
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:					
Aset tetap pemilikan langsung					
Bangunan	5.537	154	-	(6)	5.685
Renovasi bangunan sewa	1.163	29	(60)	-	1.132
Peralatan sentral telepon	12.225	490	-	-	12.715
Peralatan telegraf, telex dan komunikasi data	1.582	-	-	-	1.582
Peralatan dan instalasi transmisi	94.532	2.990	(18)	(460)	97.044
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	5.199	187	-	(3)	5.383
Jaringan kabel	18.735	1.036	-	10	19.781
Catu daya	15.874	409	(13)	(7)	16.263
Peralatan pengolahan data	14.130	407	(13)	93	14.617
Peralatan telekomunikasi lainnya	4.330	426	-	20	4.776
Peralatan kantor	1.866	69	(59)	(7)	1.869
Kendaraan	270	8	-	-	278
Peralatan lainnya	40	9	-	(5)	44
Jumlah	<u>175.483</u>	<u>6.214</u>	<u>(163)</u>	<u>(365)</u>	<u>181.169</u>
Nilai buku bersih	<u>165.026</u>				<u>164.085</u>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

12. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2021
Harga perolehan:					
Aset tetap pemilikan langsung					
Tanah	1.800	20	-	1	1.821
Bangunan	16.137	197	(5)	967	17.296
Renovasi bangunan sewa	1.410	45	(35)	57	1.477
Peralatan sentral telepon	17.506	1.112	(1.223)	929	18.324
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	2.012	-	-	(429)	1.583
Peralatan dan instalasi transmisi	159.196	3.829	(3.479)	6.075	165.621
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	10.423	359	(15)	(239)	10.528
Jaringan kabel	60.796	8.722	(33)	(1.926)	67.559
Catu daya	20.988	303	(390)	1.134	22.035
Peralatan pengolahan data	17.663	250	(314)	1.659	19.258
Peralatan telekomunikasi lainnya	7.513	1.646	-	(38)	9.121
Peralatan kantor	2.125	205	(57)	79	2.352
Kendaraan	551	34	(43)	(5)	537
Peralatan lainnya	68	6	-	(27)	47
Aset dalam pembangunan	2.524	13.613	(29)	(13.158)	2.950
Jumlah	<u>320.712</u>	<u>30.341</u>	<u>(5.623)</u>	<u>(4.921)</u>	<u>340.509</u>
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:					
Aset tetap pemilikan langsung					
Bangunan	4.872	652	(2)	15	5.537
Renovasi bangunan sewa	1.061	132	(30)	-	1.163
Peralatan sentral telepon	11.621	1.871	(1.223)	(44)	12.225
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	1.582	-	-	-	1.582
Peralatan dan instalasi transmisi	87.991	11.554	(3.227)	(1.786)	94.532
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	4.412	743	(16)	60	5.199
Jaringan kabel	15.978	4.210	(11)	(1.442)	18.735
Catu daya	14.757	1.546	(383)	(46)	15.874
Peralatan pengolahan data	12.780	1.708	(301)	(57)	14.130
Peralatan telekomunikasi lainnya	2.885	1.492	-	(47)	4.330
Peralatan kantor	1.574	357	(57)	(8)	1.866
Kendaraan	229	71	(26)	(4)	270
Peralatan lainnya	47	4	-	(11)	40
Jumlah	<u>159.789</u>	<u>24.340</u>	<u>(5.276)</u>	<u>(3.370)</u>	<u>175.483</u>
Nilai buku bersih	<u>160.923</u>				<u>165.026</u>

a. Laba dari penjualan aset tetap

	2022	2021
Hasil penjualan aset tetap	109	147
Nilai buku bersih	(7)	(13)
Labanya dari pelepasan atau penjualan aset tetap	<u>102</u>	<u>134</u>

b. Lain-lain

- (i) Selama tahun 2021, UPK yang menghasilkan proyeksi arus kas masuk adalah sambungan nirkabel tidak bergerak, seluler, dan lainnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset dari UPK tersebut pada tanggal 31 Desember 2021.
- (ii) Bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan sejumlah Rp7 miliar dan Rp132 miliar masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021. Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi berkisar antara 2,10%-5,48% dan 0,80%-11,00% masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021.
- (iii) Tidak ada rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (iv) Selama periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, Grup telah mendapat klaim asuransi atas aset tetap yang hilang dan rusak masing-masing sebesar Rp124 miliar dan Rp85 miliar dan dicatat sebagai bagian dari "Penghasilan Lain-Lain - bersih" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Selama periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, nilai tercatat aset tetap tersebut masing-masing sebesar Rp119 miliar dan Rp76 miliar, telah dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

12. ASET TETAP (lanjutan)

b. Lain-lain (lanjutan)

- (v) Pada tahun 2018, umur manfaat lisensi piranti lunak radio dan peralatan pengolahan data diubah masing-masing dari 7 tahun menjadi 10 tahun dan dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Dampak pengurangan beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18 miliar.

Pada tahun 2020, umur manfaat menara Grup yang berada di Indonesia diubah dari 20 tahun menjadi 30 tahun. Dampak pengurangan beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp641 miliar. Menara disajikan sebagai bagian dari peralatan dan instalasi transmisi.

- (vi) Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, peralatan Telkomsel dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp91 miliar dan Rp818 miliar akan ditukarkan, dan oleh karenanya peralatan tersebut direklasifikasi sebagai aset tersedia untuk dijual pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, peralatan Telkomsel dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp985 miliar dan Rp258 miliar telah ditukarkan dengan peralatan PT ZTE Indonesia. Tidak ada penyisihan atas penurunan nilai aset tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021.
- (vii) Di tahun 2021, Perusahaan memutuskan untuk menghentikan penggunaan aset MSAN dan melakukan percepatan penyusutan aset MSAN, yang akan terdepresiasi penuh pada tahun 2022. Dampak percepatan penyusutan aset MSAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.603 miliar. Aset MSAN disajikan sebagai bagian dari jaringan kabel.
- (viii) Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai daerah di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") berjangka waktu 10-50 tahun yang akan habis masa berlakunya antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2072. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan untuk memperpanjang hak atas tanah pada saat berakhirnya hak tersebut.
- (ix) Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, aset tetap milik Grup kecuali tanah, dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp161.440 miliar dan Rp161.287 miliar telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi dan risiko lainnya, termasuk gangguan bisnis, dengan jumlah keseluruhan pertanggungan masing-masing sebesar Rp25.981 miliar dan Rp29.601 miliar, US\$Nihil, HKD8 juta, SGD327 juta dan SGD360, dan MYR72 juta dan *first loss basis* masing-masing sebesar Rp2.750 miliar. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.
- (x) Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, tingkat persentase penyelesaian aset dalam pembangunan adalah masing-masing sekitar 67,58% dan 75,63% dari nilai kontrak dengan perkiraan penyelesaian masing-masing sampai dengan Februari 2025. Saldo aset dalam pembangunan tersebut terutama terdiri dari bangunan, peralatan dan instalasi transmisi, jaringan kabel dan catu daya. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aset dalam pembangunan.
- (xi) Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, seluruh aset yang dimiliki Perusahaan telah dijamin dalam perjanjian obligasi (Catatan 20b.i). Aset tetap entitas anak tertentu dengan biaya perolehan masing-masing sebesar Rp17.512 miliar dan Rp22.939 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 19a, 20c, dan 20d).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

12. ASET TETAP (lanjutan)

b. Lain-lain (lanjutan)

(xii) Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap Grup yang telah disusutkan secara penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp72.010 miliar dan Rp67.355 miliar. Grup saat ini sedang melakukan modernisasi aset jaringan untuk menggantikan aset tetap yang sudah disusutkan secara penuh.

(xiii) Pada tahun 2021, nilai wajar tanah dan bangunan Grup, yang ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak ("NJOP") tanah dan bangunan yang bersangkutan adalah sebesar Rp45.604 miliar.

13. ASET HAK-GUNA

Grup menyewa beberapa aset termasuk tanah, bangunan, peralatan dan instalasi transmisi, catu daya, kendaraan, dan peralatan lainnya yang digunakan dalam operasinya, yang pada umumnya memiliki masa sewa antara 1 dan 30 tahun.

Grup juga memiliki sewa tertentu dengan jangka waktu dua belas bulan atau kurang dan nilai sewa bernilai rendah. Grup menerapkan 'sewa jangka pendek' dan 'sewa aset bernilai rendah' sebagai pengecualian untuk sewa ini. Tidak ada kontrak sewa dengan pembayaran sewa variabel. Beban sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp750 miliar dan Rp1.007 miliar.

Nilai tercatat aset hak guna yang diakui dan mutasi selama periode berjalan:

	31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ translasi	31 Maret 2022
Harga perolehan:					
Tanah	5.401	143	(47)	0	5.497
Bangunan	1.074	12	(23)	4	1.067
Peralatan dan instalasi transmisi	19.061	730	(756)	1	19.036
Catu daya	574	-	(2)	-	572
Kendaraan	622	4	(3)	0	623
Lain-lain	69	-	(2)	(0)	67
Jumlah	26.801	889	(833)	5	26.862
Akumulasi amortisasi					
Tanah	(1.399)	(222)	52	(0)	(1.569)
Bangunan	(345)	(56)	19	(2)	(384)
Peralatan dan instalasi transmisi	(5.941)	(853)	340	(0)	(6.454)
Catu daya	(412)	(39)	2	-	(449)
Kendaraan	(212)	(33)	3	(0)	(242)
Lain-lain	(23)	(6)	6	0	(23)
Jumlah	(8.332)	(1.209)	422	(2)	(9.121)
Nilai buku bersih	18.469				17.741

	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ translasi	31 Desember 2021
Harga perolehan:					
Tanah	4.863	968	(535)	105	5.401
Bangunan	734	532	(193)	1	1.074
Peralatan dan instalasi transmisi	16.072	4.341	(1.377)	25	19.061
Catu daya	641	17	(84)	-	574
Kendaraan	676	82	(136)	0	622
Lain-lain	29	49	(73)	64	69
Jumlah	23.015	5.989	(2.398)	195	26.801
Akumulasi amortisasi					
Tanah	(763)	(955)	319	(0)	(1.399)
Bangunan	(166)	(346)	163	4	(345)
Peralatan dan instalasi transmisi	(3.160)	(3.283)	502	(0)	(5.941)
Catu daya	(200)	(296)	84	-	(412)
Kendaraan	(141)	(197)	128	(2)	(212)
Lain-lain	(19)	(29)	43	(18)	(23)
Jumlah	(4.449)	(5.106)	1.239	(16)	(8.332)
Nilai buku bersih	18.566				18.469

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET HAK-GUNA (lanjutan)

Nilai tercatat liabilitas sewa dan rincian mutasinya adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Saldo, 1 Januari	16.387	15.617
Penambahan	889	6.567
Pengurangan	(2.615)	(5.797)
Saldo	14.661	16.387
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(6.282)	(5.961)
Bagian jangka panjang	8.379	10.426

Jatuh tempo pembayaran liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

<u>Tahun</u>	<u>31 Maret 2022</u>
2023	7.718
2024	1.031
2025	2.198
2026	2.057
2027	1.784
Selanjutnya	5.033
Jumlah pembayaran sewa	19.821
Bunga	(5.160)
Nilai kini atas pembayaran sewa	14.661
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(6.282)
Bagian jangka panjang	8.379

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Rincian dari aset tidak lancar lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Izin penggunaan frekuensi dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 36c.i)	1.496	1.572
Uang muka pembelian aset tetap	1.427	868
Tagihan restitusi pajak - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 28b)	1.042	1.488
Beban dibayar di muka	579	454
Pajak dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 28a)	480	601
Setoran jaminan	115	102
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	447	446
Jumlah	5.586	5.531

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. ASET TAKBERWUJUD

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	<u>Goodwill</u>	<u>Piranti lunak</u>	<u>Lisensi</u>	<u>Aset takberwujud lainnya</u>	<u>Jumlah</u>
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2022	1.492	17.458	174	1.512	20.636
Penambahan	-	910	-	-	910
Pengurangan	-	(270)	(8)	-	(278)
Reklasifikasi/translasi	-	(43)	-	3	(40)
Saldo, 31 Maret 2022	<u>1.492</u>	<u>18.055</u>	<u>166</u>	<u>1.515</u>	<u>21.228</u>
Akumulasi amortisasi:					
Saldo, 1 Januari 2022	(402)	(11.714)	(125)	(889)	(13.130)
Beban amortisasi	-	(497)	(7)	(20)	(524)
Pengurangan	-	12	8	-	20
Reklasifikasi/translasi	-	(2)	-	(3)	(5)
Saldo, 31 Maret 2022	<u>(402)</u>	<u>(12.201)</u>	<u>(124)</u>	<u>(912)</u>	<u>(13.639)</u>
Nilai buku bersih	<u>1.090</u>	<u>5.854</u>	<u>42</u>	<u>603</u>	<u>7.589</u>

	<u>Goodwill</u>	<u>Piranti lunak</u>	<u>Lisensi</u>	<u>Aset takberwujud lainnya</u>	<u>Jumlah</u>
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2021	1.428	14.688	94	1.474	17.684
Penambahan	64	2.938	80	11	3.093
Pengurangan	-	(19)	-	-	(19)
Reklasifikasi/translasi	-	(149)	-	27	(122)
Saldo, 31 Desember 2021	<u>1.492</u>	<u>17.458</u>	<u>174</u>	<u>1.512</u>	<u>20.636</u>
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai :					
Saldo, 1 Januari 2021	(125)	(9.863)	(94)	(756)	(10.838)
Beban amortisasi	-	(1.828)	(31)	(143)	(2.002)
Penurunan nilai	(277)	-	-	-	(277)
Pengurangan	-	11	-	-	11
Reklasifikasi/translasi	-	(34)	-	10	(24)
Saldo, 31 Desember 2021	<u>(402)</u>	<u>(11.714)</u>	<u>(125)</u>	<u>(889)</u>	<u>(13.130)</u>
Nilai buku bersih	<u>1.090</u>	<u>5.744</u>	<u>49</u>	<u>623</u>	<u>7.506</u>

- (i) *Goodwill* timbul dari akuisisi Sigma (2008), Admedika (2010), *data center* PT Bina Data Mandiri (“BDM”) (2012), Contact Centres Australia Pty. Ltd. (2014), PT Media Nusantara Data Global (“MNDG”) (2015), Melon dan PT Griya Silkindo Drajatmoerni (“GSDm”) (2016), TSGN dan Nutech (2017), SSI, CIP, dan Telin Malaysia (2018), PST (2019), dan Digiserve (2021).
- (ii) Pada tanggal 31 Desember 2021, *goodwill* yang mengalami penurunan nilai adalah *goodwill* yang timbul dari akuisisi Contact Centres Australia Pty. Ltd, SSI, dan Telin Malaysia masing-masing sebesar Rp37 miliar, Rp179 miliar, dan Rp61 miliar. Rugi penurunan nilai diakui sebagai bagian dari “Beban penyusutan dan amortisasi” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
- (iii) Beban amortisasi diakui sebagai bagian dari “Beban penyusutan dan amortisasi” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Sisa periode amortisasi dari aset takberwujud piranti lunak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing 1-6 tahun.
- (iv) Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, jumlah tercatat bruto dari aset takberwujud yang telah diamortisasi seluruhnya dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp8.311 miliar dan Rp7.910 miliar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG USAHA

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Pihak berelasi		
Pembelian peralatan, barang, dan jasa	432	385
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	185	112
Sub-jumlah	617	497
Pihak ketiga		
Pembelian peralatan, barang, dan jasa	10.514	12.806
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	2.823	2.538
Beban pemakaian frekuensi radio, beban hak penyelenggaraan, dan Kewajiban Pelayanan Universal ("KPU")	1.941	1.329
Sub-jumlah	15.278	16.673
Jumlah	15.895	17.170

Utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rupiah	13.869	15.584
Dolar A.S.	1.972	1.506
Lain-lain	54	80
Jumlah	15.895	17.170

Syarat dan ketentuan atas kewajiban keuangan di atas:

- a. Utang usaha tidak dikenakan bunga dan secara umum diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun.
- b. Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi pihak berelasi.
- c. Lihat Catatan 38b.v untuk manajemen risiko likuiditas Grup.

17. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Rincian beban yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	8.583	8.978
Gaji dan tunjangan	4.508	4.180
Umum, administrasi, dan pemasaran	3.025	2.583
Beban bunga dan administrasi bank	128	144
Jumlah	16.244	15.885

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. LIABILITAS KONTRAK

a. Liabilitas kontrak jangka pendek

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Uang muka pelanggan <i>Mobile</i>	4.221	4.155
Uang muka pelanggan <i>Enterprise</i>	1.091	1.161
Uang muka pelanggan WIB	1.105	1.138
Uang muka pelanggan <i>Consumer</i>	203	185
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	184	156
Jumlah	<u>6.804</u>	<u>6.795</u>

b. Liabilitas kontrak jangka panjang

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Uang muka pelanggan <i>Consumer</i>	882	787
Uang muka pelanggan WIB	393	450
Uang muka pelanggan <i>Enterprise</i>	68	39
Lain-lain	35	7
Jumlah	<u>1.378</u>	<u>1.283</u>

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

19. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN

a. Utang bank jangka pendek

Kreditur	Mata uang	<u>31 Maret 2022</u>		<u>31 Desember 2021</u>	
		<u>Saldo terutang</u>		<u>Saldo terutang</u>	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	1.105	-	1.028
Bank Mandiri	Rp	-	241	-	550
Sub-jumlah			<u>1.346</u>		<u>1.578</u>
Pihak ketiga					
HSBC	Rp	-	2.011	-	1.937
MUFG Bank	Rp	-	1.154	-	1.853
Bank of China	Rp	-	1.000	-	-
Bank DBS	Rp	-	529	-	545
Citibank	Rp	-	500	-	-
PT Bank UOB Indonesia ("UOB Indonesia")	Rp	-	350	-	400
BCA	Rp	-	-	-	350
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	Rp	-	19	-	19
Sub-jumlah			<u>5.563</u>		<u>5.104</u>
Jumlah			<u>6.909</u>		<u>6.682</u>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)	Jatuh tempo fasilitas pinjaman	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan**
BNI							
2014 - 2017	GSD, Sigma ^a	Rp	475	9 April 2022 - 7 November 2022	Bulanan	7,90% - 8,50%	Piutang usaha, aset tetap, dan persediaan
2017 - 2021	Infomedia ^b , Metranet, Telkom Infra	Rp	1.135	30 April 2022 - 18 Februari 2023	Bulanan	1 bulan JIBOR + 2,10% - 2,50%	Piutang usaha
Mandiri							
2021	Nutech	Rp	50	25 Oktober 2022	Bulanan	9,00%	Piutang usaha dan aset tetap
2020	Finnet	Rp	500	28 April 2022	Bulanan	1 bulan JIBOR + 1,50%	Tidak ada
HSBC							
2014 - 2020	Sigma ^{c,h} , Sigma ^g , Metra, PINS, Metranet, Telkomsat, GSD	Rp	400	14 Juli 2022	Bulanan	Under BLR 7,40%	Piutang usaha
		Rp	2.103	29 Juni 2022 - 31 Desember 2022	Bulanan, Kuartalan	1 bulan JIBOR + 0,80% 3 bulan JIBOR + 1,00%	Tidak ada
MUFG Bank							
2018 - 2021	Infomedia, Metra, GSD, Telkom Infra	Rp	1.530	30 Oktober 2022 - 31 Oktober 2022	Bulanan	1 bulan JIBOR + 0,70%	Tidak ada
Bank of China							
2020	Perusahaan	Rp	1.000	14 Juni 2022	Bulanan	1 bulan JIBOR + 0,70%	Tidak ada
DBS							
2016	Sigma ^{d,e}	US\$	0,02	31 Juli 2022	Semesteran	3,25% (US\$), 10,75% (Rp)	Piutang usaha
2018	Telkom Infra, Infomedia	Rp	600	31 Juli 2022	Bulanan	1 bulan JIBOR + 1,20%	Tidak ada
Citibank							
2020	Perusahaan	Rp	500	14 Juni 2022	Bulanan	1 bulan JIBOR + 0,60%	Tidak ada
UOB Indonesia							
2016	Finnet ^f	Rp	500	20 Desember 2022	Bulanan	1 bulan JIBOR + 1,75%	Tidak ada

* Disajikan dalam mata uang asal.

** Lihat Catatan 5 dan Catatan 12 untuk piutang usaha dan aset tetap yang dijamin.

^a Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 23 April 2019.

^b Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 28 Maret 2018 dan 6 Juli 2018.

^c Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 16 Juli 2018 dan 17 November 2021.

^d Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 5 Desember 2018.

^e Fasilitas dalam mata uang Dolar A.S. Penarikan dapat dilakukan dalam mata uang Dolar A.S. dan Rupiah.

^f Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 11 Desember 2020.

^g Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 23 April 2021.

^h Perpanjangan otomatis jika belum dilunasi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO
DALAM SATU TAHUN (lanjutan)**

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

Pada tanggal 27 November 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan HSBC dengan jumlah fasilitas sebesar Rp500 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, semua fasilitas belum digunakan.

Pada tanggal 29 Maret 2021, Perusahaan dan Telkom Infra menandatangani perjanjian kredit dengan BNI dengan jumlah fasilitas sebesar Rp735 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp44 miliar.

Pada tanggal 23 April 2021, Perusahaan, Sigma, dan Melon menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan HSBC dengan jumlah fasilitas sebesar Rp947 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp167 miliar.

Pada tanggal 26 Agustus 2021, Perusahaan menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan Bank Permata dengan jumlah fasilitas sebesar Rp400 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, semua fasilitas belum digunakan.

Pada tanggal 10 September 2021, Perusahaan, Infomedia, dan Telkom Infra menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan Bank DBS dengan jumlah fasilitas sebesar Rp750 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp275 miliar.

Pada tanggal 14 Oktober 2021, Perusahaan, Metra, MD Media, Metranet, Telkomsat, dan GSD menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan HSBC dengan jumlah fasilitas sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp21 miliar.

Pada tanggal 22 Oktober 2021, Perusahaan menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan Bank of China dengan jumlah fasilitas sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, semua fasilitas sudah digunakan.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Perusahaan, Metra, dan Infomedia menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan MUFG Bank dengan jumlah fasilitas sebesar Rp400 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp165 miliar.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Perusahaan, Infomedia, MD Media, dan Telkom Infra menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan MUFG Bank dengan jumlah fasilitas sebesar Rp1.560 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp1.020 miliar.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Perusahaan dan GSD menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan MUFG Bank dengan jumlah fasilitas sebesar Rp900 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp521 miliar.

Pada tanggal 24 Desember 2021, Perusahaan menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan Citibank dengan jumlah fasilitas sebesar Rp500 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, semua fasilitas sudah digunakan.

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya batasan bahwa Perusahaan harus memiliki kepemilikan saham mayoritas paling sedikit 51% terhadap anak perusahaan dan mempertahankan rasio-rasio keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup telah memperoleh persetujuan (waiver) dari pemberi pinjaman untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut untuk Telkom Infra dan Sigma. Waiver dari BNI, Bank DBS, dan HSBC diterima masing-masing pada tanggal 29 November 2021, 30 Desember 2021, dan 31 Desember 2021. Pada tanggal 31 Maret 2022, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut kecuali untuk pinjaman tertentu oleh Telkom Infra.

Fasilitas utang bank yang diperoleh Grup digunakan untuk keperluan pengembangan bisnis usaha.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN (lanjutan)

b. Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

	Catatan	31 Maret 2022	31 Desember 2021
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	20a	119	138
Obligasi dan wesel bayar	20b	2.200	2.200
Utang bank	20c	6.244	6.311
Pinjaman lainnya	20d	942	1.041
Jumlah		9.505	9.690

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA

	Catatan	31 Maret 2022	31 Desember 2021
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	20a	208	217
Obligasi dan wesel bayar	20b	4.793	4.793
Utang bank	20c	26.099	29.745
Pinjaman lainnya	20d	952	1.564
Jumlah		32.052	36.319

Jadwal pembayaran pokok utang pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

	Catatan	Jumlah	Tahun				Selanjutnya
			2023	2024	2025	2026	
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	20a	208	117	91	-	-	-
Obligasi dan wesel bayar	20b	4.793	-	-	2.098	-	2.695
Utang bank	20c	26.099	4.725	6.406	5.396	4.567	5.005
Pinjaman lainnya	20d	952	591	361	-	-	-
Jumlah		32.052	5.433	6.858	7.494	4.567	7.700

a. Pinjaman penerusan (*two-step loans*)

Pinjaman penerusan (*two-step loans*) adalah pinjaman tanpa jaminan yang diperoleh Pemerintah yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh hingga bulan Juli 1994 dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman. Pinjaman yang diperoleh setelah bulan Juli 1994 terutang dalam mata uang asalnya dan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi ditanggung oleh Perusahaan.

Kreditur	Mata uang	31 Maret 2022		31 Desember 2021	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Bank luar negeri	Yen	2.304	271	2.304	285
	US\$	-	-	1	14
	Rp	-	56	-	56
Jumlah			327		355
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 19b)			(119)		(138)
Bagian jangka panjang			208		217

Kreditur	Mata uang	Periode jadwal pembayaran	Pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Bank luar negeri	Yen	Semesteran	Semesteran	2,95%
	Rp	Semesteran	Semesteran	7,125%

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

a. Pinjaman penerusan (*two-step loans*) (lanjutan)

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan sarana penunjang telekomunikasi. Pinjaman ini akan dilunasi dalam angsuran semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2024.

Sejak 2008, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman penerusan dan periode penarikan pinjaman penerusan tersebut telah berakhir.

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- a. Rasio *projected net revenue to projected debt service* harus melebihi 1, 2:1 untuk pinjaman penerusan yang berasal dari Bank Pembangunan Asia ("ADB").
- b. Pendanaan dari sumber internal (laba sebelum penyusutan dan biaya pendanaan) harus melebihi 20% dari rata-rata jumlah pengeluaran barang modal tahunan untuk pinjaman penerusan yang berasal dari ADB.

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perusahaan telah memenuhi ketentuan rasio-rasio tersebut di atas.

b. Obligasi dan wesel bayar

Obligasi dan wesel bayar	Mata uang	31 Maret 2022	31 Desember 2021
		Saldo terutang	Saldo terutang
Obligasi			
2015			
Seri A	Rp	2.200	2.200
Seri B	Rp	2.100	2.100
Seri C	Rp	1.200	1.200
Seri D	Rp	1.500	1.500
Jumlah		7.000	7.000
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(7)	(7)
Jumlah		6.993	6.993
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 19b)		(2.200)	(2.200)
Bagian jangka panjang		4.793	4.793

i. Obligasi

Tahun 2015

Obligasi	Pokok utang	Penerbit	Tempat pencatatan	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Seri A	2.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2022	Kuartalan	9,93%
Seri B	2.100	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2025	Kuartalan	10,25%
Seri C	1.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2030	Kuartalan	10,60%
Seri D	1.500	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2045	Kuartalan	11,00%
Total	7.000						

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 12b.x). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah Bahana, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank Permata.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 23 Juni 2015.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

i. Obligasi (lanjutan)

Tahun 2015 (lanjutan)

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk pengembangan usaha: *broadband, backbone, metro network, regional metro junction, information technology application and support*, dan akuisisi beberapa perusahaan baik dalam lingkup domestik maupun internasional.

Pada tanggal 31 Maret 2022, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA (*Triple A*).

Berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan, Perusahaan dipersyaratkan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

(a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.

(b) *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1.

(c) *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

c. Utang bank

Kreditur	Mata uang	31 Maret 2022		31 Desember 2021	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	7.515	-	7.500
Bank Mandiri	Rp	-	6.866	-	7.374
BRI	Rp	-	2.109	-	2.223
BSI	Rp	-	30	-	533
Sub-jumlah			16.520		17.630
Pihak ketiga					
BCA	Rp	-	7.542	-	8.651
Bank DBS	Rp	-	3.500	-	3.887
MUFG Bank	Rp	-	1.664	-	1.972
Bank Permata	Rp	-	1.188	-	1.188
HSBC	Rp	-	750	-	750
Bank Sindikasi	Rp	-	100	-	350
PT Bank ANZ Indonesia ("Bank ANZ")	US\$	20	293	24	338
UOB Singapore	Rp	-	264	-	286
UOB Singapore	US\$	18	251	22	314
Bank CIMB Niaga	Rp	-	197	-	194
BTPN	US\$	0	5	-	5
BTPN	Rp	-	65	-	84
PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC")	Rp	-	57	-	68
Bank of China	Rp	-	-	-	400
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	MYR	10	35	11	36
Sub-jumlah			15.911		18.523
Jumlah			32.431		36.153
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			(88)		(97)
			32.343		36.056
Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 19b)			(6.244)		(6.311)
Bagian jangka panjang			26.099		29.745

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

Informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan**
BNI								
2018	GSD	Rp	182	8	2020 - 2024	Bulanan	8,75%	Piutang usaha
2013 - 2021	Perusahaan, GSD, TLT, Sigma, Mitratel	Rp	11.505	427	2016 - 2033	Bulanan, Kuartalan	1 bulan JIBOR + 2,25% - 2,50%; 3 bulan JIBOR + 1,70% - 2,25%	Piutang usaha, persediaan, dan aset tetap
Bank Mandiri								
2018	Balebat	Rp	25	0	2018 - 2022	Bulanan	9,00%	Piutang usaha, persediaan, dan aset tetap
2017 - 2021	Perusahaan, GSD, Mitratel	Rp	7.193	407	2019 - 2027	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,5% - 1,85%	Tidak ada
BRI								
2017 - 2019	Perusahaan, Mitratel	Rp	3.200	109	2019 - 2026	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,70% - 1,85%	Tidak ada
BSI								
2019	SSI	Rp	60	3	2019 - 2024	Bulanan	10,00%	Aset tetap
BCA								
2020 - 2021	Perusahaan, Mitratel, PST	Rp	10.511	350	2020 - 2028	Kuartalan, Semesteran	3 bulan JIBOR + 1,50% - 1,75%	Piutang usaha dan aset tetap
DBS								
2021	Mitratel	Rp	3.500	-	2023 - 2028	Semesteran	3 bulan JIBOR + 1,70%	Aset tetap
MUFG Bank								
2018 - 2021	Mitratel	Rp	2.800	22	2018 - 2028	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,43% - 2,40%	Aset tetap
Bank Permata								
2020 - 2021	Mitratel	Rp	1.250	-	2021 - 2028	Semesteran	3 bulan JIBOR + 1,50% - 2,40%	Aset tetap
HSBC								
2021	Mitratel	Rp	750	-	2023 - 2028	Semesteran	3 bulan JIBOR + 1,5%	Aset tetap
Bank Sindikasi								
2021	Perusahaan	Rp	5.000	500	2022 - 2028	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,5%	Tidak ada
2018	Telin	US\$	0,09	0,003	2019 - 2025	Semesteran	6 bulan LIBOR + 1,25%	Tidak ada
ANZ								
2015	GSD, PINS	Rp	440	22	2020 - 2025	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,4%	Tidak ada
UOB Singapore								
2018	Telin	US\$	0,049	0,005	2019 - 2024	Semesteran	6 bulan LIBOR + 1,25%	Tidak ada

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

Informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan**
Bank CIMB Niaga								
2017 - 2019	GSD, PINS	Rp	700	21	2018 - 2025	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50% - 1,95%	Tidak ada
2021	Telin	US\$	0,055	-	2024 - 2029	Semesteran	6 bulan LIBOR + 1,70%	Tidak ada
BTPN								
2019 - 2020	Telin, Admedika	Rp	189	5	2020 - 2025	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,435% - 2,00%	Tidak ada
ICBC								
2017	GSD	Rp	272	11	2017 - 2024	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,36%	Piutang usaha dan aset tetap

* Disajikan dalam mata uang asal

** Lihat Catatan 5, Catatan 7, dan Catatan 12 untuk piutang usaha, persediaan, dan aset tetap yang dijamin.

^a Telkomsel tidak memberikan jaminan apa pun atas setiap pinjaman atau fasilitas kredit lainnya. Persyaratan dari berbagai pinjaman antara Telkomsel dengan krediturnya dan penyedia dana, mengharuskan ketaatan terhadap sejumlah jaminan dan larangan termasuk persyaratan keuangan dan lainnya, diantaranya pembatasan atas jumlah dividen dan bentuk distribusi laba lainnya yang dapat berdampak buruk pada kemampuan Telkomsel untuk memenuhi persyaratan dari fasilitas-fasilitas tersebut. Persyaratan dari perjanjian yang relevan juga meliputi klausul gagal bayar dan gagal bayar silang. Pada tanggal 31 Maret 2022, Telkomsel memenuhi persyaratan tersebut di atas.

Pada tanggal 24 Maret 2017, Perusahaan, Mitratel, Sigma, GSD, dan Telin menandatangani perjanjian kredit dengan BRI, BNI, dan Bank Mandiri dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp1.000 miliar, Rp2.005 miliar, dan Rp1.500 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, fasilitas yang tidak digunakan dari Bank Mandiri sebesar Rp5 miliar.

Pada tanggal 30 Maret 2017, Perusahaan, GSD, dan Metra menandatangani perjanjian kredit dengan Bank CIMB Niaga dengan jumlah fasilitas sebesar Rp495 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, fasilitas yang tidak digunakan dari Bank CIMB Niaga sebesar Rp20 miliar

Pada tanggal 26 Februari 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mandiri dengan jumlah fasilitas Perusahaan sebesar Rp775 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, semua fasilitas sudah digunakan.

Pada tanggal 26 Februari 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan BNI dengan jumlah fasilitas sebesar Rp825 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, semua fasilitas sudah digunakan.

Pada tanggal 27 Maret 2018 dan 23 Mei 2019, Perusahaan dan Mitratel menandatangani perjanjian kredit dengan MUFG Bank dan BRI, dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp800 miliar dan Rp200 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, semua fasilitas sudah digunakan.

Pada tanggal 15 Januari 2019, Perusahaan, Infomedia, Telin, Telkom Infra, Telkomsat, dan Sigma menandatangani perjanjian kredit dengan BTPN dengan jumlah fasilitas sebesar Rp628 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, fasilitas yang tidak digunakan dari BTPN sebesar Rp538 miliar.

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan BRI dengan jumlah fasilitas sebesar Rp2.000 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, semua fasilitas sudah digunakan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

Pada tanggal 19 Juni 2019, Perusahaan dan Mitratel menandatangani perjanjian dengan BNI dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp2.160 miliar dan Rp840 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, semua fasilitas sudah digunakan.

Pada tanggal 12 Maret 2020, Perusahaan, GSD, dan PINS menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan Bank ANZ dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp240 miliar dan Rp200 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, semua fasilitas sudah digunakan.

Pada tanggal 16 November 2020, Perusahaan, Mitratel, dan GSD menandatangani perubahan perjanjian dengan Bank Mandiri dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp1.400 miliar, Rp1.113 miliar, dan Rp200 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, fasilitas yang tidak digunakan dari Bank Mandiri sebesar Rp136 miliar.

Pada tanggal 4 Desember 2020, Perusahaan dan Admedika menandatangani perjanjian kredit dengan BTPN dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp1.500 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, fasilitas yang tidak digunakan dari BTPN sebesar Rp1.480 miliar.

Pada tanggal 18 Januari 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan BRI dengan jumlah fasilitas sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, semua fasilitas belum digunakan.

Pada tanggal 28 Januari 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan bank sindikasi (Mandiri dan BNI) dengan jumlah fasilitas sebesar Rp5.000 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, fasilitas yang belum digunakan dari Bank Sindikasi sebesar Rp4.900 miliar.

Pada tanggal 28 Oktober 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan BCA dengan jumlah fasilitas sebesar Rp6.000 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, fasilitas yang belum digunakan dari BCA sebesar Rp1.000 miliar.

Pada tanggal 17 November 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mandiri dengan jumlah fasilitas sebesar Rp2.400 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, semua fasilitas sudah digunakan.

Pada tanggal 22 November 2021, Perusahaan, PINS, dan GSD menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan Bank CIMB Niaga dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp500 miliar, Rp300 miliar, dan Rp200 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, fasilitas yang belum digunakan dari Bank CIMB Niaga sebesar Rp796,6 miliar.

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan perolehan utang baru, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup telah memperoleh persetujuan (*waiver*) dari pemberi pinjaman atas tidak terpenuhinya rasio-rasio keuangan untuk posisi keuangan Telkom Infra, Sigma dan GSD. *Waiver* dari BNI, BCA, Bank DBS, HSBC, Bank Mandiri, dan ICBC masing-masing diterima pada tanggal 29 November 2021, 16 Desember 2021, 15 Desember 2021, 22 Desember 2021, 30 Desember 2021, dan 31 Desember 2021. Pada tanggal 31 Maret 2022, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut, kecuali untuk pinjaman tertentu oleh Telkom Infra.

Fasilitas utang bank yang diperoleh Grup tersebut digunakan untuk keperluan pengembangan bisnis usaha dan keperluan investasi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

d. Pinjaman lainnya

Kreditur	Mata uang	Saldo terutang	
		31 Maret 2022	31 Desember 2021
PT Sarana Multi Infrastruktur	Rp	1.897	2.609
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(3)	(4)
Jumlah		1.894	2.605
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 19b)		(942)	(1.041)
Bagian jangka panjang		952	1.564

Informasi lain yang signifikan terkait pinjaman lainnya pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)	Jadwal pembayaran	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
PT Sarana Multi Infrastruktur							
14 November 2018	Perusahaan	Rp	1.000	-	Semesteran (2019 - 2023)	3 bulan JIBOR + 1,75%	Tidak ada
29 Maret 2019	Perusahaan	Rp	2.836	350	Semesteran (2020 - 2024)	3 bulan JIBOR + 1,75%	Tidak ada
29 Maret 2019	Telkomsat	Rp	164	11	Semesteran (2020 - 2024)	3 bulan JIBOR + 1,75%	Tidak ada

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan dan Telkomsat diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, di antaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- (a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1
- (b) *Net Debt to EBITDA* tidak lebih dari 4:1
- (c) *Debt service coverage* minimal 125%

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perusahaan dan Telkomsat telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

Pada tanggal 14 November 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dengan jumlah fasilitas sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, semua fasilitas sudah digunakan.

Pada tanggal 29 Maret 2019, Perusahaan dan telkomsat menandatangani perjanjian kredit dengan PT Sarana Multi Infrastruktur. Pada tanggal 15 Juni 2020, Perusahaan dan Telkomsat menandatangani amandemen perjanjian kredit dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp2.836 miliar dan Rp164 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2022, fasilitas yang tidak digunakan dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp106 miliar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Rincian kepentingan nonpengendali adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak:		
Telkomsel	15.454	13.804
Mitratel	9.596	9.464
GSD	224	226
Metra	165	157
Lainnya	97	102
Jumlah	<u>25.536</u>	<u>23.753</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) periode berjalan entitas anak:		
Telkomsel	1.605	2.382
Mitratel	129	-
Metra	10	(2)
GSD	(2)	(2)
Lainnya	(4)	(5)
Jumlah	<u>1.738</u>	<u>2.373</u>

Entitas anak dengan kepemilikan nonpengendali yang material

a. Telkomsel

Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, kepemilikan kepentingan nonpengendali yang dianggap material oleh Perusahaan adalah kepemilikan kepentingan nonpengendali atas Telkomsel sebesar 35% (Catatan 1d).

Ringkasan informasi keuangan Telkomsel di bawah ini disajikan berdasarkan nilai sebelum eliminasi saldo dan transaksi antar perusahaan.

Ringkasan laporan posisi keuangan:

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Aset lancar	14.281	12.288
Aset tidak lancar	86.994	89.014
Liabilitas jangka pendek	(34.300)	(31.654)
Liabilitas jangka panjang	(22.903)	(30.205)
Jumlah ekuitas	<u>44.072</u>	<u>39.443</u>
Yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	28.618	25.639
Kepentingan nonpengendali	15.454	13.804

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

Entitas anak dengan kepemilikan nonpengendali yang material (lanjutan)

a. Telkomsel (lanjutan)

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pendapatan	21.263	21.215
Beban operasi	(14.167)	(13.744)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	(1.186)	889
Laba sebelum pajak penghasilan	5.910	8.360
Beban pajak penghasilan - bersih	(1.326)	(1.636)
Laba periode berjalan	4.584	6.724
Rugi komprehensif lain - bersih	-	-
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	4.584	6.724
Distribusikan kepada kepentingan nonpengendali	1.605	2.382
Dividen yang dibayar kepada kepentingan nonpengendali	-	1.400

Ringkasan laporan arus kas:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Kegiatan operasi	12.434	12.911
Kegiatan investasi	(2.731)	(871)
Kegiatan pendanaan	(6.865)	(4.958)
Peningkatan bersih kas dan setara kas	2.838	7.082

b. Mitratel

Pada tanggal 22 November 2021, saham Mitratel telah tercatat di BEI sehingga terdapat kepemilikan kepentingan nonpengendali Perusahaan pada Mitratel. Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 kepemilikan kepentingan nonpengendali atas Mitratel sebesar 28,13% (Catatan 1d).

Ringkasan informasi keuangan Mitratel di bawah ini disajikan berdasarkan nilai sebelum eliminasi saldo dan transaksi antar perusahaan.

Ringkasan laporan posisi keuangan:

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Aset lancar	21.241	21.303
Aset tidak lancar	36.240	36.426
Liabilitas jangka pendek	(7.803)	(6.476)
Liabilitas jangka panjang	(15.571)	(17.607)
Jumlah ekuitas	34.107	33.646
Yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	24.511	24.182
Kepentingan nonpengendali	9.596	9.464

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

Entitas anak dengan kepemilikan nonpengendali yang material (lanjutan)

b. Mitratel (lanjutan)

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

	2022
Pendapatan	1.870
Beban operasi	(1.056)
(Beban) lain-lain - bersih	(42)
Laba sebelum beban pendanaan dan pajak	772
Beban pendanaan dan penghasilan keuangan	(153)
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	619
Beban pajak final	(95)
Laba sebelum pajak penghasilan	524
Beban pajak penghasilan - bersih	(64)
Laba periode berjalan	460
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - bersih	-
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	460
Distribusikan kepada kepentingan nonpengendali	129

Ringkasan laporan arus kas:

	2022
Kegiatan operasi	2.658
Kegiatan investasi	(572)
Kegiatan pendanaan	(2.580)
Penurunan bersih kas dan setara kas	(494)

22. MODAL SAHAM

Keterangan	31 Maret 2022		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham seri B			
Pemerintah	51.602.353.559	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	4.518.323.180	4,56	226
Direksi (Catatan 1b):			
Ririek Adriansyah	1.156.955	0	0
Budi Setyawan Wijaya	275.000	0	0
Afriwandi	42.500	0	0
Herlan Wijanarko	42.500	0	0
Heri Supriadi	40.000	0	0
Edi Witjara	32.500	0	0
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	42.939.950.405	43,35	2.147
Jumlah	99.062.216.600	100,00	4.953

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

Keterangan	31 Desember 2021		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham seri B			
Pemerintah	51.602.353.559	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	4.829.039.080	4,87	241
Direksi (Catatan 1b):			
Ririek Adriansyah	1.156.955	0	0
Budi Setyawan Wijaya	275.000	0	0
Afriwandi	42.500	0	0
Herlan Wijanarko	42.500	0	0
Heri Supriadi	40.000	0	0
Edi Witjara	32.500	0	0
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	42.629.234.505	43,04	2.132
Jumlah	99.062.216.600	100,00	4.953

*The Bank of New York Mellon Corporation bertindak sebagai lembaga penyimpanan untuk saham ADS Perusahaan.

Perusahaan hanya menerbitkan 1 saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun, dan mempunyai hak veto dalam RUPS Perusahaan berkaitan dengan pengangkatan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, penerbitan saham baru, serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

23. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

	31 Maret 2022	31 Desember 2021
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	636	611
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	386	386
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	5	3
Selisih transaksi akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	8.358	8.358
Komponen ekuitas lainnya	37	37
Jumlah	9.422	9.395

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

24. PENDAPATAN

2022	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain	Pendapatan konsolidasian
Pendapatan telepon						
Selular	3.185	-	-	7	-	3.192
Telepon tidak bergerak	-	201	155	45	-	401
Jumlah pendapatan telepon	3.185	201	155	52	-	3.593
Pendapatan Interkoneksi	63	-	-	2.070	-	2.133
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika						
Internet dan data seluler	15.996	-	-	-	-	15.996
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	-	128	1.515	575	-	2.218
SMS	1.145	-	9	-	-	1.154
Lain-lain	-	-	395	199	48	642
Jumlah pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	17.141	128	1.919	774	48	20.010
Pendapatan jaringan	1	-	320	216	-	537
Pendapatan Indihome	-	6.165	686	-	-	6.851
Layanan lainnya						
Manage service dan terminal	-	-	348	5	-	353
Call center service	-	-	258	16	-	274
E-health	-	-	167	-	-	167
E-payment	-	-	80	-	-	80
Lain-lain	-	14	245	111	199	569
Jumlah layanan lainnya	-	14	1.098	132	199	1.443
Jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	20.390	6.508	4.178	3.244	247	34.567
Pendapatan dari transaksi lessor	-	-	-	641	-	641
Jumlah pendapatan	20.390	6.508	4.178	3.885	247	35.208
Penyesuaian dan eliminasi	-	-	1	(2)	(192)	-
Pendapatan eksternal sesuai yang disajikan di segmen operasi	20.390	6.508	4.179	3.883	55	-
2021	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain	Pendapatan konsolidasian
Pendapatan telepon						
Selular	3.854	-	-	26	-	3.880
Telepon tidak bergerak	-	238	187	46	-	471
Jumlah pendapatan telepon	3.854	238	187	72	-	4.351
Pendapatan Interkoneksi	103	-	-	1.723	-	1.826
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika						
Internet dan data seluler	15.530	-	-	-	-	15.530
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	-	-	1.593	493	-	2.086
SMS	894	-	8	-	-	902
Lain-lain	-	-	396	192	41	629
Jumlah pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	16.424	-	1.997	685	41	19.147
Pendapatan jaringan	1	-	187	168	-	356
Pendapatan Indihome	-	5.721	626	-	-	6.347
Layanan lainnya						
Manage service dan terminal	-	-	445	-	-	445
Call center service	-	-	184	19	-	203
E-health	-	-	146	-	-	146
E-payment	-	-	109	-	5	114
Lain-lain	-	20	216	81	93	410
Jumlah layanan lainnya	-	20	1.100	100	98	1.318
Jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	20.382	5.979	4.097	2.748	139	33.345
Pendapatan dari transaksi lessor	-	-	-	600	-	600
Jumlah pendapatan	20.382	5.979	4.097	3.348	139	33.945
Penyesuaian dan eliminasi	-	(6)	5	(1)	(92)	-
Pendapatan eksternal sesuai yang disajikan di segmen operasi	20.382	5.973	4.102	3.347	47	-

Manajemen mengharapkan bahwa sebagian besar transaksi yang dialokasikan untuk kontrak yang belum diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2022 akan diakui sebagai pendapatan selama periode-periode pelaporan berikutnya. Kewajiban pelaksanaan yang belum terpenuhi pada tanggal 31 Maret 2022, bagian yang diharapkan dapat direalisasi dalam satu tahun adalah sebesar Rp6.627 miliar dan bagian yang lebih dari satu tahun adalah sebesar Rp5.061 miliar.

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa yang tidak dapat dibatalkan sebagai lessor. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan. Sewa ini memiliki jangka waktu antara 1 hingga 10 tahun. Semua sewa termasuk klausul untuk memungkinkan revisi atas biaya sewa setiap tahun sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku. Penyewa juga diharuskan untuk memberikan jaminan nilai residu pada properti yang disewa.

Tidak ada pendapatan dari pelanggan utama yang melebihi 10% dari total pendapatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2022.

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. BEBAN KARYAWAN

Rincian dari beban karyawan adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Gaji dan tunjangan	2.106	2.015
Cuti, insentif, dan tunjangan lainnya	934	983
Beban pensiun berkala, bersih (Catatan 31)	319	331
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala, bersih (Catatan 31)	63	78
Beban penghargaan masa kerja (Catatan 32)	43	43
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Catatan 31)	39	34
Beban imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 31)	6	6
Beban imbalan tunjangan masa kerja (Catatan 31)	0	1
Lain-lain	6	9
Jumlah	3.516	3.500

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

26. BEBAN OPERASI, PEMELIHARAAN, DAN JASA TELEKOMUNIKASI

Rincian dari beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Operasi dan pemeliharaan	5.307	4.746
Beban pemakaian frekuensi radio (Catatan 36c.i)	1.599	1.454
Sewa sirkit dan CPE	675	935
Beban hak penyelenggaraan dan KPU	622	601
Listrik, gas, dan air	223	257
Beban pokok penjualan kartu SIM dan voucher (Catatan 7)	157	120
Manajemen proyek	131	111
Sewa kendaraan dan fasilitas pendukung	75	72
Asuransi	73	113
Beban pokok penjualan periferal (Catatan 7)	28	14
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	46	29
Jumlah	8.936	8.452

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian dari beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Beban umum	405	349
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	369	516
Jasa profesional	109	102
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	317	326
Jumlah	1.200	1.293

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Perusahaan:		
PPh		
Pasal 23 - Penyerahan jasa	81	81
PPN	480	601
Entitas anak:		
PPh		
PPh Badan	29	-
PPh 22 – Pembelian barang	2	-
Pasal 4 (2) - Pajak final	82	5
Pasal 23 - Penyerahan jasa	174	19
PPN	1.635	2.039
Jumlah pajak dibayar di muka	<u>2.483</u>	<u>2.745</u>
Bagian jangka pendek	(2.003)	(2.144)
Bagian jangka panjang (Catatan 14)	<u>480</u>	<u>601</u>

b. Tagihan restitusi pajak

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Perusahaan:		
PPh Badan	78	500
PPN	412	403
Entitas anak:		
PPh		
PPh Badan	767	662
Pasal 23 - Penyerahan jasa	17	17
PPN	451	596
Jumlah tagihan restitusi pajak	<u>1.725</u>	<u>2.178</u>
Bagian jangka pendek	(683)	(690)
Bagian jangka panjang (Catatan 14)	<u>1.042</u>	<u>1.488</u>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Utang pajak

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Perusahaan:		
PPh		
Pasal 4 (2) - Pajak final	26	53
Pasal 21 - PPh pribadi	45	97
Pasal 22 - Pembelian barang	3	8
Pasal 23 - Penyerahan jasa	31	47
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	211	211
Pasal 26 - PPh Wajib Pajak Luar Negeri	1	3
Pasal 29 - PPh Badan	496	455
PPN	687	505
PPN atas Pemungutan Pajak ("WAPU")	296	409
	<u>1.796</u>	<u>1.788</u>
Entitas anak:		
PPh		
Pasal 4 (2) - Pajak final	189	215
Pasal 21 - PPh pribadi	183	151
Pasal 22 - Pembelian barang	2	3
Pasal 23 - Penyerahan jasa	55	65
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	523	23
Pasal 26 - PPh Wajib Pajak Luar Negeri	12	14
Pasal 29 - PPh Badan	1.489	919
PPN	1.069	745
	<u>3.522</u>	<u>2.135</u>
Jumlah utang pajak	<u>5.318</u>	<u>3.923</u>

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Kini		
Perusahaan	752	572
Entitas anak	2.080	1.671
	<u>2.832</u>	<u>2.243</u>
Tangguhan		
Perusahaan	(246)	27
Entitas anak	(580)	159
	<u>(826)</u>	<u>186</u>
Beban pajak penghasilan bersih	<u>2.006</u>	<u>2.429</u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan estimasi laba kena pajak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	9.862	10.816
Penambahan kembali eliminasi konsolidasian	5.192	8.224
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dan eliminasi	15.054	19.040
Dikurangi: laba entitas anak sebelum pajak penghasilan	(8.574)	(11.192)
Laba sebelum pajak penghasilan sebelum dikurangi pajak penghasilan atas pajak final - Perusahaan	6.480	7.848
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(78)	(68)
Laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurangi penghasilan atas pajak final - Perusahaan	6.402	7.780

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

- d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut (lanjutan):

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan estimasi laba kena pajak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Perbedaan temporer:		
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	385	12
Provisi imbalan karyawan	375	132
Hak atas tanah, aset tak berwujud dan aset lainnya	6	-
Pendapatan instalasi tanggungan	112	52
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	119	(208)
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	(19)	(10)
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	34	-
Sewa	(1)	(1)
Kapitalisasi biaya kontrak	33	-
Penyisihan lain-lain	-	92
Jumlah perbedaan temporer bersih	<u>1.044</u>	<u>69</u>
Perbedaan tetap:		
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala - bersih	63	78
Imbalan karyawan	49	45
Sumbangan	56	60
Beban untuk mendapatkan pendapatan obyektif PPh final	34	-
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan entitas anak	(3.752)	(5.088)
Pendapatan lain-lain dari hasil pemeriksaan pajak	11	-
Lain-lain	13	33
Jumlah perbedaan tetap bersih	<u>(3.526)</u>	<u>(4.872)</u>
Penghasilan kena pajak - Perusahaan	<u>3.920</u>	<u>2.977</u>
Beban pajak penghasilan kini	745	566
Beban pajak penghasilan final	7	6
Jumlah beban pajak penghasilan kini - Perusahaan	<u>752</u>	<u>572</u>
Beban pajak penghasilan kini - entitas anak	2.080	1.671
Jumlah beban pajak penghasilan kini	<u>2.832</u>	<u>2.243</u>

Rekonsiliasi antara pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak perusahaan 19% terhadap laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurang pendapatan yang dikenakan pajak final dan beban pajak bersih pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	9.862	10.816
Dikurangi: pendapatan yang dikenakan pajak final - bersih konsolidasian	(2.634)	(2.194)
	<u>7.228</u>	<u>8.622</u>
Beban pajak penghasilan dihitung pada tarif Perusahaan	1.373	1.638
Perbedaan pada tarif pajak entitas anak	135	215
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	559	155
Beban pajak penghasilan final	-	6
Lain-lain	(61)	415
Beban pajak penghasilan bersih	<u>2.006</u>	<u>2.429</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

- d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut (lanjutan):

Pada bulan Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.2/2020, yang antara lain mengatur penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan 20% untuk tahun pajak 2022. Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan PP No. 30/2020 tentang Penurunan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, yang mengatur pemberian tarif pajak sebesar 3% lebih rendah untuk wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di BEI dengan jumlah paling sedikit 40% dari jumlah seluruh saham yang disetor perusahaan dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham, di mana kepemilikan masing-masing tidak boleh melebihi 5%. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun fiskal, dan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Perusahaan telah memenuhi seluruh kriteria yang telah dipersyaratkan, sehingga untuk perhitungan beban pajak kini dan pajak tangguhan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan menurunkan tarif pajak sebesar 3%.

Pada bulan Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam ayat (1) huruf b Pasal 17 Bab III Pajak Penghasilan Undang-Undang No. 7/2021 diatur bahwa tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022, dan bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif seharusnya.

Perusahaan menerapkan tarif pajak PPh Badan sebesar 19% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Entitas anak menerapkan tarif pajak sebesar 22% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Perusahaan akan menyampaikan perhitungan penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini di atas dalam SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun fiskal 2021 kepada Otoritas Pajak dan dilaporkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

- e. Pemeriksaan pajak

- (i) Perusahaan

PPh dan PPN Tahun 2012

Pada tanggal 3 November 2016 Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") untuk seluruh jenis pajak dengan total nilai Rp1.820,3 miliar (termasuk denda Rp592,4 miliar) dan Surat Tagihan Pajak ("STP") PPN senilai Rp37,5 miliar. Perusahaan telah menyetujui hasil pemeriksaan PPN sebesar Rp35,2 miliar, sebesar Rp613,3 juta atas Pajak Penghasilan Badan, dan sebesar Rp311,5 juta atas Pajak Penghasilan Pasal 26 dan telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2016.

Pada tanggal 16 November 2016, Perusahaan telah mengajukan keberatan atas sebagian hasil pemeriksaan tersebut. Selama tahun 2017, Perusahaan menerima surat keputusan atas keberatan dari Otoritas Pajak. Pada tanggal 17 dan 26 Januari 2018, Perusahaan mengajukan banding.

Pada tanggal 16 Desember 2019, Perusahaan menerima putusan banding semua jenis pajak tahun 2012 di mana Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan Perusahaan sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk seluruh jenis pajak meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Badan, dan PPN senilai Rp82,9 miliar (termasuk denda Rp27 miliar). Perusahaan telah menerima seluruh Salinan Putusan Banding tersebut dan telah melakukan pembayaran.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

PPH dan PPN Tahun 2012 (lanjutan)

Pada tanggal 6 Juli 2020, Perusahaan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Otoritas Pajak mengajukan Peninjauan Kembali untuk seluruh Putusan Banding atas seluruh sengketa pajak tahun 2012. Pada tanggal 30 Juli 2020, Perusahaan telah merespon dengan mengirimkan Kontra Memori Peninjauan Kembali untuk seluruh sengketa pajak tahun 2012.

Pada bulan Februari dan Maret 2021, Perusahaan telah menerima hasil putusan atas proses peninjauan kembali sengketa PPN masa pajak bulan Maret dan Oktober 2012. Pada Oktober 2021, Mahkamah Agung ("MA") mengumumkan penolakan uji materiil PPN Masa Pajak Januari dan Mei 2012 yang diajukan DJP. MA mengumumkan penolakan untuk peninjauan kembali. Sehubungan dengan itu, dari seluruh perkara peninjauan kembali di MA untuk semua jenis pajak tahun 2012, Perusahaan telah menerima seluruh putusan yang bersifat final dan mengikat dari MA.

PPH dan PPN Tahun 2015

Pada tanggal 25 April 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") PPh Badan senilai Rp147 miliar, SKPKB PPN senilai Rp13 miliar (termasuk denda Rp4,1 miliar), SKPKB PPN WAPU senilai Rp6 miliar (termasuk denda Rp1,5 miliar), dan SKPKB PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp55,3 miliar (termasuk denda Rp16,8 miliar). Perusahaan juga menerima STP atas PPN senilai Rp34 miliar, PPN WAPU senilai Rp7 miliar, dan PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp8 miliar.

Perusahaan setuju untuk menerima putusan pemeriksaan senilai Rp17 miliar atas PPh Badan, mengalihkan perhitungan pajak atas realisasi ganti rugi migrasi Flexi senilai Rp42 miliar yang sebelumnya dilaporkan pada SPT PPh Badan tahun 2015 ke SPT PPh Badan tahun 2016.

Perusahaan juga menerima ketetapan kurang bayar PPN, kurang bayar PPN WAPU, serta STP PPN WAPU senilai Rp26 miliar. Bagian yang telah diterima telah dibebankan pada laporan laba rugi dan komprehensif lain konsolidasian tahun 2017. Atas bagian yang tidak disetujui, pada tanggal 24 Juli 2017 Perusahaan mengajukan Surat Keberatan kepada Otoritas Pajak atas SKPLB PPh Badan senilai Rp210,5 miliar dan PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp55,3 miliar.

Pada tanggal 3 dan 22 Mei 2018, Otoritas Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan atas SKPLB PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar senilai Rp54,6 miliar dan mengabulkan seluruh keberatan yang diajukan Perusahaan. Perusahaan telah menyetujui hasil proses keberatan dari Otoritas Pajak atas SKPLB PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp793 juta dan telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2018. Pada tanggal 18 Juli 2018, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan atas SKPLB PPh Badan yang menambah jumlah pajak yang masih harus diterima senilai Rp76 miliar. Atas keputusan keberatan tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2018 Perusahaan mengajukan banding. Pada tanggal 8 Juli 2020, Perusahaan menerima putusan banding dari Pengadilan Pajak atas sengketa PPh Badan tahun 2015. Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan Perusahaan. Pada tanggal 9 September 2020, Perusahaan menerima pengembalian atas restitusi tambahan lebih bayar PPh Badan hasil putusan banding senilai Rp90,9 miliar.

Pada tanggal 26 Oktober 2020, Perusahaan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa DJP mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Banding atas sengketa PPh Badan tahun 2015. Pada tanggal 2 Desember 2020, Perusahaan mengajukan kontra memori peninjauan kembali sebagai jawaban atas permohonan peninjauan kembali tersebut. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, Perusahaan masih belum menerima hasil Putusan MA atas permohonan peninjauan kembali DJP tersebut. Dengan demikian untuk seluruh kewajiban pajak tahun 2015 selain jenis pajak PPh Badan dapat dianggap final dan berkekuatan hukum tetap karena pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini kewajiban pajak tahun 2015 tersebut telah melewati masa daluwarsa penetapan pajak sebagaimana ketentuan perundangan-undangan perpajakan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

PPH dan PPN tahun 2018

Pada tanggal 16 Desember 2020, Perusahaan menerima SKP dan STP atas hasil pemeriksaan *all taxes* tahun 2018. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB PPh Badan senilai Rp101,5 miliar, SKPKB PPh Pasal 21 senilai Rp1,9 miliar (termasuk denda Rp573,9 juta), SKPKB PPh Pasal 23 senilai Rp4 juta (termasuk denda Rp1,2 juta) dan SKPLB PPN Masa Januari s.d. Agustus dan Oktober s.d Desember senilai Rp85,3 miliar. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga menerbitkan SKPKB PPN Masa September senilai Rp240,5 miliar (termasuk denda Rp59,5 miliar), SKPKB PPN WAPU senilai Rp15,17 miliar (termasuk denda Rp4,6 miliar) dan STP PPN WAPU senilai Rp1,2 miliar. Perusahaan setuju untuk menerima koreksi pajak pemeriksa atas PPh Badan senilai Rp1,1 miliar, kurang bayar PPh Pasal 21 senilai Rp1,9 miliar, kurang bayar PPh 23 senilai Rp4 juta, kredit pajak PPN senilai Rp4,8 miliar, STP PPN WAPU senilai Rp1,2 miliar, kurang bayar PPN WAPU senilai Rp15,17 miliar. Koreksi yang telah disetujui telah dibebankan pada laporan laba rugi tahun 2020.

Perusahaan tidak menyetujui koreksi pemeriksa pajak yang mengenakan PPN atas transaksi penyerahan komponen *space segment* aset dalam konstruksi ("ADK") Satelit Merah Putih kepada TelkomSAT. Pada bulan Maret 2021, Perusahaan telah mengajukan surat keberatan pajak ke Otoritas Pajak atas koreksi pemeriksa pajak tersebut. Pada tanggal 4 Maret 2022 keberatan yang diajukan Perusahaan telah dikabulkan melalui surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-00253/KEB/PJ/WPJ.19/2022.

(ii) TelkomSEL

PPH dan PPN Tahun 2014

Pada tanggal 31 Mei 2019, TelkomSEL menerima SKPKB dan STP untuk tahun fiskal 2014 senilai Rp150,6 miliar (termasuk denda Rp54,6 miliar). TelkomSEL menerima atas bagian senilai Rp16,5 miliar dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 27 Juni 2019 dan dicatat sebagai beban lain-lain. Pada tanggal 20 Agustus 2019, TelkomSEL telah membayar sebesar Rp99,1 miliar dan mencatat sebagai tagihan restitusi pajak. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2019, TelkomSEL mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak senilai Rp134,1 miliar.

Pada tanggal 15 Juli dan 22 Juli 2020, TelkomSEL menerima surat keputusan keberatan dari Otoritas Pajak yang menerima sebesar Rp27,2 miliar dan menolak keberatan sebesar Rp106,8 miliar. Pada tanggal 27 Agustus 2020, TelkomSEL menerima sebagian restitusi pajak sebesar Rp27,2 miliar.

Pada tanggal 28 September 2020, TelkomSEL mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas PPh Badan, pajak penghasilan, dan PPN tahun 2014. Sampai dengan tanggal persetujuan dan otorisasi untuk penerbitan laporan keuangan ini, TelkomSEL belum menerima hasil putusan banding.

PPH dan PPN Tahun 2015

Pada tanggal 1 Agustus 2019, TelkomSEL menerima SKPKB dan STP untuk tahun fiskal 2015 senilai Rp384,8 miliar (termasuk denda Rp128,6 miliar) dan telah dibayar penuh pada tanggal 28 Agustus 2019. Atas nilai tagihan sebesar Rp34,6 miliar dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dan saldo tersisa senilai Rp350,2 miliar dicatat sebagai tagihan restitusi pajak. Pada tanggal 24 September 2019, TelkomSEL mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak senilai Rp350,2 miliar.

Pada tanggal 13 Juli 2020, TelkomSEL menerima surat keputusan keberatan dari Otoritas Pajak yang menolak semua keberatan Perusahaan.

Pada tanggal 28 September 2020, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas PPh Badan, pajak penghasilan, dan PPN tahun 2015. Sampai dengan tanggal persetujuan dan otorisasi untuk penerbitan laporan keuangan ini, TelkomSEL belum menerima hasil putusan banding.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

PPH dan PPN Tahun 2018

Pada tanggal 20 Februari 2020, Telkomsel menerima surat perintah pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2018. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pemeriksaan pajak masih dalam proses.

f. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	(Dibebankan) Dikreditkan ke laporan laba rugi	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya	Dibebankan ke ekuitas dan reklasifikasi	31 Maret 2022
Perusahaan					
Aset pajak tangguhan:					
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	895	73	-	-	968
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala-bersih	1.110	(4)	(1)	-	1.105
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	631	68	-	-	699
Provisi imbalan karyawan	388	71	-	-	459
Pendapatan instalasi tangguhan	183	21	-	-	204
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	22	(1)	-	-	21
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	72	6	-	-	78
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>3.301</u>	<u>234</u>	<u>(1)</u>	<u>-</u>	<u>3.534</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Sewa	(2)	6	-	-	4
Kapitalisasi biaya kontrak	(73)	6	-	-	(67)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(75)</u>	<u>12</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(63)</u>
Telkomsel					
Aset pajak tangguhan:					
Provisi imbalan karyawan	1.228	25	-	-	1.253
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	179	3	-	-	182
Sewa	675	214	-	-	889
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>2.082</u>	<u>242</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.324</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Pengukuran nilai wajar atas instrumen - instrumen keuangan	(549)	194	-	-	(355)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(1.623)	68	-	22	(1.533)
Amortisasi lisensi	(152)	0	-	-	(152)
Instrumen - instrumen keuangan lainnya	(92)	44	-	-	(48)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(2.416)</u>	<u>306</u>	<u>-</u>	<u>22</u>	<u>(2.088)</u>
Aset pajak tangguhan Perusahaan - bersih	<u>3.226</u>	<u>246</u>	<u>(1)</u>	<u>-</u>	<u>3.471</u>
Aset pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	598	26	-	-	624
Aset (liabilitas) pajak tangguhan Telkomsel - bersih	(334)	548	-	22	236
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	(824)	6	-	14	(804)
Aset pajak tangguhan - bersih	<u><u>3.824</u></u>				<u><u>4.095</u></u>
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	<u><u>(1.158)</u></u>				<u><u>(568)</u></u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2020	Perubahan tarif pajak	(Dibebankan) Dikreditkan ke laporan laba rugi	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya	Dibebankan ke ekuitas dan reklasifikasi	Akuisisi / kombinasi bisnis	31 Desember 2021
Perusahaan							
Aset pajak tangguhan:							
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	824	87	(16)	-	-	-	895
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala-bersih	1.204	117	17	(228)	-	-	1.110
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	414	(32)	249	-	-	-	631
Provisi imbalan karyawan	277	-	111	-	-	-	388
Pendapatan instalasi tangguhan	119	12	52	-	-	-	183
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	23	-	(1)	-	-	-	22
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	72	4	(4)	-	-	-	72
Jumlah aset pajak tangguhan	2.933	188	408	(228)	-	-	3.301
Liabilitas pajak tangguhan:							
Sewa	(3)	-	1	-	-	-	(2)
Kapitalisasi biaya kontrak	(90)	(8)	25	-	-	-	(73)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(93)	(8)	26	-	-	-	(75)
Telkomsel							
Aset pajak tangguhan:							
Provisi imbalan karyawan	1.079	59	69	21	-	-	1.228
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	282	14	(117)	-	-	-	179
Sewa	575	61	39	-	-	-	675
Jumlah aset pajak tangguhan	1.936	134	(9)	21	-	-	2.082
Liabilitas pajak tangguhan:							
Pengukuran nilai wajar							
atas instrumen-instrumen keuangan	-	-	(549)	-	-	-	(549)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(1.523)	(137)	37	-	-	-	(1.623)
Amortisasi lisensi	(124)	(11)	(17)	-	-	-	(152)
Instrumen-instrumen keuangan lainnya	(69)	-	(23)	-	-	-	(92)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(1.716)	(148)	(552)	-	-	-	(2.416)
Aset pajak tangguhan Perusahaan - bersih	2.840	180	434	(228)	-	-	3.226
Aset pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	518	64	16	-	-	-	598
Aset (liabilitas) pajak tangguhan Telkomsel - bersih	220	(14)	(561)	21	-	-	(334)
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	(561)	4	(297)	(6)	(3)	39	(824)
Aset pajak tangguhan - bersih	3.578						3.824
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(561)						(1.158)

Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, jumlah agregat perbedaan temporer yang terkait dengan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui adalah masing-masing sebesar Rp28.910 miliar dan Rp25.810 miliar.

Realisasi dari aset pajak tangguhan tergantung kepada kemampuan Grup dalam menghasilkan laba fiskal di masa depan. Meskipun tidak ada jaminan atas realisasi tersebut, Grup yakin bahwa kemungkinan besar aset pajak tangguhan tersebut akan terealisasi melalui pengurangan atas laba fiskal masa depan ketika perbedaan temporer terpulihkan. Jumlah aset pajak tangguhan tersebut diperkirakan dapat terealisasi, namun bisa berkurang jika laba fiskal di masa depan lebih kecil dari pada yang diestimasikan.

g. Administrasi

Sejak tahun 2008 s.d. 2019, secara berturut-turut Perusahaan berhak memperoleh insentif pengurangan tarif pajak sebesar 5% karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan PP No. 81 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 77 tahun 2013 dan diubah terakhir dengan PP No. 56 tahun 2015, serta PMK No. 238/PMK.03/2008. Selanjutnya Perusahaan juga berhak memperoleh insentif pengurangan tarif pajak sebesar 3% karena memenuhi persyaratan sesuai dengan PP No.30/2020. Berdasarkan hal tersebut untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan menghitung pajak tangguhannya dengan menggunakan tarif 19%.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Administrasi (lanjutan)

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa Perusahaan dan entitas anaknya dalam negeri menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012 sebagaimana telah diubah oleh PMK No. 136/PMK.03/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyeter, dan melaporkan PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("PPnBM") yang berlaku efektif pada 1 Juli 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang penunjukan kembali BUMN sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 34/PMK.010/2017 tanggal 1 Maret 2017. Perusahaan telah melakukan pemungutan, penyeteran, dan pelaporan PPN dan PPnBM serta PPh Pasal 22 sesuai dengan peraturan tersebut.

Pada bulan Mei 2019, Perusahaan ditetapkan sebagai PKP Berisiko Rendah melalui Keputusan DJP No.KEP-00080/WPJ.19/KP.04/2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2018 tanggal 12 April 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No.117/PMK.03/2019 tanggal 6 Agustus 2019, maka Perusahaan dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pada masa pandemi COVID-19, Pemerintah senantiasa melakukan *update* terhadap peraturan yang mengatur insentif perpajakan. Pada bulan Juli 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 ("PMK-86/2020") tanggal 16 Juli 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Dalam PMK-86/2020, Pemerintah melakukan perluasan Kode Lapangan Usaha ("KLU") Wajib Pajak yang berhak memanfaatkan insentif perpajakan dan memperpanjang periode insentif sampai dengan Desember 2020. Berdasarkan daftar KLU dalam lampiran PMK-86/2020, KLU Perusahaan termasuk sebagai penerima insentif PPh 21 Karyawan Ditanggung Pemerintah ("DTP").

Pada bulan Januari 2021, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 8/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyeteran, dan Pelaporan PPN atau PPnBM oleh Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") dan Perusahaan Tertentu Yang Dimiliki Secara Langsung oleh BUMN sebagai Pemungut PPN. Melalui PMK-8/2021, Pemerintah mengatur bahwa dalam hal terjadi penyerahan BKP dan/atau JKP oleh pemungut PPN kepada pemungut PPN yang merupakan BUMN atau Perusahaan Tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN, maka PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dipungut, diseter, dan dilaporkan oleh pemungut PPN yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Perusahaan telah melakukan penyesuaian sistem penerbitan faktur pajak dan perlakuan akuntansi sebagai implementasi atas ketentuan yang diatur dalam PMK-8/2021 tersebut.

Pada bulan Februari 2021, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 ("PMK-9/2021"). Melalui PMK-9/2021, Pemerintah memperpanjang periode insentif sampai dengan masa pajak Juni 2021. Pada bulan Juli 2021, Pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2021 ("PMK-82/2021") tentang Perubahan atas PMK No. 9/PMK.03/2021. Melalui PMK-82/2021, Pemerintah memperpanjang periode insentif sampai dengan masa pajak Desember 2021 untuk PPh Pasal 21 Karyawan DTP, PPh Final UMKM DTP, PPh Final Jasa Konstruksi DTP, pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan atas kelebihan bayar PPN, serta memperpanjang periode insentif sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 untuk pembebasan dari pemungutan PPh 22 Impor, terbatas pada wajib pajak yang memiliki KLU sesuai dengan lampiran PMK-82/2021. Berdasarkan daftar KLU dalam lampiran PMK-82/2021, KLU Perusahaan masih termasuk sebagai penerima insentif PPh Pasal 21 Karyawan Ditanggung Pemerintah ("DTP").

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Administrasi (lanjutan)

Pada bulan Oktober 2021, Pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 149/PMK.03/2021 ("PMK-149/2021") tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 9/PMK.02/2021 yang menambah daftar KLU penerima insentif dan memberikan perpanjangan periode penyampaian pembetulan laporan realisasi insentif.

Dengan demikian, sampai dengan masa pajak Desember 2021, karyawan Perusahaan masih berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 karyawan DTP atas karyawan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK-86/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK-149/2021.

Pada bulan Oktober 2021, Pemerintah juga menerbitkan Undang-undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam ayat (1) huruf a Pasal 17 Bab III diatur bahwa tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut: 5% untuk lapisan penghasilan sampai dengan 60 juta, 15% untuk lapisan penghasilan diatas 60 juta sampai dengan 250 juta, 25% untuk lapisan penghasilan diatas 250 juta sampai dengan 500 juta, 30% untuk lapisan penghasilan diatas 500 juta sampai dengan 5 miliar dan 35% untuk lapisan penghasilan diatas 5 miliar. Mulai 1 Januari 2022 Perusahaan menerapkan tarif pajak penghasilan atas penghasilan kena pajak karyawan sesuai peraturan tersebut.

Undang-Undang No. 7/2021 juga mengatur mengenai perubahan tarif PPN menjadi 11% yang akan diterapkan mulai tanggal 1 April 2022. Perusahaan memastikan kesiapan *surrounding billing system*, aspek administrasi dan legal atas transaksi, serta membangun koordinasi yang intensif antar unit yang terkait untuk mempersiapkan penerapan aturan tersebut.

29. LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp6.118 miliar dan Rp6.014 miliar dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sejumlah 99.062.216.600 masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021. Jumlah rata-rata tertimbang juga memperhitungkan rata-rata tertimbang atas dampak transaksi modal saham yang diperoleh kembali dalam perubahan transaksi pembelian saham kembali selama periode berjalan.

Laba per saham dasar masing-masing sejumlah Rp61,76 dan Rp60,71 (dalam jumlah penuh) untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021.

30. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., MKn., No. 37 tertanggal 28 Mei 2021, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas dan dividen kas spesial untuk tahun buku 2020 masing-masing sebesar Rp12.482 miliar (Rp126,01 per lembar saham) dan Rp4.161 miliar (Rp42,00 per lembar saham).

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Saldo laba dicadangkan Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp15.337 miliar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA

Rincian liabilitas manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>Catatan</u>	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya			
Pensiun			
Perusahaan - <i>funded</i>	31a.i.a		
Manfaat pasti	31a.i.a.i	4.894	4.891
Perusahaan - <i>unfunded</i>	31a.i.b	597	613
Telkomsel	31a.ii	4.306	4.188
Lainnya		4	3
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun		9.801	9.695
Imbalan kesehatan pasca kerja	31b	701	638
Imbalan pasca kerja lainnya	31c	294	300
Imbalan tunjangan masa kerja	31d	3	4
Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	31e	956	926
Jumlah		11.755	11.563

Beban manfaat pensiun yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Beban pensiun			
Perusahaan - <i>funded</i>	31a.i.a		
Manfaat pasti	31a.i.a.i	158	173
Manfaat tambahan	31a.i.a.ii	0	0
Perusahaan - <i>unfunded</i>	31a.i.b	15	18
Telkomsel	31a.ii	146	140
Beban pensiun berkala, bersih	25	319	331
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala, bersih	25,31b	63	78
Beban imbalan pasca kerja lainnya	25,31c	6	6
Beban imbalan tunjangan masa kerja	25,31d	0	1
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	25,31e	39	34
Jumlah		427	450

a. Beban manfaat pensiun

i. Perusahaan

(a) *Funded*

(i) Manfaat pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan tetap yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Program pensiun ini diatur di dalam undang-undang pensiun Indonesia dan dikelola oleh Dana Pensiun Telkom ("Dapen"). Pengelolaan Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dan Arahannya yang ditetapkan oleh Pendiri dilaksanakan oleh Dewan Pengurus. Dewan Pengurus diawasi oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari perwakilan Perusahaan dan peserta.

Manfaat pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok pada saat mulai pensiun dan masa kerja karyawan. Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun ini membayar kontribusi 18% (sebelum Maret 2003: 8,4%) dari gaji pokok ke dana pensiun. Perusahaan memberikan kontribusi kepada Dapen untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp155 miliar dan Rp226 miliar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

(a) *Funded* (lanjutan)

(i) Manfaat pasti (lanjutan)

Risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah risiko seperti volatilitas aset dan perubahan imbal hasil obligasi. Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah, jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program. Penurunan imbal hasil obligasi pemerintah akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara sebagian dengan kenaikan dari nilai obligasi program yang dimiliki. Perusahaan memastikan bahwa posisi investasi telah diatur dalam kerangka *asset-liability matching* ("ALM") yang telah dibentuk untuk mencapai hasil jangka panjang yang sejalan dengan liabilitas pada program pensiun imbalan pasti. Dalam kerangka ALM, tujuan Perusahaan adalah untuk menyesuaikan aset-aset dan liabilitas pensiun dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dalam menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal, dengan mempertimbangkan tingkat risikonya. Investasi pada program telah terdiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun, dan jumlah bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 untuk program pensiun manfaat pasti:

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	23.838	25.103
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	59	269
Beban bunga	402	1.577
Kontribusi peserta program pensiun	5	21
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	127	(1.462)
Pembayaran pensiun	(442)	(1.670)
Beban tambahan manfaat kesejahteraan	-	80
Pembayaran oleh Perusahaan	-	(80)
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir periode	<u>23.989</u>	<u>23.838</u>
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	18.947	19.546
Pendapatan bunga	321	1.223
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	127	(339)
Kontribusi pemberi kerja	155	226
Kontribusi peserta program pensiun	5	21
Pembayaran pensiun	(442)	(1.670)
Beban administrasi program	(18)	(60)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir periode	<u>19.095</u>	<u>18.947</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	<u>4.894</u>	<u>4.891</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

(a) *Funded* (lanjutan)

(i) Manfaat pasti (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, aset program terdiri dari:

	31 Maret 2022		31 Desember 2021	
	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian
Kas dan setara kas	942	-	762	-
Instrumen ekuitas:				
Keuangan	1.772	-	1.571	-
Barang konsumen primer	523	-	558	-
Bahan baku	310	-	300	-
Infrastruktur	788	-	838	-
Energi	155	-	118	-
Teknologi	39	-	43	-
Perindustrian	490	-	421	-
Barang konsumen non-primer	125	-	112	-
Properti dan <i>real estate</i>	143	-	143	-
Kesehatan	204	-	202	-
Transportasi dan logistik	19	-	16	-
Reksadana berbasis saham	489	-	321	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Obligasi korporasi	-	3.366	-	4.558
Obligasi pemerintah	7.591	-	7.736	-
RDPT	-	163	161	-
MTN	-	51	-	-
EBA	-	45	-	-
Sukuk	-	994	-	-
Saham non publik:				
Penempatan langsung	-	355	-	355
Properti	-	182	-	186
Lainnya	-	349	-	545
Jumlah	13.590	5.505	13.302	5.644

Aset program pensiun termasuk di dalamnya saham Seri B yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar Rp436 miliar dan Rp409 miliar, yang mewakili 2,28% dan 2,16% dari total aset program pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, dan obligasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar masing-masing senilai Rp351 miliar dan Rp356 miliar mewakili masing-masing 1,84% dan 1,88% dari total aset per tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021.

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp431 miliar dan Rp822 miliar masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 14 Januari 2014 mengenai kebijakan pendanaan Dapen, Perusahaan tidak akan memberikan kontribusi ke Dapen bila Rasio Kecukupan Pendanaan (RKD) Dapen di atas 105%. Berdasarkan laporan keuangan Dapen pada tanggal 31 Maret 2022, RKD Dapen di bawah 105% sehingga Perusahaan akan memberikan kontribusi pemberi kerja ke program pensiun manfaat pasti.

Pada tahun 2021, Perusahaan memberikan manfaat kesejahteraan tambahan kepada Pensiunan dan penerima manfaat pensiun dari peserta yang memasuki masa pensiun sebelum 30 Juni 2002 dengan total sebesar Rp80 miliar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

(a) *Funded* (lanjutan)

(i) Manfaat pasti (lanjutan)

Perubahan liabilitas diestimasi manfaat pensiun untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun (beban manfaat pensiun dibayar di muka) pada awal tahun	4.891	5.557
Beban pensiun berkala bersih	158	763
Kontribusi pemberi kerja	(155)	(226)
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	127	(1.462)
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(127)	339
Pembayaran manfaat oleh Perusahaan	-	(80)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	<u>4.894</u>	<u>4.891</u>

Komponen beban pensiun berkala bersih untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Beban jasa	59	67
Beban administrasi program	18	18
Beban bunga bersih	81	88
Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak	<u>158</u>	<u>173</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada periode berjalan	127	(635)
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(127)	635
Jumlah bersih	<u>-</u>	<u>-</u>

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, pada laporan masing-masing tertanggal 24 Maret 2022 dan 8 April 2021 yang dilakukan oleh KKA Santhi Devi dan Ardianto Handoyo, aktuaris independen yang berasosiasi dengan Willis Towers Watson ("WTW") (dahulu Towers Watson). Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Tingkat diskonto	7,00%	6,50%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2019

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

(a) *Funded* (lanjutan)

(ii) Manfaat Tambahan

Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 7 Juni 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dapen, Perusahaan membentuk dana manfaat tambahan yang bersumber dari hasil pengembangan program pensiun paling banyak 10%, dengan ketentuan Rasio Kecukupan Dana ("RKD") di atas 105% dan tingkat pengembalian investasi di atas suku bunga aktuarial untuk pendanaan.

Aset program untuk manfaat tambahan telah disisihkan sejak 2018 sesuai persetujuan Dewan Pengawas. Pada tanggal 31 Maret 2022, kewajiban manfaat tambahan telah dilunasi sepenuhnya kepada penerima pensiun dan tidak ada kewajiban tambahan yang disisihkan karena persyaratan pengakuan manfaat tambahan sebagaimana tersebut di atas belum terpenuhi.

(b) *Unfunded*

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan dan program pensiun iuran pasti untuk karyawannya.

Program pensiun iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"). Kontribusi Perusahaan kepada DPLK dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji karyawan di mana untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp12 miliar dan Rp44 miliar.

Sejak tahun 2007, Perusahaan memberlakukan manfaat pensiun berdasarkan penyeragaman bagi peserta sebelum 20 April 1992 dan peserta sejak 20 April 1992 yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun dihitung sejak 1 Februari 2009. Pada tahun 2010, Perusahaan menggantikan penyeragaman dengan Manfaat Pensiun Sekaligus ("MPS"). MPS diberikan bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, kematian, atau cacat sejak 1 Februari 2009.

Perusahaan juga menyelenggarakan manfaat bagi karyawan yang akan memasuki masa persiapan pensiun, di mana karyawan tidak aktif selama periode 6 bulan sebelum mencapai usia pensiun yakni 56 tahun yang disebut dengan Masa Persiapan Pensiun ("MPP"). Selama periode tersebut, karyawan tetap menerima manfaat-manfaat yang diselenggarakan bagi pegawai aktif, diantaranya termasuk, namun tidak terbatas pada gaji regular, kesehatan, cuti besar, bonus, dan manfaat-manfaat lainnya. Mulai tanggal 1 April 2012, karyawan harus mengajukan permohonan MPP terlebih dahulu dan tanpa permohonan maka dianggap tetap akan bekerja sampai dengan masa pensiun.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

(b) *Unfunded* (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan MPS dan MPP untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada awal periode	613	962
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	6	25
Beban bunga bersih	9	49
Laba aktuarial diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	(82)
Pembayaran manfaat oleh pemberi kerja	<u>(31)</u>	<u>(341)</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada akhir periode	<u>597</u>	<u>613</u>

Komponen beban manfaat pensiun untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Beban jasa	6	6
Beban bunga bersih	9	12
Jumlah beban manfaat pensiun	<u>15</u>	<u>18</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 masing-masing sebesar RpNihil.

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, pada laporan masing-masing tertanggal 24 Maret 2022 dan 8 April 2021 yang dilakukan oleh KKA Santhi Devi dan Ardianto Handoyo, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Tingkat diskonto	5,75%-7,00%	5,25%-6,50%
Tingkat kenaikan kompensasi	6,10%-8,00%	6,10%-8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2019

ii. Telkomsel

Telkomsel menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti bagi karyawannya. Berdasarkan program ini, karyawan berhak atas imbalan pensiun yang ditentukan berdasarkan gaji pokok terakhir atau gaji bersih yang diterima (tidak termasuk tunjangan fungsional) dan masa kerjanya. Program pensiun tersebut dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya"), perusahaan asuransi jiwa milik negara, melalui suatu kontrak asuransi anuitas. Hingga tahun 2004, karyawan berkontribusi pada program ini sebesar 5% dari gaji pokok bulanan mereka, sementara Telkomsel menanggung sisa besaran kontribusi yang diharuskan menurut program tersebut. Sejak tahun 2005, Telkomsel telah menanggung sepenuhnya besaran kontribusi tersebut.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSIIAN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

ii. Telkomsel (lanjutan)

Pada tahun 2020, karena kondisi keuangan Jiwasraya yang mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya kepada Telkomsel, Jiwasraya mengusulkan untuk merestrukturisasi program pensiun Telkomsel dengan mengalihkan 95% Nilai Tunai ("CV") kepada lembaga keuangan baru yang didirikan oleh pemerintah.

Hal ini menyebabkan Telkomsel mengubah pengakuan aset program yang sebelumnya sama dengan jumlah yang dijamin menjadi hanya 95% dari CV, sehingga selisihnya tidak dapat dipulihkan dan menyebabkan penurunan aset program pada tanggal 31 Desember 2020.

Pada tanggal 23 April 2021, Telkomsel dan Jiwasraya sepakat untuk mengakhiri kontrak program asuransi tersebut dan menandatangani perjanjian restrukturisasi. Perjanjian tersebut menggantikan program manfaat dari anuitas menjadi manfaat lumpsum. Berdasarkan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menentukan CV pada tanggal pengakhiran yang terbagi menjadi CV untuk peserta aktif dan peserta pasif masing-masing sebesar Rp857 miliar dan Rp73 miliar. Terdapat potongan 5% dari CV untuk peserta aktif, maka 95% dari Rp857 miliar (atau setara dengan Rp814 miliar) ditambah Rp73 miliar akan menjadi jumlah yang selanjutnya diambil alih oleh IFG Life pada saat perjanjian dengan IFG Life menjadi efektif dan karenanya, perjanjian restrukturisasi akan berakhir. Pada tanggal 31 Desember 2021, CV peserta aktif sebesar Rp832 miliar.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun, dan nilai bersih yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk program pensiun manfaat pasti:

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal periode	5.020	4.651
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	73	310
Beban bunga	73	299
Rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(28)	91
Pembayaran pensiun	-	(105)
Beban jasa lalu - amandemen program	-	(440)
Beban jasa lalu - kurtailmen	-	214
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir periode	<u>5.138</u>	<u>5.020</u>
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal periode	832	799
Pendapatan bunga	-	52
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	-	(19)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir periode	<u>832</u>	<u>832</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	<u>4.306</u>	<u>4.188</u>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSIIAN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

ii. Telkomsel (lanjutan)

Perubahan liabilitas diestimasi manfaat pensiun untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada awal periode	4.188	3.852
Beban manfaat pensiun	146	331
Rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(28)	91
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	-	19
Pembayaran pensiun	-	(105)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	<u>4.306</u>	<u>4.188</u>

Komponen biaya manfaat pensiun untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Beban jasa	73	78
Beban bunga bersih	73	62
Jumlah beban manfaat pensiun	<u>146</u>	<u>140</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 masing-masing sebesar RpNihil.

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dengan laporan tertanggal masing-masing 24 Maret 2022 dan 3 Maret 2021 yang dilakukan oleh KKA Santhi Devi dan Ardianto Handoyo, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Tingkat diskonto	7,00%	6,50%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2019

b. Imbalan kesehatan pasca kerja

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kesehatan pasca kerja untuk semua karyawannya yang sudah bekerja sebelum tanggal 1 November 1995 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih pada saat pensiun, dan anggota keluarganya yang memenuhi syarat. Ketentuan untuk masa kerja selama 20 tahun ini tidak berlaku bagi karyawan yang memasuki masa pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995. Program ini tidak berlaku bagi karyawan yang mulai bekerja pada Perusahaan sejak tanggal 1 November 1995. Program jaminan kesehatan pasca kerja tersebut dikelola oleh Yayasan Kesehatan Telkom ("Yakes Telkom").

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)

Program imbalan kesehatan pasca kerja iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 November 1995 atau karyawan dengan masa kerja kurang dari 20 tahun pada saat pensiun. Perusahaan tidak memberikan kontribusi ke Yakes Telkom untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja, perubahan aset program imbalan kesehatan pasca kerja, status pendanaan program imbalan kesehatan pasca kerja, dan jumlah bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021:

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Perubahan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja		
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal periode	13.416	14.443
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban bunga	245	955
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	124	(1.394)
Pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(164)	(588)
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir periode	13.621	13.416
Perubahan aset program		
Nilai wajar aset program pada awal periode	12.778	13.036
Pendapatan bunga	233	860
Pengembalian aset program (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	124	(362)
Pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(164)	(588)
Beban administrasi program	(51)	(168)
Nilai wajar aset program pada akhir periode	12.920	12.778
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir periode	701	638

Pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, aset program terdiri dari:

	<u>31 Maret 2022</u>		<u>31 Desember 2021</u>	
	<u>Harga kuotasian di pasar aktif</u>	<u>Tidak memiliki harga kuotasian</u>	<u>Harga kuotasian di pasar aktif</u>	<u>Tidak memiliki harga kuotasian</u>
Kas dan setara kas	727	-	527	-
Saham publik:				
Keuangan	1.285	-	1.254	-
Barang konsumen primer	95	-	100	-
Bahan baku	289	-	256	-
Infrastruktur	573	-	574	-
Energi	199	-	171	-
Teknologi	23	-	24	-
Perindustrian	303	-	274	-
Barang konsumen non-primer	433	-	483	-
Properti dan <i>real estate</i>	106	-	93	-
Kesehatan	215	-	232	-
Transportasi dan logistik	2	-	5	-
Reksadana berbasis ekuitas	708	-	569	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Reksadana pendapatan tetap	7.620	-	7.858	-
Saham non-publik:				
Penempatan privat	-	342	-	358
Jumlah	12.578	342	12.420	358

Aset program Yakes Telkom juga termasuk saham Seri B yang diterbitkan Perusahaan dengan nilai wajar sebesar Rp242 miliar dan Rp229 miliar yang merupakan 1,87% dan 1,79% dari keseluruhan aset program masing-masing pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp306 miliar dan Rp329 miliar masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Perubahan liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal periode	638	1.407
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala (Laba) rugi aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya	63	263
	(124)	(1.394)
Pengembalian aset program (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	124	362
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir periode	<u>701</u>	<u>638</u>

Komponen beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Beban administrasi program	51	54
Beban bunga bersih	12	24
Jumlah beban imbalan kesehatan pasca kerja	<u>63</u>	<u>78</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada periode berjalan	124	(556)
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(124)	556
Jumlah bersih	<u>-</u>	<u>-</u>

Penilaian aktuarial untuk program imbalan kesehatan pasca kerja dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 pada laporan masing-masing tertanggal 24 Maret 2022 dan 8 April 2021 yang dilakukan oleh KKA Santhi Devi dan Ardianto Handoyo, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Tingkat diskonto	7,50%	6,75%
Tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan	7,00%	7,00%
Tingkat tren beban kesehatan	7,00%	7,00%
Tahun tingkat tren beban kesehatan tercapai	2021	2020
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2019

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

c. Imbalan pasca kerja lainnya

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja lainnya dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan pada saat karyawan pensiun atau saat pemutusan hubungan kerja atau meninggal dunia. Imbalan pasca kerja lainnya tersebut adalah Biaya Fasilitas Perumahan Terakhir ("BFPT") dan Biaya Perjalanan Pensiun dan Purnabhakti ("BPP") dan Pesangon Meninggal Dunia ("Pesangon MD"). Pesangon MD diberikan kepada karyawan yang meninggal dunia dengan besaran sebanyak 12 kali gaji terakhir.

Perubahan liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

	31 Maret 2022	31 Desember 2021
Liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya pada awal periode	300	367
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa kini	2	7
Beban bunga bersih	4	16
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	(2)
Pembayaran manfaat oleh Perusahaan	(12)	(88)
Liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya pada akhir periode	294	300

Komponen beban imbalan pasca kerja lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021:

	2022	2021
Beban jasa kini	2	2
Beban bunga bersih	4	4
Jumlah beban imbalan pasca kerja lainnya	6	6

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 masing-masing sebesar RpNihil.

Penilaian aktuarial untuk program imbalan pasca kerja lainnya dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, pada laporan masing-masing tertanggal 24 Maret 2022 dan 8 April 2020 yang dilakukan oleh KKA Santhi Devi dan Ardianto Handoyo, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Tingkat diskonto	6,25%	5,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2019

d. Imbalan khusus masa kerja

Perusahaan memberikan Tunjangan Khusus Masa Kerja kepada karyawan dengan kriteria karyawan yang diangkat sebelum 1 Juli 2002 dan memiliki masa kerja lebih dari 30 tahun serta berakhir hubungan kerja setelah 19 September 2019. Jumlah tercatat liabilitas imbalan khusus masa kerja pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3 miliar dan Rp4 miliar. Beban tunjangan masa kerja yang dibebankan adalah sebesar Rp0,3 miliar dan Rp1 miliar masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

e. Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, Perusahaan dan entitas anak diharuskan untuk memberikan manfaat pensiun minimum, jika belum dipenuhi oleh program pensiun yang diselenggarakan, kepada para karyawannya yang mencapai usia pensiun. Jumlah tercatat liabilitas tambahan ini pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp956 miliar dan Rp926 miliar. Beban pensiun yang dibebankan adalah sebesar Rp39 miliar dan Rp34 miliar masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (Catatan 25).

f. Profil jatuh tempo atas liabilitas manfaat pasti

Waktu perkiraan pembayaran manfaat dan rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Jangka waktu	Perkiraan pembayaran manfaat					
	Perusahaan			Telkomsel	Imbalan kesehatan pasca kerja	Imbalan pasca kerja lainnya
	Manfaat pasti	Manfaat tambahan	Unfunded			
31 Maret 2022						
Dalam 10 tahun kedepan	20.367	-	660	4.224	5.795	345
Dalam 10-20 tahun	23.096	-	92	10.849	6.697	121
Dalam 20-30 tahun	21.308	-	85	8.385	5.117	92
Dalam 30-40 tahun	16.537	-	17	901	2.025	5
Dalam 40-50 tahun	3.965	-	-	-	259	-
Dalam 50-60 tahun	2.803	-	-	-	1	-
Dalam 60-70 tahun	16	-	-	-	-	-
Dalam 70-80 tahun	-	-	-	-	-	-
Rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti	10,50 tahun	10,50 tahun	5,75 tahun	10,30 tahun	14,13 tahun	4,88 tahun
31 Desember 2021						
Dalam 10 tahun kedepan	20.809	-	691	4.224	5.959	357
Dalam 10-20 tahun	23.096	-	92	10.849	6.697	121
Dalam 20-30 tahun	21.308	-	85	8.385	5.117	92
Dalam 30-40 tahun	16.537	-	17	901	2.025	5
Dalam 40-50 tahun	3.965	-	-	-	259	-
Dalam 50-60 tahun	2.803	-	-	-	1	-
Dalam 60-70 tahun	16	-	-	-	-	-
Dalam 70-80 tahun	-	-	-	-	-	-
Rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti	10,50 tahun	10,50 tahun	5,75 tahun	10,30 tahun	14,13 tahun	4,88 tahun

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

g. Analisis sensitivitas

Perubahan 1% pada tingkat diskonto dan tingkat gaji akan memberikan dampak atas liabilitas manfaat pasti pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

	<u>Tingkat diskonto</u>		<u>Tingkat gaji</u>	
	<u>Peningkatan 1%</u>	<u>Penurunan 1%</u>	<u>Peningkatan 1%</u>	<u>Penurunan 1%</u>
	<u>Jumlah peningkatan (penurunan)</u>		<u>Jumlah peningkatan (penurunan)</u>	
Sensitivitas				
31 Maret 2022				
Didanai:				
Manfaat pasti	(2.053)	2.434	1.581	(1.448)
Tidak didanai	(27)	30	33	(30)
Telkomsel	(372)	399	390	(368)
Imbalan kesehatan pasca kerja	(1.630)	1.994	2.016	(1.712)
Imbalan pasca kerja lainnya	(12)	14	-	-
31 Desember 2021				
Didanai:				
Manfaat pasti	(2.040)	2.419	1.571	(1.439)
Tidak didanai	(27)	30	33	(30)
Telkomsel	(434)	465	455	(429)
Imbalan kesehatan pasca kerja	(1.605)	1.964	1.985	(1.686)
Imbalan pasca kerja lainnya	(13)	14	-	-

Analisis sensitivitas dilakukan dengan menggunakan metode yang mengekstrapolasi dampak atas liabilitas manfaat pasti sebagai akibat perubahan atas asumsi utama yang muncul pada akhir tahun pelaporan.

Hasil sensitivitas tersebut di atas menentukan dampak secara individu atas liabilitas manfaat pasti masing-masing program pada akhir tahun. Dalam kenyataannya, setiap program bergantung pada beberapa hal eksternal lain yang dapat menyebabkan liabilitas manfaat pasti bergerak baik searah maupun berlawanan, dan sensitivitas setiap program dapat berubah secara bervariasi dari waktu ke waktu.

Tidak terdapat perubahan metode dan asumsi yang digunakan dalam menghitung analisis sensitivitas dari periode sebelumnya.

32. PENGHARGAAN MASA KERJA (“LONG SERVICE AWARDS” atau “LSA”)

Telkomsel dan Telkomsat memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu, termasuk LSA dan *Long Service Leaves* (“LSL”). LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

Liabilitas yang timbul sehubungan dengan penghargaan ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* sebesar Rp1.204 miliar dan Rp1.206 miliar masing-masing pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021. Manfaat yang dibebankan adalah sebesar Rp43 miliar dan Rp43 miliar masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (Catatan 25).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi

Rincian hubungan dan sifat akun/transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun/Transaksi
Pemerintah Menteri Keuangan	Pemegang saham utama	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, biaya pendanaan, dan investasi pada instrumen keuangan
BUMN	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban operasi, dan pembelian aset tetap
Indosat	Entitas sependengali	Pendapatan interkoneksi, pendapatan sewa jaringan, pendapatan atas penggunaan satelit transponder, beban interkoneksi, beban penggunaan fasilitas telekomunikasi, beban operasional dan pemeliharaan, dan beban atas penggunaan data jaringan sistem komunikasi
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
Bank milik negara Bank Mandiri	Entitas sependengali Entitas sependengali	Penghasilan pendanaan dan biaya pendanaan Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
BNI	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
BTN	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, dan penghasilan pendanaan
PT Taspen (Persero) ("Taspen")	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
Bahana TCW	Entitas sependengali	Reksa dana
PT Sarana Multi Infrastruktur	Entitas sependengali	Pinjaman lainnya dan biaya pendanaan
Tiphone	Entitas asosiasi	Distribusi kartu SIM dan voucher prabayar
Padi UMKM	Entitas berelasi lainnya	Beban jasa operasional dan pemeliharaan, beban pencairan piutang, beban pelatihan, beban pengamanan internal, beban pengembangan dan penelitian, beban cetak dan <i>printing</i> , beban rapat, beban umum dan administrasi lainnya, beban promosi, beban iklan, beban <i>fee</i> penjualan, beban <i>customer education</i> , dan beban pemasaran
Direksi	Personil manajemen kunci	Gaji dan fasilitas
Komisaris	Personil pengawas	Gaji dan fasilitas

Jumlah saldo dari piutang dan utang usaha pada akhir tahun bebas dari bunga dan penyelesaiannya akan terjadi dalam bentuk kas. Tidak ada jaminan yang disediakan atau diterima untuk setiap piutang dan utang usaha dengan pihak berelasi. Pada tanggal 31 Maret 2022, Grup mencatat kerugian penurunan nilai piutang usaha dari pihak berelasi sebesar Rp2 miliar. Penilaian ini dilakukan di setiap tahun dengan menilai status masa kini dari piutang yang ada dan historis penagihan piutang yang lalu.

b. Transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi

	2022		2021	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
Pendapatan				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	3	0,01	1	0,00
Entitas sependengali				
Indosat	280	0,80	312	0,92
Pertamina	184	0,52	151	0,44
BNI	127	0,36	133	0,39
BTN	76	0,22	49	0,14
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	431	1,22	468	1,38
Sub-jumlah	1.098	3,12	1.113	3,27
Entitas berelasi lainnya	14	0,04	39	0,11
Entitas asosiasi	6	0,02	6	0,02
Jumlah	1.121	3,19	1.159	3,40

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

	2022		2021	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
Beban				
Entitas sepengendali				
Indosat	139	0,58	130	0,58
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	127	0,53	817	3,64
Sub-jumlah	266	1,11	947	4,22
Entitas berelasi lainnya				
Padi UMKM	141	0,59	-	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	43	0,18	39	0,17
Sub-jumlah	184	0,77	39	0,17
Entitas asosiasi	36	0,15	85	0,38
Jumlah	486	2,03	1.071	4,77

	2022		2021	
	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan
Penghasilan pendanaan				
Entitas sepengendali				
Bank milik negara	121	60,50	98	64,05
Jumlah	121	60,50	98	64,05

	2022		2021	
	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan
Biaya pendanaan				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	3	0,32	5	0,51
Entitas sepengendali				
Bank milik negara	233	24,66	251	25,56
Sarana Multi Infrastruktur	34	3,60	69	7,03
Jumlah	270	28,58	325	33,10

	2022		2021	
	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian
Pembelian aset tetap				
Entitas sepengendali				
Jumlah	26	0,45	3	0,05
Jumlah	26	0,45	3	0,05

	2022		2021	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
Distribusi kartu SIM dan voucher				
Entitas asosiasi				
Tiphone	277	0,79	207	0,61
Jumlah	277	0,79	207	0,61

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Saldo akun dengan pihak berelasi (lanjutan)

	31 Maret 2022		31 Desember 2021	
	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas
Deposit pada pelanggan	19	0,02	19	0,01
Utang bank jangka pendek (Catatan 19)	1.346	1,07	1.578	1,20
Pinjaman penerusan (Catatan 20a)	327	0,26	355	0,27
Utang bank jangka panjang (Catatan 20c)	16.520	13,10	17.630	13,38
Pinjaman lainnya (Catatan 20d)	1.894	1,50	2.605	1,98

d. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi

i. Pemerintah

Perusahaan memperoleh pinjaman penerusan dari Pemerintah (Catatan 20a).

ii. Indosat

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada masyarakat.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Indosat antara jaringan telepon tidak bergerak (“*Public Switched Telephone Network*” atau “PSTN”) milik Perusahaan dan jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dalam rangka penyelenggaraan jasa Indosat *Multimedia Mobile* serta penyelesaian hak dan liabilitas interkoneksi terkait.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk interkoneksi jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dengan PSTN Perusahaan, yang memungkinkan pelanggan masing-masing perusahaan untuk melakukan panggilan domestik antara jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dan jaringan tidak bergerak Perusahaan, serta memungkinkan pelanggan Indosat untuk mengakses jasa SLI Perusahaan dengan menekan “007”.

Perusahaan selama ini menangani pembuatan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan kepada pelanggan untuk Indosat. Indosat secara bertahap akan mengambil alih kegiatan tersebut dan melakukan sendiri penerbitan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan secara langsung. Perusahaan menerima kompensasi dari Indosat yang dihitung sebesar 1% dari jumlah yang ditagih oleh Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995, ditambah dengan beban pemrosesan tagihan yang ditetapkan sebesar jumlah tertentu untuk setiap data (*record*). Pada tanggal 11 Desember 2008, Perusahaan dan Indosat sepakat untuk memberlakukan tarif biaya layanan SLI, besaran tarif tersebut telah memperhitungkan besaran kompensasi penerbitan kuitansi tagihan dan penagihan. Kesepakatan ini berlaku efektif di tahun berjalan dan berlaku selanjutnya sampai ada berita acara kesepakatan baru.

Pada tanggal 18 Desember 2017, Perusahaan dan Indosat menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh (“SLJJ”), dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi liabilitas tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 8 tahun 2006. Amandemen ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2018.

Telkomsel juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada pelanggan jaringan bergerak selular GSM.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

d. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

ii. Indosat (lanjutan)

Perusahaan menyediakan layanan sirkit langganan kepada Indosat dan entitas anaknya, yaitu PT Indosat Mega Media dan PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta"). Saluran ini dapat digunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, teleks, faksimili, atau jasa telekomunikasi lainnya.

Pada tanggal 14 Oktober 2019, Mitratel menandatangani SPA dengan Indosat terkait pembelian menara milik Indosat. Selain itu, disepakati juga penyewaan kembali oleh Indosat atas menara telekomunikasi yang diakuisisi oleh Mitratel yang ditandai dengan penandatanganan MTLA.

iii. Lain-lain

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Lintasarta untuk penggunaan transponder satelit atau kanal frekuensi satelit telekomunikasi sirkit langganan Perusahaan.

e. Remunerasi personil manajemen kunci dan pengawas

Personil manajemen kunci adalah Direksi Perusahaan dan personil pengawas adalah Dewan Komisaris.

Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk honor dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan imbalan kerja jangka pendek berupa gaji dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Direksi. Jumlah tunjangan tersebut adalah sebagai berikut:

	2022		2021	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
Direksi	105	0,44%	69	0,31%
Dewan Komisaris	43	0,18%	29	0,13%

Jumlah yang disajikan pada tabel di atas adalah jumlah yang diakui sebagai beban selama periode laporan keuangan.

34. SEGMENT OPERASI

Grup memiliki empat segmen utama yang dilaporkan, yaitu *mobile*, *consumer*, *enterprise*, dan *WIB*. Segmen *mobile* menyediakan produk *mobile voice*, *SMS*, *value added service*, dan *mobile broadband*. Segmen *consumer* menyediakan jasa Indihome (terdiri dari jasa telepon tidak bergerak, TV berbayar, dan internet), dan jasa telekomunikasi lainnya yang diberikan kepada pelanggan perumahan. Segmen *enterprise* menyediakan solusi *end-to-end* ke pelanggan korporat dan institusional. Segmen *WIB* menyediakan jasa interkoneksi, sewa sirkit, satelit, *Very Small Aperture Term* ("VSAT"), *broadband access*, teknologi informasi, data dan jasa internet yang diberikan ke operator telekomunikasi lainnya dan pelanggan internasional. Segmen lain-lain menyediakan produk *digital content* (*music* dan *game*), *big data*, *Business to Business* ("B2B") *Commerce*, serta *financial service* yang diberikan kepada pelanggan perusahaan maupun korporasi. Tidak terdapat segmen operasi yang digabungkan dalam menentukan laporan segmen.

Manajemen memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi usaha segmen yang diukur sesuai dengan laba atau rugi usaha dalam laporan keuangan konsolidasian. Namun demikian, kegiatan pendanaan dan pajak penghasilan tidak dievaluasi secara terpisah dan tidak dialokasikan ke segmen operasi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

34. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Pendapatan dan beban segmen meliputi juga transaksi antarsegmen operasi dan dinilai sebesar nilai yang dipercaya manajemen untuk merepresentasikan nilai pasar.

	2022					Total segmen	Penyesuaian dan eliminasi	Jumlah konsolidasian
	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain			
Hasil segmen								
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	20.390	6.508	4.179	3.883	55	35.015	193	35.208
Pendapatan antarsegmen	841	38	5.378	4.680	620	11.557	(11.557)	-
Jumlah pendapatan segmen	21.231	6.546	9.557	8.563	675	46.572	(11.364)	35.208
Hasil segmen	6.301	1.986	(34)	2.514	(196)	10.571	(709)	9.862
Informasi lain								
Pembelian barang modal	(2.915)	(1.295)	(840)	(662)	(0)	(5.712)	(23)	(5.735)
Penyusutan dan amortisasi	(5.172)	(1.719)	(931)	(1.266)	(4)	(9.092)	1.116	(7.976)
Provisi diakui selama periode berjalan	(25)	(101)	(279)	22	(1)	(384)	(19)	(403)

	2021					Total segmen	Penyesuaian dan Eliminasi	Jumlah konsolidasian
	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain			
Hasil segmen								
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	20.382	5.973	4.102	3.347	47	33.851	94	33.945
Pendapatan antar segmen	831	215	4.826	4.134	488	10.494	(10.494)	-
Jumlah pendapatan segmen	21.213	6.188	8.928	7.481	535	44.345	(10.400)	33.945
Hasil segmen	7.422	1.878	(439)	2.222	58	11.141	(325)	10.816
Informasi lain								
Pembelian barang modal	(2.189)	(1.275)	(908)	(1.357)	(1)	(5.730)	(3)	(5.733)
Penyusutan dan amortisasi	(5.031)	(1.082)	(869)	(1.106)	(4)	(8.092)	806	(7.286)
Provisi diakui selama periode berjalan	(108)	(111)	(135)	10	(3)	(347)	(145)	(492)

Penyesuaian dan eliminasi:

a. Rekonsiliasi pendapatan:

	2022	2021
Jumlah pendapatan segmen	46.572	44.345
Pendapatan dari segmen non-operasi lainnya	193	94
Eliminasi antarsegmen	(11.557)	(10.494)
Pendapatan konsolidasi	35.208	33.945

b. Rekonsiliasi hasil segmen:

	2022	2021
Jumlah hasil segmen	10.571	11.141
Rugi usaha dari segmen non-operasi lainnya	(400)	(251)
Penyesuaian dan eliminasi antarsegmen	440	809
Penghasilan pendanaan	200	153
Biaya pendanaan	(945)	(982)
Rugi bersih entitas asosiasi	(4)	(54)
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasi	9.862	10.816

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Penyesuaian dan eliminasi (lanjutan):

c. Rekonsiliasi pembelian barang modal:

	2022	2021
Jumlah pembelian barang modal segmen	(5.712)	(5.730)
Pembelian barang modal dari segmen non-operasi lainnya	(23)	(3)
Pembelian barang modal konsolidasi	(5.735)	(5.733)

d. Rekonsiliasi penyusutan dan amortisasi:

	2022	2021
Jumlah penyusutan dan amortisasi segmen	(9.092)	(8.092)
Penyusutan dan amortisasi dari segmen non-operasi lainnya	(67)	(67)
Penyesuaian dan eliminasi antarsegmen	1.183	873
Penyusutan dan amortisasi konsolidasi	(7.976)	(7.286)

e. Rekonsiliasi provisi diakui selama periode berjalan:

	2022	2021
Jumlah provisi diakui segmen	(384)	(347)
Provisi diakui selama periode berjalan dari segmen non-operasi lainnya	(3)	(8)
Penyesuaian dan eliminasi antarsegmen	(16)	(137)
Provisi yang diakui selama periode berjalan konsolidasian	(403)	(492)

Informasi geografis:

Informasi pendapatan di bawah berdasarkan lokasi unit bisnis.

	2022	2021
Pendapatan eksternal		
Indonesia	33.288	32.401
Luar negeri	1.920	1.544
Jumlah	35.208	33.945

Aset operasional tidak lancar untuk tujuan segmen ini terdiri dari aset tetap dan aset takberwujud.

	31 Maret 2022	31 Desember 2021
Aset operasional tidak lancar		
Indonesia	168.990	169.823
Luar negeri	2.684	2.709
Jumlah	171.674	172.532

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

35. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan jenis tarif, struktur, dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

a. Tarif telepon tidak bergerak

Pemerintah telah mengeluarkan formula penyesuaian tarif yang diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 15/PER/M.KOMINFO/4/2008 tanggal 30 April 2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang Disalurkan melalui Jaringan Tetap". Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 09/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Berdasarkan peraturan tersebut, struktur tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri dari:

- i. Biaya aktivasi
- ii. Biaya berlangganan
- iii. Biaya penggunaan
- iv. Biaya fasilitas tambahan.

b. Tarif telepon selular

Pada tanggal 31 Maret 2021, Menkominfo mengeluarkan Peraturan Menkominfo No. 5/2021 yang memberikan pedoman penetapan tarif selular dengan formula yang terdiri dari biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan ritel.

Berdasarkan peraturan Menkominfo No. 5/2021, tarif selular untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang terhubung melalui jaringan selular bergerak terdiri dari:

- i. Tarif jasa teleponi dasar
- ii. Tarif jelajah, dan/atau
- iii. Tarif jasa multimedia

dengan struktur tarif sebagai berikut:

- i. Biaya aktivasi
- ii. Biaya berlangganan bulanan, dan
- iii. Biaya penggunaan.

c. Tarif interkoneksi

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("BRTI"), dalam suratnya No. 262/BRTI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, memutuskan untuk mengubah tarif interkoneksi SMS menjadi berbasis biaya dengan tarif maksimal sebesar Rp23 per SMS efektif sejak tanggal 1 Juni 2012 dan berlaku untuk seluruh operator penyelenggara telekomunikasi.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tanggal 30 Januari 2014, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika memutuskan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru yang berlaku efektif sejak 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat dievaluasi setiap tahun oleh BRTI. Sebagai tindak lanjut, Perusahaan dan Telkomsel diminta untuk menyampaikan usulan Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") kepada BRTI untuk dievaluasi.

Selanjutnya, BRTI melalui suratnya No. 60/BRTI/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 dan No. 125/BRTI/IV/2014 tanggal 24 April 2014 menyetujui revisi DPI Telkomsel dan Perusahaan terkait tarif interkoneksi. Melalui surat tersebut, BRTI juga menyetujui perubahan tarif interkoneksi SMS menjadi Rp24 per SMS.

Pada tanggal 18 Januari 2017, BRTI melalui suratnya No. 20/BRTI/DPI/II/2017 dan No. 21/BRTI/DPI/II/2017, memutuskan untuk tetap memberlakukan tarif interkoneksi sesuai dengan DPI Perusahaan dan Telkomsel tahun 2014 sampai dengan tarif interkoneksi yang baru ditetapkan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

d. Tarif sewa jaringan

Berdasarkan peraturan Menkominfo No.5/2021, Pemerintah mengatur bentuk, jenis, struktur dan perhitungan tarif untuk jasa yang berhubungan dengan sewa jaringan. Selanjutnya, pada tahun 2008 Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Indonesia menerbitkan peraturan No.115 tahun 2008 yang mengatur tentang Perjanjian Dokumen Jenis Layanan Sewa Jaringan, Tarif Layanan Sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan, dan Penyediaan Prosedur Layanan Sewa Jaringan yang Dimiliki oleh Penyedia Layanan Sewa Jaringan Dominan sesuai dengan usulan Perusahaan.

e. Tarif jasa lainnya

Tarif sewa satelit, jasa teleponi, dan multimedia lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya.

36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Pembelian barang modal

Pada tanggal 31 Maret 2022, jumlah ikatan pembelian barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan dan instalasi untuk keperluan data, internet, dan jasa teknologi dan informatika, selular, peralatan transmisi, dan jaringan kabel adalah sebagai berikut:

Mata uang	Jumlah dalam mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Rupiah	-	8.708
Dolar A.S.	42	600
EUR	0,30	5
HKD	0,83	2
Jumlah		9.315

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

(i) Perusahaan

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Perusahaan, Telin, dan NEC Corporation	12 Mei 2016	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut ("SKKL") <i>Indonesia Global Gateway</i>
Perusahaan dan PT ZTE Indonesia	16 Desember 2019	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan <i>Dual Wavelength Division Multiplexing ("DWDM")</i> dan <i>Optical Transport Network ("OTN") Platform ZTE</i>
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	12 November 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM dan OTN <i>Platform Huawei - OLO MPLS</i>
Perusahaan dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia	19 Mei 2021	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node - B
Perusahaan dan PT Lintas Teknologi Indonesia	21 Mei 2021	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM <i>Platform Nokia</i>
Perusahaan dan PT Datacomm Diangraha	4 Agustus 2021	Pengadaan dan Pemasangan DWDM Ekspan Metro Ethernet <i>Platform Nokia</i>
Perusahaan dan PT Lintas Teknologi Indonesia	26 Oktober 2021	Pengadaan dan Pemasangan DWDM <i>Platform Nokia</i> Kebutuhan OLO, IPBB, TRUNK
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	3 November 2021	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspan Metro Ethernet <i>Platform Huawei</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

(ii) Telkomsel

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Telkomsel dan PT WT Indonesia	7 Juni 2018	Perjanjian Pengembangan dan Pengadaan OSDSS Solution
Telkomsel, PT Nokia Solutions and Networks Indonesia, dan NSN Oy	24 Mei 2019	Perjanjian Pengadaan Combined 2G and 3G CS Core Network Rollout, telah diamandemen menjadi CS Core System ROA dan TSA
Telkomsel, PT Sigma Solusi Integrasi, Oracle Corporation, dan PT Phincon	5 Juli 2019	Perjanjian untuk Development and Rollout Agreement ("DRA") dan Dukungan Teknik pada Customer Relationship Management ("CRM") Solution System Integrator
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, dan Ericsson AB	16 September 2019	Perjanjian Pengadaan Combined 2G and 3G CS Core Network, telah diamandemen menjadi CS Core System ROA dan TSA
Telkomsel dan PT Huawei Tech Investment	22 Oktober 2019	Perjanjian untuk Dukungan Teknik (TSA) untuk Pengadaan Gateway GPRS Support Node ("GGSN") Service Complex
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, PT Huawei Tech Investment, dan PT ZTE Indonesia	30 Januari 2021	Perjanjian Pengadaan Ultimate Radio Network Infrastructure ROA dan TSA
Telkomsel, PT NTT Indonesia Solutions, dan PT Huawei	31 Maret 2021	Perjanjian Pengadaan Mobile Network Router Infrastructure
Telkomsel, PT Sempurna Global Pratama, PT Lintas Teknologi Indonesia, dan PT Ericsson Indonesia	1 September 2021	Perjanjian Pengadaan GGSN (Virtualized EPC)
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company, dan PT Application Solutions	8 Oktober 2021	Perjanjian Online Charging System ("OCS") and Service Control Points ("SCP") System Solution Development
Telkomsel dan PT Application Solutions	8 Oktober 2021	Perjanjian Technical Support untuk Menyediakan Jasa Technical Support untuk OCS dan SCP
Telkomsel dan PT Lintas Teknologi Indonesia	8 Oktober 2021	Perjanjian Lisensi Piranti Lunak BI 2.0

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya

- (i) Pada tanggal 31 Maret 2022 Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi untuk jaminan penawaran (*tender bond*), pelaksanaan (*performance bond*), pemeliharaan (*maintenance bond*), setoran jaminan, dan uang muka (*advance payment bond*) berbagai proyek Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Kreditur	Jumlah fasilitas	Akhir periode fasilitas	Mata uang asal	Fasilitas yang digunakan
BRI	500	14 Juni 2022	Rp	58
BNI	500	31 Maret 2023	Rp	126
Bank Mandiri	500	23 Desember 2023	Rp	140
Jumlah	1.500			324

- (ii) Pada tanggal 31 Maret 2022, Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi untuk berbagai macam proyek sebagai berikut:

Kreditur	Jumlah fasilitas	Akhir periode fasilitas	Mata uang asal	Fasilitas yang digunakan
BRI	1.000	25 September 2022	Rp	591
BNI	2.100	11 Desember 2022	Rp	1.417
Jumlah	3.100			2.008

Fasilitas bank garansi dengan BRI dan BNI sebagian besar untuk *performance bond* dan *surety bond of radio frequency* (Catatan 36c.i)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya (lanjutan)

- (iii) Telin memiliki fasilitas bank garansi sebesar US\$15 juta atau setara dengan Rp216 miliar dari Bank Mandiri dan telah diperbaharui pada tanggal 23 Desember 2021 dengan batas kredit maksimum sebesar US\$25 juta atau setara dengan Rp359 miliar. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 23 Desember 2022. Pada tanggal 31 Maret 2022, Telin belum menggunakan fasilitas bank garansi tersebut.

c. Lainnya

i. Penggunaan frekuensi radio

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 tanggal 2 November 2015, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 76 tanggal 15 Desember 2010, Telkomsel harus membayar biaya penggunaan frekuensi radio tahunan untuk pita frekuensi 800 Megahertz ("MHz"), 900 MHz, dan 1800 MHz ditentukan menggunakan formula yang ditetapkan dalam Peraturan.

Sebagai penerapan atas Peraturan Pemerintah tersebut, Perusahaan dan Telkomsel telah membayar biaya penggunaan frekuensi radio tahunan sejak 2010.

Berdasarkan UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 dan Surat Keputusan No.109/TEL.01.02/2021 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 dari Menkominfo, yang mengubah Surat Keputusan No.018/TEL.01.02/2019 Tahun 2019 tanggal 11 Juni 2019, Menkominfo memberikan wewenang kepada Telkomsel untuk:

1. Layanan telekomunikasi bergerak dengan pita frekuensi radio di 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz; dan
2. Layanan telekomunikasi dasar.

Mengacu pada Surat Keputusan Menkominfo No. 445 Tahun 2021, No. 620 Tahun 2020, No. 806 Tahun 2019, No. 1896 Tahun 2017, Telkomsel diharuskan, antara lain untuk:

1. Membayar iuran tahunan Biaya Hak Penyelenggara ("BHP") yang dihitung berdasarkan formula tertentu selama jangka waktu lisensi (10 tahun) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan. BHP terutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPPI. Iuran tahunan BHP terutang sampai dengan berakhirnya periode lisensi.
2. Mengeluarkan setiap tahunnya *performance bond* sebesar Rp20 miliar dan *surety bond* sebesar Rp567 miliar pada tahun 2021 untuk pita frekuensi 2,1 GHz.
3. Mengeluarkan *surety bond* setiap tahunnya sebesar Rp1,03 triliun untuk pita frekuensi 2,3 GHz pada tahun 2021.
4. Mengeluarkan *surety bond* setiap tahunnya sebesar Rp360 miliar untuk pita frekuensi 2,3 GHz pada tahun 2021.

ii. Pembayaran sewa minimum masa depan sewa operasi

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi yang tidak dapat dibatalkan. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan dengan jangka waktu bervariasi berkisar 1 sampai dengan 10 tahun yang akan berakhir bervariasi antara tahun 2023 hingga 2032. Periode sewa menyewa dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian oleh kedua belah pihak.

Jumlah pembayaran dan penerimaan sewa minimum di masa yang akan datang untuk perjanjian sewa operasi adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2022	31 Desember 2021
Kurang dari 1 tahun	4.841	3.095
1-5 tahun	5.347	6.922
Lebih dari 5 tahun	4.693	4.732
Jumlah	14.881	14.749

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

iii. KPU

Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 17 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 yang menggantikan Surat Keputusan Menkominfo No. 45 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan sebelumnya yang terkait kebijakan program KPU. Peraturan tersebut mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi (dengan mempertimbangkan piutang tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau beban interkoneksi dan/atau beban ketersambungan dan/atau pendapatan yang tidak diperhitungkan sebagai pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi) untuk pengembangan KPU.

Selanjutnya, Peraturan Menkominfo No. 17 tahun 2016 tanggal 26 September 2016 digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 19 tahun 2016 yang berlaku pada tanggal 4 November 2016. Peraturan tersebut menetapkan bahwa kontribusi pengembangan KPU berlaku efektif untuk tahun 2016 dan seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 25 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015, dalam hal penyediaan akses dan layanan telekomunikasi di daerah pedesaan (Program KPU), penyedia dipilih melalui proses seleksi oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika ("BPPPTI"). BPPPTI menggantikan Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan ("BTIP") yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menkominfo No.18/PER/M.KOMINFO/11/2010 tanggal 19 November 2010. Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 3 tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018, BPPPTI berganti nama menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"). Berikutnya, Peraturan Menkominfo No. 25 tahun 2015 digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 10 tahun 2018.

Pada tanggal 27 Desember 2011, Telkomsel (atas nama Konsorsium Telkomsel, konsorsium yang dibentuk dengan Mitratel pada 9 Desember 2011) ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU di daerah perbatasan untuk semua paket (paket 1 - 13) dengan total harga sebesar Rp830 miliar. Pada tanggal tersebut, Telkomsel juga ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU (*Upgrading*) "Desa Pinter" atau "Desa Punya Internet" untuk paket 1, 2, dan 3 dengan total harga sebesar Rp261 miliar.

Pada tahun 2015, program tersebut dihentikan. Pada Januari 2016, Telkomsel mengajukan klaim arbitrase ke BANI terkait penyelesaian dari sisa piutang atas penyelenggaraan program tersebut.

Pada tanggal 22 Juni 2017, Telkomsel menerima surat keputusan BANI No. 792/1/ARB-BANI/2016 yang menginstruksikan BPPPTI untuk membayar kompensasi kepada Telkomsel sebesar Rp217 miliar, dan sampai penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini Telkomsel telah menerima pembayaran dari BAKTI sebesar Rp91 miliar (sebelum pajak) di tahun 2019 dan tidak ada pembayaran tambahan.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 827/KOMINFO/BAKTI.31/KS.1/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021 BAKTI memberikan kepada Telkomsel sebagai mitra kerjasama operasi ("KSO") untuk delapan paket KSO, yang meliputi Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Tengah, Papua Tengah Utara, dan Papua Timur Selatan untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2031.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2022			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	287,12	0,64	13,64	4.317
Aset keuangan lancar lainnya	11,35	-	-	163
Piutang usaha				
Pihak berelasi	0,08	-	-	2
Pihak ketiga	138,69	-	7,85	2.102
Piutang lain-lain	0,12	-	0,02	3
Aset lancar lainnya	0,38	-	0,54	14
Penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	906,91	-	8,5	13.142
Aset tidak lancar lainnya	2,40	-	0,69	44
Jumlah aset	<u>1.347,05</u>	<u>0,64</u>	<u>31,24</u>	<u>19.787</u>
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,01)	-	-	(0)
Pihak ketiga	(137,44)	(2,48)	(3,75)	(2.026)
Utang lain-lain	(3,53)	-	(1,77)	(77)
Biaya yang masih harus dibayar	(49,07)	(24,58)	(0,67)	(718)
Uang muka pelanggan	(0,17)	-	(0,08)	(3)
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(16,49)	(767,90)	(3,82)	(381)
Pinjaman jangka panjang dan pinjaman lainnya	(29,03)	(1.535,80)	(33,75)	(1.083)
Liabilitas lainnya	(0,08)	-	-	(1)
Jumlah liabilitas	<u>(235,82)</u>	<u>(2.330,76)</u>	<u>(43,84)</u>	<u>(4.289)</u>
Aset (liabilitas) bersih	<u>1.111,23</u>	<u>(2.330,12)</u>	<u>(12,60)</u>	<u>15.498</u>

	31 Desember 2021			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	274,23	0,73	16,45	4.142
Aset keuangan lancar lainnya	11,55	-	-	165
Piutang usaha				
Pihak berelasi	0,09	-	-	1
Pihak ketiga	112,56	-	6,33	1.696
Aset kontrak	34,25	-	-	489
Piutang lain-lain	0,28	-	0,06	6
Aset lancar lainnya	0,30	-	0,55	13
Penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	927,23	-	8,57	13.348
Aset tidak lancar lainnya	3,28	-	1,11	62
Jumlah aset	<u>1.363,77</u>	<u>0,73</u>	<u>33,07</u>	<u>19.922</u>
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,01)	-	-	(0)
Pihak ketiga	(105,54)	(2,37)	(5,60)	(1.586)
Utang lain-lain	(3,07)	-	(1,54)	(66)
Biaya yang masih harus dibayar	(47,23)	(7,82)	(2,03)	(703)
Uang muka pelanggan	(0,17)	-	(0,68)	(12)
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(17,16)	(767,90)	(4,42)	(402)
Pinjaman jangka panjang dan pinjaman lainnya	(37,14)	(1.535,80)	(34,51)	(1.212)
Liabilitas lainnya	(0,29)	-	-	(4)
Jumlah liabilitas	<u>(210,61)</u>	<u>(2.313,89)</u>	<u>(48,78)</u>	<u>(3.985)</u>
Aset (liabilitas) bersih	<u>1.153,16</u>	<u>(2.313,16)</u>	<u>(15,71)</u>	<u>15.937</u>

*Aset dan liabilitas dalam mata uang asing disajikan dalam setara Dolar A.S. dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh Reuters pada akhir tahun pelaporan.

Aktivitas Grup memiliki kemungkinan terhadap berbagai risiko keuangan termasuk dampak perubahan harga pasar surat utang dan efek, nilai tukar mata uang asing, dan tingkat bunga.

Jika Grup melaporkan aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Maret 2022 menggunakan kurs tanggal 9 Mei 2022, laba selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp163 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INSTRUMEN KEUANGAN

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

i. Klasifikasi

(a) Aset keuangan

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Biaya perolehan diamortisasi		
Kas dan setara kas	41.629	38.311
Aset keuangan lancar lainnya	907	415
Piutang usaha	9.495	8.510
Aset kontrak	2.436	2.473
Piutang lain-lain	216	195
Aset tidak lancar lainnya	162	151
Nilai wajar melalui laporan laba rugi		
Penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	13.447	13.661
Aset keuangan lancar lainnya	78	78
Jumlah aset keuangan	<u>68.370</u>	<u>63.794</u>

(b) Liabilitas keuangan

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi		
Utang usaha	15.895	17.170
Utang lain-lain	643	609
Beban yang masih harus dibayar	16.244	15.885
Deposit pada pelanggan	298	401
Utang bank jangka pendek	6.909	6.682
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	327	355
Obligasi dan wesel bayar	6.993	6.993
Utang bank jangka panjang	32.343	36.056
Liabilitas sewa	14.661	16.387
Pinjaman lainnya	1.894	2.605
Jumlah liabilitas keuangan	<u>96.207</u>	<u>103.143</u>

ii. Nilai wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan nilai buku dan nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan, selain dari itu nilai wajar instrumen keuangan dipertimbangkan mendekati nilai buku sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan:

	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
			Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
31 Maret 2022					
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					
Aset keuangan lancar lainnya	78	78	78	-	-
Penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	13.447	13.447	-	8.018	5.429
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi					
Pinjaman					
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	327	322	-	-	322
Obligasi dan wesel bayar	6.993	7.904	7.904	-	-
Utang bank jangka panjang	32.343	32.507	-	-	32.507
Liabilitas sewa	14.661	14.661	-	-	14.661
Pinjaman lainnya	1.894	1.897	-	-	1.897
Jumlah	<u>69.743</u>	<u>70.816</u>	<u>7.982</u>	<u>8.018</u>	<u>54.816</u>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

ii. Nilai wajar (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan nilai buku dan nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan, selain dari itu nilai wajar instrumen keuangan dipertimbangkan mendekati nilai buku sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan (lanjutan):

	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
			Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
31 Desember 2021					
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					
Aset keuangan lancar lainnya	78	78	78	-	-
Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan	13.661	13.661	-	8.899	4.762
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi					
Pinjaman:					
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	355	351	-	-	351
Obligasi dan wesel bayar	6.993	8.019	8.019	-	-
Utang bank jangka panjang	36.056	36.176	-	-	36.176
Liabilitas sewa	16.387	16.387	-	-	16.387
Pinjaman lainnya	2.605	2.610	-	-	2.610
Liabilitas lainnya	126	126	-	-	126
Jumlah	76.261	77.408	8.097	8.899	60.412

Kerugian atas pengukuran nilai wajar yang diakui pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 senilai Rp12 miliar. Tidak ada perpindahan antar hirarki nilai wajar selama tahun 2022.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir untuk investasi yang nilai wajarnya diukur dengan input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3) untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah:

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Saldo awal	4.762	1.962
Laba yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(12)	936
Pembelian/penambahan	711	2.068
Penjualan/pengurangan	(32)	(204)
Saldo akhir	<u>5.429</u>	<u>4.762</u>

iii. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dapat ditukarkan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan, antara berbagai pihak secara *arm's length transaction*.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, dan utang bank jangka pendek), dan aset tidak lancar lainnya dipertimbangkan mendekati nilai bukunya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka panjang (aset tidak lancar lainnya (piutang jangka panjang dan kas dibatasi penggunaannya) dan liabilitas tidak lancar lainnya) dipertimbangkan mendekati nilai bukunya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

iii. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pelaporan dari tiap kelas aset dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- (a) Nilai wajar pada laporan laba rugi, terdiri dari saham, reksadana, obligasi korporasi dan Pemerintah, dan obligasi konversi. Saham dan reksadana yang aktif diperdagangkan di pasar dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar atau jika tidak dikuotasi, ditentukan menggunakan teknik penilaian. Nilai wajar dari obligasi konversi ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Obligasi korporasi dan Pemerintah dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan.
- (b) Nilai wajar liabilitas keuangan jangka panjang diestimasi dengan mendiskontokan arus kas kontraktual masa depan dari tiap liabilitas pada tingkat suku bunga yang ditawarkan kepada Grup untuk liabilitas sejenis yang jatuh temponya bisa diperbandingkan oleh para pelaku bank Grup, kecuali untuk obligasi yang didasarkan pada harga pasar.

Estimasi nilai wajar bersifat *judgemental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- (a) Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- (b) Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Grup akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Aktivitas Grup mengandung berbagai macam risiko keuangan, seperti risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing, risiko harga pasar, dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Grup bertujuan untuk meminimalkan kerugian atas nilai aset dan liabilitas yang dapat timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang asing dan pergerakan tingkat suku bunga. Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing yang sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan.

Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh Unit *Corporate Finance* di bawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Unit *Corporate Finance* mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melakukan aktivitas lindung nilai risiko-risiko keuangan.

i. Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi penjualan, pembelian, dan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing terutama dalam Dolar A.S. dan Yen Jepang. Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Grup tidak material.

Risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap liabilitas Grup diharapkan dapat saling hapus dengan dampak dari nilai tukar atas deposito berjangka dan piutang dalam mata uang asing yang ditetapkan minimal 25% dari liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing yang terutang.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan Grup terhadap risiko nilai tukar mata uang:

	31 Maret 2022		31 Desember 2021	
	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)
Aset keuangan	1,35	0,00	1,36	0,00
Liabilitas keuangan	(0,24)	(2,33)	(0,21)	(2,31)
Eksposur bersih	1,11	(2,33)	1,15	(2,31)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

i. Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Analisis sensitivitas

Penguatan Dolar A.S. dan Yen Jepang, sebagaimana diindikasikan di bawah, terhadap Rupiah pada 31 Maret 2022 akan menurunkan ekuitas dan laba atau rugi sebesar jumlah yang ditunjukkan di bawah. Analisis ini didasarkan pada varian nilai tukar mata uang asing yang Grup pertimbangkan sebagai sangat mungkin terjadi pada tanggal pelaporan. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya tingkat bunga, tidak berubah.

	Ekuitas/ laba (rugi)
31 Maret 2022	
Dolar A.S. (penguatan 1%)	160
Yen Jepang (penguatan 5%)	(14)

Pelemahan Dolar A.S. dan Yen Jepang terhadap Rupiah pada 31 Maret 2022 akan mempunyai dampak yang setara tetapi berlawanan terhadap jumlah yang ditunjukkan di atas, pada dasar seluruh variabel lain tidak berubah.

ii. Risiko harga pasar

Grup rentan terhadap perubahan dalam harga pasar atas utang dan ekuitas terkait aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya.

Kinerja aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi Grup dimonitor secara berkala, bersama dengan penilaian secara teratur mengenai keterkaitannya dengan rencana strategis jangka panjang Grup.

Pada tanggal 31 Maret 2022, manajemen mempertimbangkan risiko harga untuk aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi adalah tidak material dalam hal dampak yang mungkin terjadi pada laba rugi dan total ekuitas dari perubahan dalam nilai wajar yang sangat mungkin terjadi.

iii. Risiko tingkat suku bunga

Pergerakan tingkat suku bunga diawasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan. Pinjaman dalam berbagai tingkat suku bunga menyebabkan Grup terpapar risiko tingkat suku bunga (Catatan 19 dan 20). Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Grup melakukan analisis pada pergerakan margin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

Pada tanggal pelaporan, profil risiko tingkat bunga pinjaman yang dikenakan bunga milik Grup adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2022	31 Desember 2021
Pinjaman bunga tetap	(22.602)	(25.444)
Pinjaman bunga mengambang	(40.525)	(43.634)

Analisis sensitivitas untuk pinjaman bunga mengambang

Pada 31 Maret 2022, penurunan (kenaikan) 25 poin dasar pada tingkat bunga pinjaman bunga mengambang akan menaikkan (menurunkan) ekuitas dan laba atau rugi masing-masing sebesar Rp101 miliar. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya nilai tukar mata uang asing, tidak berubah.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iv. Risiko kredit

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Grup:

	<u>31 Maret 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Kas dan setara kas	41.629	38.311
Aset keuangan lancar lainnya	985	493
Piutang usaha	9.495	8.510
Aset kontrak	2.436	2.473
Piutang lain-lain	216	195
Aset tidak lancar lainnya	162	151
Jumlah	<u>54.923</u>	<u>50.133</u>

Grup rentan terhadap risiko kredit terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Risiko kredit dikendalikan dengan pengawasan terus menerus atas saldo dan penagihan. Risiko kredit yang berasal dari saldo bank dan institusi keuangan dikelola oleh Grup melalui Unit *Corporate Finance* sesuai dengan kebijakan tertulis dari Grup.

Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank milik pemerintah karena bank milik pemerintah memiliki jaringan cabang terluas di Indonesia dan dipertimbangkan sebagai bank terpercaya. Oleh karena itu, penempatan ini bertujuan untuk meminimalisasi kerugian secara finansial yang berasal dari potensi kegagalan dalam pembayaran dari bank dan institusi keuangan.

Risiko kredit pelanggan dikelola dengan memantau saldo piutang dan penagihannya secara berkala. Piutang usaha dan piutang lain-lain tidak memiliki suatu konsentrasi utama risiko kredit di mana tidak ada saldo piutang pelanggan yang melebihi 5,53% dari piutang usaha dan piutang lain-lain pada tanggal 31 Maret 2022.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk mengawasi dan mempertahankan eksposur risiko kredit yang minimal, di mana Grup telah menyediakan provisi yang memadai untuk menutupi kerugian yang timbul dari piutang yang tidak tertagih berdasarkan data kerugian historis.

v. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Grup mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Grup. Grup secara terus menerus melakukan analisis untuk mengawasi rasio-rasio likuiditas laporan posisi keuangan, seperti antara lain: rasio lancar dan rasio *debt equity* terhadap persyaratan-persyaratan yang diharuskan perjanjian utang.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

v. Risiko likuiditas (lanjutan)

Berikut adalah analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:

	Nilai buku tercatat	Arus kas wajib	2022	2023	2024	2025	2026 dan selanjutnya
31 Maret 2022							
Utang usaha	15.895	(15.895)	(15.895)	-	-	-	-
Utang lain-lain	643	(643)	(643)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	16.244	(16.244)	(16.244)	-	-	-	-
Deposito pada pelanggan	298	(298)	(298)	-	-	-	-
Utang bank jangka pendek	6.909	(6.909)	(6.909)	-	-	-	-
Pinjaman							
Pinjaman penerusan <i>(two-step loans)</i>	327	(342)	(129)	(121)	(92)	-	-
Obligasi dan wesel bayar	6.993	(12.640)	(2.762)	(381)	(507)	(2.500)	(6.490)
Utang bank jangka panjang	32.343	(37.709)	(8.011)	(5.802)	(7.359)	(6.140)	(10.397)
Pinjaman lainnya	14.661	(2.023)	(1.033)	(623)	(367)	-	-
Liabilitas sewa	1.894	(18.187)	(6.084)	(1.031)	(2.198)	(2.057)	(6.817)
Jumlah	96.207	(110.890)	(58.008)	(7.958)	(10.523)	(10.697)	(23.704)

	Nilai buku tercatat	Arus kas wajib	2021	2022	2023	2024	2025 dan selanjutnya
31 Desember 2021							
Utang usaha	17.170	(17.170)	(17.170)	-	-	-	-
Utang lain-lain	609	(609)	(609)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	15.885	(15.885)	(15.885)	-	-	-	-
Deposito pada pelanggan	401	(401)	(401)	-	-	-	-
Utang bank jangka pendek	6.682	(6.682)	(6.682)	-	-	-	-
Pinjaman							
Pinjaman penerusan <i>(two-step loans)</i>	355	(375)	(150)	(128)	(97)	-	-
Obligasi dan wesel bayar	6.993	(12.821)	(2.817)	(507)	(507)	(2.500)	(6.490)
Utang bank jangka panjang	36.056	(41.867)	(8.228)	(10.335)	(7.492)	(6.064)	(9.748)
Pinjaman lainnya	2.605	(2.801)	(1.164)	(1.115)	(522)	-	-
Liabilitas sewa	16.387	(17.052)	(4.935)	(3.473)	(2.435)	(1.813)	(4.396)
Liabilitas lainnya	126	(148)	(11)	(34)	(34)	(34)	(35)
Jumlah	103.269	(115.811)	(58.052)	(15.592)	(11.087)	(10.411)	(20.669)

Perbedaan antara nilai buku tercatat dengan arus kas wajib merupakan nilai bunga. Nilai bunga dari pinjaman mengambang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga efektif pada tanggal pelaporan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN MODAL

Struktur modal Grup adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2022		31 Desember 2021	
	Jumlah	Bagian	Jumlah	Bagian
Utang jangka pendek	6.909	3,62%	6.682	3,50%
Utang jangka panjang	56.218	29,44%	62.396	32,72%
Total utang	63.127	33,06%	69.078	36,22%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	127.794	66,94%	121.646	63,78%
Jumlah	190.921	100,00%	190.724	100,00%

Tujuan Grup dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Secara berkala, Grup melakukan penilaian utang untuk menilai kemungkinan pembiayaan kembali kewajiban yang ada dengan yang baru yang memiliki biaya yang lebih efisien yang akan mengarahkan pada biaya utang yang lebih optimal. Dalam kasus kas menganggur dengan kesempatan investasi terbatas, Grup akan mempertimbangkan membeli kembali saham-sahamnya atau membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

Sebagai tambahan untuk patuh kepada pembatasan-pembatasan utang, Grup juga menjaga struktur modalnya pada tingkat yang diyakini tidak akan membahayakan peringkat kredit dan yang hampir setara dengan pesaingnya.

Rasio utang terhadap ekuitas (perbandingan utang dengan bunga bersih terhadap total ekuitas) adalah rasio yang dimonitor oleh manajemen untuk mengevaluasi struktur modal Grup dan mengkaji efektifitas utang Grup. Grup memonitor tingkat utangnya untuk meyakinkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas sesuai atau di bawah rasio yang ditetapkan dalam pinjaman kontraktual dan bahwa rasio tersebut sebanding atau lebih baik daripada entitas industri telekomunikasi lain dalam area regional.

Rasio utang terhadap ekuitas Grup pada 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2022	31 Desember 2021
Jumlah utang dengan bunga	63.127	69.078
Dikurangi: kas dan setara kas	(41.629)	(38.311)
Utang bersih	21.498	30.767
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	127.794	121.646
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	16,82%	25,29%

Sebagaimana disajikan dalam Catatan 20, Grup dipersyaratkan untuk memelihara rasio utang terhadap ekuitas dan rasio *debt service coverage* tertentu oleh pemberi pinjaman. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, Grup sudah memenuhi beberapa persyaratan modal yang telah diberlakukan secara eksternal dengan pengecualian untuk beberapa entitas tertentu di dalam Grup (Catatan 20).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2022 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

- a. Aktivitas non-kas investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Penambahan aset tetap melalui:		
Utang usaha	3.791	4.802
Kapitalisasi bunga	7	132
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	889	649
Penambahan aset takberwujud melalui:		
Utang usaha	447	433

- b. Perubahan dalam kenaikan liabilitas dari kegiatan pendanaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2022	Arus kas	Perubahan nontunai			31 Maret 2022
			Perubahan valuta asing	Sewa baru	Perubahan lainnya	
Utang bank jangka pendek	6.682	227	-	-	-	6.909
Pinjaman penerusan (<i>two step loan</i>)	355	(16)	(12)	-	-	327
Obligasi dan wesel bayar	6.993	-	-	-	-	6.993
Utang bank jangka panjang	36.056	(3.728)	4	-	11	32.343
Pinjaman lainnya	2.605	(711)	-	-	-	1.894
Liabilitas sewa	16.387	(2.183)	-	889	(432)	14.661
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	69.078	(6.411)	(8)	889	(421)	63.127

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

- a. Pada tanggal 11 April 2022, GoTo efektif memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.
- b. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup melakukan penarikan fasilitas pinjaman sebagai berikut:
- i. Perusahaan
Pada tanggal 25 April 2022, Perusahaan melakukan penarikan fasilitas pinjaman dari BCA, Bank MUFG, HSBC, dan Bank Permata masing-masing sebesar Rp1.000 miliar, Rp700 miliar, Rp500 miliar, dan Rp400 miliar.
 - ii. Telkomsel
Pada tanggal 25 dan 26 April 2022. Telkomsel melakukan penarikan fasilitas pinjaman dari BCA, Mandiri, MUFG, BNI dan BSI masing-masing sebesar Rp500 miliar.